



CV AFASA PUSTAKA

Kajian Islam Transdisipliner

Pengetahuan Tentang Islam Dalam
Lintas Disiplin Ilmu

Editor:

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.
Dr. Hidayatullah, M.Pd.



Firman Robiansyah, Eri Murniasih, Saepul Bahri, Ahmad Munji,
Ummu Habibah, Faizudin, Misbahuddin, Ofik Taufiqurrohman,
Fatrilia Rasyi Radita, Bahyati, Tatu Humaeroh & Muhasor

Firman Robiansyah, dkk.

KAJIAN ISLAM TRANSDISIPLINER
Pengetahuan Tentang Islam Dalam Lintas Disiplin Ilmu



Sumatera Barat - Indonesia

KAJIAN ISLAM TRANSDISIPLINER
Pengetahuan Tentang Islam Dalam Lintas Disiplin Ilmu

Penulis:

Firman Robiansyah, Eri Murniasih, Saepul Bahri, Ahmad Munji,
Ummu Habibah, Faizudin, Misbahuddin, Ofik Taufiqurrohman,
Fatrilia Rasyi Radita, Bahyati, Tatu Humaeroh & Muhasor.

Editor:

Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.
Dr. Hidayatullah, M.Pd.

Desain Sampul & Tata Letak

Firman Robiansyah

Diterbitkan Oleh:

CV. Afasa Pustaka
Perumahan Pasaman Baru Garden Blok B no 8 Katimaha, Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Simpang Empat Pasaman Barat 26566
Sumatera Barat - Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin penerbit

Cetakan ke-1, Januari 2024

ISBN : 978-623-09-7942-2

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama Allah yang maha Pengasih dan maha Pemurah. Segala puji hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam semesta, dan akhir yang baik untuk orang-orang yang bertaqwa, dan tidak ada permusuhan kecuali hanya pada orang-orang yang dzolim. Sholawat dan Salam Allah semoga tetap terlimpah kepada makhluk-Nya yang paling utama, yaitu Nabi agung Muhammad SAW. dan kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Alhamdulillah kami panjatkan atas rahmat dan karunia Allah *subhanahu wata'aala* buku ini dapat terwujud dengan baik walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan bahkan mungkin kesalahan. Tulisan ini merupakan perjalanan intelektual kami dengan merangkai kata-kata yang berusaha menggambarkan keindahan dan kompleksitas Kajian Islam Transdisipliner. Buku ini merupakan upaya kami untuk menyajikan pandangan holistik terhadap ajaran Islam, menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk menjawab tantangan zaman ini.

Kajian Islam Transdisipliner adalah bentuk kajian yang mengintegrasikan pemikiran Islam dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Dengan landasan ajaran agama Islam yang kokoh, buku ini menjelajahi hubungan antara agama, ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya bukan hanya untuk merangkai pemahaman yang lebih dalam terhadap Islam, tetapi juga untuk memberikan pandangan yang inklusif terhadap permasalahan global yang dihadapi oleh umat manusia.

Dalam bab-bab buku ini, pembaca akan diajak melibatkan diri dalam perjalanan pengetahuan yang melintasi batas-batas tradisional, merambah dari sejarah tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam hingga eksplorasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kontributor buku ini adalah para mahasiswa doktoral Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan ke-5.

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga bagi para peneliti, akademisi, mahasiswa, dan pembaca yang ingin mendalami Kajian Islam Transdisipliner. Dalam era globalisasi ini, pemahaman yang holistik terhadap agama dan kehidupan menjadi semakin penting, dan buku ini hadir sebagai kontribusi kecil kami untuk mengisi kekosongan tersebut.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat membantu membuka cakrawala pengetahuan Anda dan memberikan wawasan yang mendalam tentang betapa

relevannya Kajian Islam Transdisipliner dalam menjawab tantangan kompleks dunia kontemporer.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam perjalanan pembelajaran ini.

Wallahu a'lam bi ash-Shanwab

Serang, 5 Januari 2024

Editor

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	ii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Peran Strategis Pesantren, Madrasah dan Sekolah Islam di Indonesia: Telaah Atas Buku Karya Karel A. Steenbrink Firman Robiansyah.....	1
Al-Qur'an Berjalan: Pendidikan Islam, Pengetahuan Yang Terwujud, dan Sejarah di Afrika Barat Eri Murniasih.....	18
Pesantren Indonesia: Merentang Tradisi ke Arah Masa Depan Yang Berkilau Saepul Bahri & Ahmad Munji.....	35
Pendidikan Agama Islam dan Sekularisasi: Tradisi Pesantren dan <i>Civil Society</i> Di Indonesia Ummu Habibah & Faizuddin	59
Pendidikan Islam dan Indoktrinasi di Indonesia: Kajian Kritis Tulisan Charlene Tan Misbahuddin & Ofik Taufiqurrohman.....	79
Pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia: Perbandingan Implementasi Pendidikan Islam Fatrilia Rasyi Radita	97
Gerakan Pendidikan Islam Perempuan: Re-Demokratisasi Pengetahuan Islam Dalam Pandangan Masoda Bano Bahyati.....	118
Pandangan Islam Dalam Menyikapi Kesetaraan Gender dan Perubahan Budaya di Seluruh Dunia Tatu Humaeroh.....	132
Peran Pesantren Dalam Membangun Pendidikan dan Ekonomi di Indonesia Menurut Scoot Allen Baresh Muhasor.....	148

PERAN STRATEGIS PESANTREN, MADRASAH DAN SEKOLAH ISLAM DI INDONESIA: TELAAH ATAS BUKU KARYA KAREL A. STEENBRINK

Firman Robiansyah

Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang

firmanrobiansyah@upi.edu

PENDAHULUAN

Perkembangan Islam dalam peradaban tidak luput dari adanya pendidikan dalam dunia Islam itu sendiri. Karena Islam memerintahkan supaya umatnya berilmu dalam memajukan peradaban. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-‘Alaq [96]: 1-5. Atas landasan teologis ini umat Islam memiliki peradaban untuk menuntut ilmu. Dari sana mulai adanya gerakan keilmuan. Bila ditilik, perkembangan ilmu dalam Islam sudah ada sejak masa kenabian. Meskipun demikian, perkembangannya hanya berkutat dalam ilmu-ilmu dasar keislaman dan belumlah memiliki sistem pembelajaran yang metodis dan sistematis. Pada masa perkembangan selanjutnya, barulah ada berbagai halaqah hingga dirasat yang membentuk suatu tempat menimba ilmu keislaman yang utuh (Efendi, 2019: 37).

Melihat perkembangan keilmuan Islam tersebut, turut terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak kalah penting menjadi objek kajian. Eksistensi Pendidikan Islam di Indonesia sesungguhnya ada semenjak Islam itu masuk ke Indonesia (Miswanto, 2021: 126). Sejak masuknya Islam ke Indonesia pendidikan Islam sudah dimulai. Indonesia yang kala itu telah masuk dalam jajahan Belanda disebut dengan Hindia Belanda telah mengembangkan sistem pendidikan Islam berbasis pesantren. Lembaga pendidikan Islam ini memiliki perkembangan yang dramatis dalam pergulatanya menghadapi pemerintahan kolonial dan perkembangan keilmuan kala itu. Salah seorang peneliti dalam bidang ini adalah tokoh orientalis bernama Karel A. Steenbrink. Dia mencurahkan sebagian hidupnya untuk meneliti lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan pengkajian ketimuran.

Steenbrink sebelumnya tertarik dalam metode penafsiran yang

digunakan dalam Islam. Itulah yang menyebabkan dia ingin mengkaji Islam tidak secara teoritis, melainkan praktis (Steenbrink, 1991, hlm. viii). Melihat pergerakan negaranya yang banyak melakukan ekspansi ke wilayah kolonial, maka dia mengajukan diri untuk mengadakan penelitian tafsir di Indonesia pada Universitas Katolik Nijmegen. Setelah sampai di Indonesia, ada suatu hal yang keliru dan tidak diketahui oleh Steenbrink bahwa di Indonesia corak maupun metodologi tafsir belumlah berkembang. Maka dia menyusun proposal kembali untuk mengadakan studi Islam di Indonesia. Akhirnya dia tertarik mengadakan studi pada lembaga pendidikan Islam Indonesia berbasis pesantren.

Penelitian Steenbrink mengenai lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren ini mengambil sampel pada beberapa pesantren di pulau Jawa dan Sumatra. Secara umum dapat digambarkan bahwa lembaga pendidikan Islam pesantren ini turut mengalami perkembangan dari masa awal hingga masa kekinian setelah kemerdekaan. Fokus penelitian Steenbrink adalah perkembangan lembaga pendidikan Islam masa kolonial (setelah kebijakan balas budi) hingga masa kemerdekaan. (Steenbrink, 1991, hlm. vii–xix) Perkembangan ini terjadi karena faktor intern yang menginginkan adanya perubahan paradigma keilmuan yang tradisional menuju modernis dan berbagai faktor intern lainnya. Adapun dari segi ekstern melihat perkembangan keilmuan dan lembaga pengkajian Islam lain telah lebih maju ketimbang pesantren. Hal ini karena adanya perkembangan ilmu umum yang menuntut dapat diaplikasikan dalam kehidupan (ilmu praktis) dan paradigma keilmuan yang maju dan modern melalui lembaga Islam maupun non-Islam yang lain, seperti madrasah dan sekolah. Di sisi lain, adanya alih peran dan dualisme pendidikan di Indonesia. Berangkat dari krisis akademik inilah Karen Steenbrink meneliti perkembangan lembaga pendidikan terutama Islam berbasis pesantren yang mewarnai percaturan lembaga pendidikan di Indonesia. Tulisan ini mengkaji bagaimana hasil kajian Steenbrink atas lembaga pendidikan Islam dan sejauh mana sumbangsuhnya terhadap perkembangan keilmuan Islam di Indonesia.

Mengenai perkembangan kelembagaan dan pendidikan Islam di Indonesia telah banyak penelitian tentang hal tersebut. Meskipun demikian, perlu kiranya untuk dilampirkan beberapa penelitian yang membahas hal tersebut sebagai bahan awal dan perbandingan, juga menjadi loncatan dalam penelitian ini. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, Zamakhsyari Dhofir dalam Tradisi Pesantren: Studi tentang

Pandangan Hidup Kiyai tahun 1982. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana peranan kiyai dalam memelihara dan mengembangkan paham Islam tradisional di Jawa dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan pesantren dan Islam tradisional di Jawa pada era modern. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi lapangan, terutama atas dua pesantren, yaitu Pesantren Tegalsari dan Pesantren Tebuireng. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dengan metode historis dan etnografis. Secara bahasa, etnografi berarti potret suatu masyarakat. Etnografi adalah metode penelitian sosial yang tergantung sepenuhnya pada pengamatan peneliti secara dekat, sehingga ia perlu membekali diri dengan kemampuan bahasa, budaya, dan pengetahuan mendalam tentang wilayah atau bidang penelitian, dan menggunakan metode yang sesuai dengan tujuan penelitian (Hanifah, 2010, hlm. 3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun para kiyai terikat kuat oleh pola pemikiran Islam tradisional, namun mereka mampu membenahi dirinya untuk tetap memiliki peranan membangun masa depan Indonesia. Mereka menjadi penghubung antara Islam tradisional dengan dunia nyata (Dhofier, 1994).

Kedua, Manfred Ziemek dalam karyanya *Pesantren Dalam Perubahan Sosial* tahun 1986. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana peranan Pendidikan Islam tradisional (pesantren) bagi perubahan sosio-kultural di kawasan masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian field research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-historis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Islam punya potensi pendidikan dan kemasyarakatan di Indonesia yang dapat dilihat pada pesantren tradisional. Menurutnya pesantren adalah pusat pengembangan pendidikan, politik, budaya, sosial, dan keagamaan. (Ziemek, 1986).

Menurut Achyar dan Samsudin (2023: 2), walaupun penelitian Steenbrink ini sudah dilakukan beberapa dekade yang lalu, namun hasil penelitian ini masih tetap relevan untuk dikaji. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti belakangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang/tema terkait. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk mengulas sekilas tentang isi buku hasil penelitian Steenbrink ini. Selain itu juga perlu menambahkan beberapa catatan yang mungkin tidak sengaja terlewatkan oleh Steenbrink. Dengan pembahasan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sejarah perkembangan lembaga serta modernisasi pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia, baik yang berupa pesantren, madrasah maupun sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pendidikan Islam dari Masa Penjajahan hingga Kemerdekaan

Penelitian yang diadakan oleh Karel A. Steenbrink ini pada dasarnya adalah tertuju pada lembaga pendidikan Islam berbasis pesantren. Hal ini karena dia yang berlatar belakang agama Katolik merasa memiliki kesamaan pada masa menuntut ilmu sebagaimana halnya pesantren. Meskipun demikian, dalam rangka penelitian perkembangan lembaga pendidikan dan pendidikan Islam itu sendiri perlu dijelaskan bagaimana bermulanya lembaga pendidikan dan pendidikan itu sendiri di Indonesia.

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang pada awalnya sebagai miniatur dalam kehidupan. Di dalamnya para murid ditempa nilai-nilai hidup kedisiplinan, kesederhanaan, dan berbagai nilai baik kehidupan (Firdausia dkk., 2020, hlm. vi). Di dalamnya para murid belajar kepada Kyai yang mengajarkan pelajaran Islam sebagai landasan utama. Karena visi dan misi utama pesantren adalah mengajarkan dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Selain itu juga menanamkan iman dan akhlak yang terpuji bagi seluruh keluarga pesantren (Kafrawi, 1978, hlm. 174). Nurcholish Madjid mengatakan bahwa pesantren mengandung makna keaslian Indonesia (Indigenous) (Madjid, 2013, hlm. 3). Karena di dalamnya terdapat elaborasi pendidikan Islam dengan kultur budaya asli Indonesia. Lebih lanjutnya Steenbrink mendeskripsikan bagaimana pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang keindonesiaan itu dalam uraian berikut.

a. Perkembangan Lembaga dan Pendidikan di Era Kolonial

Setelah adanya politik balas budi yang digulirkan oleh pemerintah kolonial Belanda, mulailah kegiatan belajar mengajar yang diadakan langsung secara resmi oleh pemerintah kolonial kala itu. Pada dasarnya lembaga pendidikan kolonial ini telah ada jauh sebelum adanya politik balas budi. Hal ini dibuktikan dengan adanya gereja yang mengadakan pendidikan dalam kurun waktu penjajahan yang begitu lama. Tidak dipungkiri bahwa tujuan utama mereka datang ke tanah Indonesia salah satunya adalah penyebaran agama masehi. Hal ini jelas bahwa tujuan daripada orang Eropa untuk datang ke tanah jajahannya adalah atas Gold, Glory dan Gospel (G3). Gold untuk mencapai kekayaan dan kesejahteraan hidup sepenuhnya dengan jalan monopoli perdagangan, glory adalah memperluas daerah kekuasaan dengan infaksi ke daerah jajahan (politik), dan gospel yaitu menyebarkan agama masehi sebagai misi gereja. Terdapat

dua tempat yang telah menjadi basis pendidikan agama masehi kala itu, yaitu Maluku dan Minahasa.

Pada saat bersamaan adanya sekolah yang diadakan oleh pemerintah kolonial Belanda, ada pula sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang berbasis pesantren. Steenbrink tertarik dengan lembaga pendidikan ini dengan berupaya mengeksplornya secara lebih dalam. Banyak temuannya dalam dunia pesantren, yaitu:

1) Pendidikan Tradisional al-Quran

Pendidikan awal dari seorang santri ketika menuntut ilmu di pesantren adalah ilmu al-Quran. Ilmu ini adalah ilmu dasar dalam mempelajari Islam. Sistem pendidikannya adalah berbasis tradisional berupa pelajaran dasar al-Quran meliputi pengenalan huruf, tajwid, irama, dan diselingi dengan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi urgen di sini. Karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling banyak digunakan dalam penyampaian ajaran Islam. Selain itu diajarkan pula berbagai praktek ibadah dasar Islam seperti tata cara wudhu', shalat, dan puasa. (Steenbrink, 1991, hlm. 10)

Pendidikan al-Quran ini biasanya tertuju pada santri yang baru masuk pada usia yang relatif muda. Pada masa itu orang tua lebih banyak memasukkan anaknya ke pesantren ketimbang sekolah yang diadakan oleh pihak kolonial dengan alasan supaya sang anak mengenal agamanya. Tujuannya adalah dapat berguna dalam kehidupannya nanti selepas menyelesaikan pendidikan di pesantren. Latar belakang anak-anak yang menyantri kala itu kebanyakan dari kaum kelas bawah dengan dominasi petani. Sehingga kemampuan intelektual mereka hanya harus disesuaikan dengan pengetahuan agama saja.

2) Sistem Pendidikan Kitab

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar al-Quran, seorang santri yang dinyatakan lulus oleh gurunya dapat melanjutkan pada tingkat berikutnya. Pada tingkat ini, seorang menimba ilmu melalui kitab kuning. Penyebutan kitab kuning ini telah ada dan dimulai ketika para ulama yang kembali dari Timur Tengah utamanya Mekkah dengan membawa ilmu. Dengan dasar ilmu yang banyak dan kitab yang banyak mereka menyebarkan ajaran Islam. Disebut kitab kuning, Karena kala itu kitab-kitab berbahasa Arab itu menggunakan kertas berwarna kuning. Sehingga apapun kitab yang menggunakan teks Arab disebut dengan kitab kuning. Jangkauan ilmunya lebih luas, meliputi ilmu tafsir,

ilmu hadits, fiqh, sirah, mantik, balaghah, faraidh, dan tasawuf. Semua ilmu-ilmu keislaman ini diajarkan kepada santri yang telah beranjak menuju dewasa. Lamanya seorang santri belajar sesuai dengan kemampuannya untuk menguasai ilmu yang ada dan atas persetujuan kiyainya. (Steenbrink, 1991, hlm. 12–13)

Pada beberapa pesantren terutama yang pesantren yang kecil, tidak memiliki kapasitas dalam melaksanakan pendidikan tingkat ini. Hal ini karena kekurangan tenaga pendidik dan biasanya pesantren kecil hanya melaksanakan pendidikan dasar saja. Untuk memenuhi hal tersebut, maka kiyai dari pesantren kecil memberikan rekomendasi bagi santrinya yang telah berhasil menyelesaikan studinya untuk melanjutkan ke pesantren yang lebih besar guna menimba ilmu yang lebih dalam. Dengan begitu menurut Steenbrink adanya hierarki dalam pendidikan pesantren.

b. Lembaga-lembaga Pendidikan Era Kolonial dan Pasca Kemerdekaan

Perkembangan lembaga pendidikan dan pendidikan itu sendiri pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Pada masa kolonial setelah adanya politik balas budi, mulai berdiri berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Pendirian berbagai lembaga pendidikan ini tidak lepas daripada berdirinya berbagai organisasi sosial-keagamaan di Hindia Belanda. Di antara organisasi tersebut dan gerakannya dalam pendidikan Islam yaitu:

1) Adabiah

Lembaga pendidikan Adabiah ini merupakan lembaga pendidikan yang bergerak dalam pembaruan pendidikan di Sumatera Barat. Didirikan oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1907 di Padang Panjang. Pendirian lembaga pendidikan ini Karena dia terpengaruh dengan gerakan pembaruan pendidikan di Timur Tengah dan ditambah dia belajar di Mekkah. Setelah mendapat persetujuan dari Syekh Ahmad Chatib al- Minangkabawi dan mendapat dukungan pula dari Thahir Djalaluddin dari Singapura dia mendirikan lembaga ini.

Lembaga pendidikan ini pada saat telah mendapat persetujuan dari pihak kolonial Belanda menjalani pendidikan selama setahun di Padang Panjang. Melihat kurang antusiasnya masyarakat di sana, maka dia memindahkan sekolahnya ke Padang. Di Padang, lembaga pendidikan ini mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Sistem dan kurikulum pendidikan yang diberikan adalah memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama dengan pola meniru sekolah Belanda.

Selain itu memiliki misi keagamaan untuk menumpas berbagai kesyirikan dan bid'ah yang menurutnya dibuat oleh tarekat yang berkembang di Sumatera Barat (Steenbrink, 1991, hlm. 37– 42). Sampai sekarang lembaga pendidikan ini bertahan dan tetap eksis di Sumatera Barat.

2) Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Pada tahun 1911 beliau mendirikan sebuah sekolah dasar di lingkungan Kraton Yogyakarta. Sekolah ini dijalankan dengan sistem pendidikan gubernamen. Sistem pendidikan gubernamen adalah sebuah sistem pendidikan yang dibawa dan diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda kala itu di Hindia Belanda (Indonesia). Sistem ini tersusun dengan metodis dan sistematis, sehingga memiliki kurikulum dan target capaian. Di sisi lain sarana prasarana penunjangnya disesuaikan dengan konsep pendidikan modern yang telah berkembang di berbagai belahan dunia Eropa.

Pada 18 November 1912 Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah bersama dengan teman-temannya. Pada mulanya kegiatan organisasi ini adalah tabligh. Sedangkan dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah melanjutkan model sekolah yang digabungkan sistem pendidikan gubernamen. Pada akhir tahun 1923, di Yogyakarta telah didirikan empat sekolah dasar Muhammadiyah. Di samping itu, organisasi itu juga mendirikan sekolah yang lebih bersifat agama, seperti madrasah diniyah di Minangkabau. Pada 8 Desember 1921, Muhammadiyah sudah dapat mendirikan Pondok Muhammadiyah sebagai sekolah pendidikan guru agama. Muhammadiyah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini Karena penyebaran gerakannya yang tabligh dan dalam rangka menumpas taqlid, bid'ah, khurafat dan kesyirikan. Dalam bidang pendidikan, pada tahun 1932 Muhammadiyah di Jawa Tengah telah mempunyai 165 sekolah model gubernamen, di samping 68 sekolah agama (Steenbrink, 1991, hlm. 50–57).

3) Jami'atul Washliyah

Jami'atul Washliyah berdiri pada tahun 1930 di Medan. Organisasi ini adalah inisiatif anggota Debating Club yang didirikan oleh para lulusan Maktab Islamiyah Tapanuli pada tahun 1928. Tiga orang pendorong paling dalam perkumpulan ini adalah Abdurrahman

Syihab, Udin Syamsudin, dan Arsyad Lubis. Organisasi ini tidak mendapat cap tradisional atau reformis Karena pimpinannya berganti setiap tahun. Karena hubungan yang terjalin baik dengan beberapa madrasah dan sekolah yang sudah terjalin melalui Debating Club sehingga banyak dari mereka dan beberapa tokoh dari luar kota Medan yang mengabungkan diri dengan Jami'atul Washliyah. Dengan penggabungan ini terjadilah reorganisasi kurikulum di madrasah serta memasukkan sistem klasikal dan sebagainya. Sehingga perkumpulan ini mendobrak sistem pesantren lama, di mana pendirian sebuah madrasah hanya diserahkan kepada inisiatif lokal. Seperti halnya Muhammadiyah, Jami'atul Washliyah menggunakan dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan sekolah sebagaimana gubernemen dan pendidikan madrasah keagamaan (Steenbrink, 1991, hlm. 76–83).

4) Nahdlatul Ulama

Pembaharuan Pendidikan kelima dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Pada tanggal 31 Januari 1926 Abdul Wahab Hasbullah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan bentuk protes terhadap gerakan reformis, di samping itu, sebagai organisasi yang membela mazhab Syafi'i dan menyaingi organisasi Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Setelah NU di bawah kepemimpinan K.H. Hasyim Asy'ari tahun 1927, NU menjadi populer terutama di kalangan pendidikan pesantren. Sampai tahun 1945, NU masih tetap sebagai organisasi yang belum diatur secara tegas.

Pembaharuan lahir dari dua murid K.H. Hasyim Asy'ari, yaitu K.H. Moh. Ilyas dan K.H. Wahid Hasyim. Dengan persetujuan K.H. Hasyim Asy'ari, Moh. Ilyas memasukkan mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah, dan bahasa Melayu dalam pesantren. Dalam proses pembelajaran Moh. Ilyas mencontoh sistem pengajaran bahasa Belanda yang ia terima ketika sekolah di HIS. NU kala itu tidak memiliki statistik yang lengkap mengenai pendidikannya. Namun pada tahun 1920-an hingga 1930-an, Pesantren Tebuireng menjadi pesantren yang paling masyhur di seluruh Indonesia dengan santri lebih dari 6000 orang (Steenbrink, 1991, hlm. 65–72).

5) Pembaharuan Pendidikan Islam oleh Departemen Agama RI

Departemen Agama RI didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Kebijakan dalam pendidikan agama sudah dimulai sejak zaman Jepang.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh Departemen Agama pada tahun 1946. Dalam salah satu nota Islamic Education in Indonesia yang disusun oleh bagian pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 september 1956 digambarkan sebagai berikut (Steenbrink, 1991, hlm. 83–102).

a) Memberikan pengajaran agama di sekolah negeri dan partikulir

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah dapat dilihat dalam UU Pendidikan tahun 1950 No. 4 (hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta) dan UU Pendidikan tahun 1954 No. 20. Salah satu penjelasan pasal dalam UU Pendidikan 1954 No. 20 adalah menetapkan bahwa pengajaran agama tidak boleh mempengaruhi kenaikan kelas para murid. Peraturan bersama Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari 1951 juga menetapkan bahwa Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan Islam yang kuat, pelajaran agama mulai dari kelas I dan jam pelajaran ditambah 4 jam perminggu.

Di Sekolah Menengah Pertama, pelajaran agama diberikan 2 jam per minggu. Untuk memperbaiki peraturan sebelumnya, pada 16 Juli 1951 kedua menteri mengeluarkan Peraturan Bersama. Namun dari peraturan ini terlihat adanya diskriminasi terhadap orang-orang Islam. Kebijakan yang diskriminatif terlihat dalam peraturan baru yang menyebutkan bahwa gereja Kristen sudah mempunyai hierarki tersendiri dan mempunyai ahli agama yang berpendidikan akademis. Sehingga pihak Kristen boleh menentukan pelajarannya sendiri. Adapun pihak Islam belum mempunyai tenaga akademis yang cukup, mereka harus mendapat pedoman didaktis dan metodis dari Menteri Pendidikan.

Pengajaran agama memainkan peranan penting dalam penilaian para murid dan mahasiswa sejak sidang MPRS tahun 1967. MPRS mengubah ketetapan tahun 1960 (yang memberikan kebebasan bagi para mahasiswa di universitas umum untuk mengikuti atau tidak pelajaran agama) dengan mewajibkan para mahasiswa mengikuti pengajaran agama. Mahasiswa hanya dibebaskan memilih agama apa yang akan dipelajari. Ketetapan ini diikuti oleh Peraturan Bersama Menteri. Pada tanggal 23 Oktober 1967 ditetapkan bahwa kelas I dan II SD diberikan mata pelajaran

agama 2 jam per minggu. Kelas III 3 jam per minggu, kelas IV ke atas 4 jam per minggu. Hal itu juga berlaku pada SMP dan SMA. Untuk universitas dan perguruan tinggi lainnya mata kuliah agama diberikan 2 jam setiap minggu. Pada akhir tahun 1970 Menteri Agama berusaha mengubah kurikulum pengajaran agama yang bertujuan agar semua kelas tertinggi SD dan SMP mendapat 6 jam pelajaran agama per minggu. Akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena tidak disetujui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

b) Memberikan Pengetahuan Umum di Madrasah

Dalam rangka konvergensi, Departemen Agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum di samping agama. Departemen Agama hanya memberikan bantuan kepada madrasah yang juga memperhatikan pendidikan umum. Dalam rangka usaha mendapat pengakuan sosial, Departemen Agama membuat suatu rumusan mengarah, yaitu pertama, berusaha mempengaruhi pendapat umum bahwa madrasah tidak hanya cukup memberikan pengajaran agama. Kedua, berusaha mempengaruhi pendapat umum bahwa mata pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama dibanding sekolah umum. Secara formal Departemen Agama mendapat keuntungan dengan UU 1950 pasal 10 yang menyebut belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama sudah memenuhi kewajiban belajar.

c) Melakukan Pendidikan Guru Agama (PGA)

Dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) pertama 1969-1973, Departemen Agama merencanakan perluasan PGA dan lembaga pendidikan pegawai Departemen Agama, seperti IAIN. Namun dalam peraturan ini Departemen Agama tidak mengembangkan sistem pendidikan di madrasah secara lebih luas. Untuk memasuki lembaga PGA dan IAIN ini harus ditempuh melalui jenjang formal, yaitu bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau SD dapat melanjutkan ke PGA, tamatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP untuk PGAA. Sedangkan IAIN harus tamat SMA atau Madrasah Aliyah.

Guru Agama Modern: dari Kiyai (K.H.) ke Drs.

Dalam kurun modern, guru bukanlah komponen pendidik yang berdiri sendiri. Tetapi seorang guru haruslah mengikuti kurikulum yang disusun orang lain. Perkembangan pendidikan di Indonesia juga menunjukkan bahwa unsur keturunan tidak lagi yang paling menentukan, akan tetapi unsur pengetahuan yang lebih diperkuat dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.

Pada awalnya faktor keturunan seseorang sangat mempengaruhi dia untuk menjadi tokoh, guru, atau kiyai. Misalnya di pesantren tradisional, unsur keturunan memegang peranan penting (kiyai untuk pesantren mungkin anak dari Kiyai). Namun, dalam perkembangan terakhir dikemukakan beberapa keberatan terhadap kenyataan bahwa pesantren merupakan milik pribadi salah seorang kiyai. Keberatan-keberatan tersebut antara lain: pertama, bahaya dalam perkawinan dalam hubungan keluarga dekat yang dapat menyebabkan lemah keturunan. Kedua, kontinuitas yang tidak begitu terjamin dengan sistem keturunan. Ketiga, kurang meratanya penyebaran pesantren (Steenbrink, 1991, hlm. 115–116). Akhirnya Steenbrink menyimpulkan bahwa dalam perkembangan terakhir Islam di Indonesia, semua orang bisa menjadi kiyai jika dia diterima oleh masyarakat.

Tipe kesalehan seorang kiyai, adalah bahwa dia mengajar tanpa lelah dari pagi hingga sore, selalu bersedia pergi ke desa atau kota lain untuk mengajar agama atas permintaan dan tanpa meminta uang, selain ongkos jalan. Namun, para kiyai sering mendapat hadiah dalam bentuk beras, benda-benda berharga, uang, tetapi kebanyakan kiyai masyhur mengurus hidupnya secara sederhana. Jika dibandingkan dengan guru madrasah dan guru agama di sekolah modern, terdapat perubahan mengenai sifat-sifat kesalehan. Pada guru agama tidak dipentingkan lagi pribadi yang utuh seperti guru agama tradisional atau pengajaran yang dicerminkan dalam tingkah lakunya sehari-hari. (Steenbrink, 1991, hlm. 128–129) Pada guru agama modern, unsur intelektual lebih dipentingkan dari pada unsur kepribadian dan unsur-unsur lainnya. Kesalehan sebagaimana yang dikatakan pada guru agama tradisional, sedikit berlebihan apabila diterapkan untuk guru agama modern di madrasah dan sekolah. Bagi mereka, persyaratan mengajarlah yang dipentingkan.

Walaupun masih dalam keadaan berkembang, namun dapat diambil kesimpulan dari tendensi yang terjadi yang berhubungan dengan kedudukan guru dalam umat Islam di Indonesia, yaitu: Pertama, guru tidak lagi merupakan pusat kegiatan agama dalam lingkungannya (menjadi perantara antara Tuhan dan manusia dan penafsir agama yang mandiri). Guru pada umumnya menjadi

anggota dari organisasi yang lebih besar, yang menentukan isi ajaran dan menjaminn kemurnian ajaran agama. Kedua, kiyai dulu merupakan pribadi yang multi fungsional. Sekarang fungsi-fungsi tersebut sudah terbagi- bagi. Seorang yang masih berdinasi dalam organisasi atau Departemen Agama mempunyai tugas yang terbatas. Dia harus mengikuti bahan dan kurikulum yang sudah ditentukan dan mendapat gaji. Menjadi guru di era modern ini berarti mencari penghidupan dan gaji. Sedangkan tugas-tugas lainnya sebagai sukarelawan pada waktu-waktunya yang terluang. Ketiga, pertentangan antara penghulu dan kiyai, sekarang ini sudah tidak terasa. (Steenbrink, 1991, hlm. 163)

Perubahan dalam Materi Pengajaran Agama

a. Pengajian al-Quran

Pengajian al-Quran tradisional biasanya terdiri dari membaca sebagian al-Quran dan pelajaran lain berupa shalat, akidah, dan menghafal. Jika dibandingkan dengan madrasah diniyah awaliyah, madrasah ini disediakan bagi anak-anak yang pada waktu pagi pergi ke sekolah umum, dan pada sore hari mendapat pelajaran agama. Pembelajaran al-Quran dan lainnya yang dikelola Departemen Agama kurikulumnya tersusun sebagai berikut.

Tabel 1. Kurikulum Tingkat Diniyah Awaliyah

No.	Mata Pelajaran	Jam/Minggu
1	Membaca al-Quran	3
2	Tauhid	3
3	Fiqh	2
4	Akhlak	2

Sumber: (Steenbrink, 1991, hlm. 167)

Kemudian setelah mengikuti madrasah diniyah awaliyah yang dirancang dengan siklus 4 tahun, dilanjutkan dengan madrasah diniyah wustha atau tsanawiyah dan aliyah. Kurikulumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kurikulum Tingkat Diniyah Wustha

No	Mata pelajaran	Kelas I	Kelas II	Kelas III
		Jam/Minggu	Jam/Minggu	Jam/Minggu
1	Al-Qur'an dan Hadits	3	3	3
2	Tauhid	3	2	2
3	Fiqh	1	1	1
4	Sejarah Islam	2	2	3
5	Akhlak	1	1	1

Sumber: (Steenbrink, 1991, hlm. 168)

Tabel 3. Kurikulum Tingkat Aliyah

No	Mata pelajaran	Kelas I Jam/Minggu	Kelas II Jam/Minggu	Kelas III Jam/Minggu
1	Al-Qur'an dan Hadits	3	3	3
2	Tauhid	2	2	2
3	Fiqh	3	3	3
4	Sejarah Islam	1	1	1
5	Akhlak	1	1	1

Sumber: (Steenbrink, 1991, hlm. 168)

Selama tidak ada subsidi, guru pengajian al-Quran tidak diwajibkan mengikuti kurikulum yang disusun Departemen Agama. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum ini mempunyai nilai terbatas. Namun, kurikulum ini dapat menjadi pembuktian cara berpikir ahli pendidikan agama di Departemen Agama mengenai apa yang diinginkan dan tujuan yang akan dicapai. Dibandingkan dengan pengajian al-Quran tradisional, yang menonjol dari kurikulum ini adalah perhatian yang lebih luas terutama dalam bidang akidah, akhlak, dan sejarah Islam. Tambahan empat mata pelajaran tersebut tidak hanya berlaku pada madrasah diniyah, tetapi juga instruksi pada mata pelajaran agama di sekolah umum. Hal ini dapat di lihat dalam instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1967 dengan skema sebagai berikut.

Tabel 4. Instruksi Mendikbud atas Kurikulum Pendidikan Agama Islam

No.	Mata Pelajaran	1	2	3	4	5	6
1	Tauhid	-	-	-	35	35	35
2	Akhlak	35	35	70	-	-	-
3	Fiqh	35	35	35	35	35	35
4	Al-Qur'an	-	-	-	35	35	35

Sumber: (Steenbrink, 1991, hlm. 170)

Penghargaan Agama terhadap Pendidikan Umum

- a. Penolakan teoritis tentang adanya perbedaan antara Ilmu Agama dan Umum

Menurut pandangan Islam, Islam bukan hanya semata-mata agama saja, melainkan mencakup aspek-aspek kehidupan lainnya. Mohammad Natsir menolak pemisahan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Bahkan A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh yang memperjuangkan dan meralisasikan Kota Pelajar Darusalam mengatakan (Steenbrink, 1991, hlm.

224–225):

“Memperdalam ilmu agama Islam berarti mempelajari secara mendalam segala bidang ilmu. Karena semua ilmu adalah ilmu Islam, baik yang dinamakan al-‘ulum al- naqliyah maupun al-‘ulum al-‘aqliyah, baik yang dinamakan ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu eksakta. Maka Darusalam tidak dapat menerima pendapat sementara orang yang mengatakan bahwa ini ilmu Islam dan itu ilmu umum sehingga timbul istilah ini sekolah Islam dan itu sekolah umum. Darussalam dengan secara radikal telah menguburkan suatu mitos yang telah lama menghantui alam pikiran sebagian masyarakat Indonesia, yaitu kepercayaan adanya jurang antara agama dengan ilmu pengetahuan. Sehingga menyebabkan terjadi pula jurang yang dalam antara orang- orang yang memilih bidang ilmu yang tidak sama. Suatu tragedi yang telah memundurkan bangsa Indonesia.”

b. Berbagai penghargaan positif terhadap pendidikan umum

Adapun beberapa pendapat umum terkait pentingnya pendidikan umum adalah (Steenbrink, 1991, hlm. 230–231):

- 1) Untuk studi ilmu pengetahuan umum adalah tema yang sering dikembangkan secara apologetis, yaitu bahwa Islam mendorong untuk mengadakan studi mengenai bermacam-macam ilmu pengetahuan.
- 2) Untuk memelihara hubungan dengan masyarakat seluruhnya tetap terpelihara dengan baik, maka para pemimpin agama mendapat tambahan pengetahuan umum.
- 3) Berkenaan dengan persyaratan dalam masyarakat Indonesia modern bagi mereka yang ingin meraih karir dalam masyarakat harus memiliki ijazah yang mencantumkan derajat pendidikan umumnya.

c. Beberapa keberatan terhadap masuknya pelajaran umum

Salah satu penyebab mengapa sejumlah pesantren dan madrasah tidak dapat mengembangkan pendidikan umum adalah karena kenyataan bahwa pendidikan umum lebih mahal dari pada pendidikan agama (Steenbrink, 1991, hlm. 234). Satu kritik yang lebih mendasar terhadap pendidikan umum terlihat dari adanya keluhan bahwa madrasah modern dan IAIN di samping masih dapat memberikan pengetahuan agama yang lumayan, namun perhatiannya masih terpecah belah sehingga emosi keagamaan di sekolah-sekolah ini tidak dapat dikembangkan secara lebih baik.

Dalam konsep konvergensi, unsur yang paling lemah adalah penilaian rendah masyarakat Indonesia terhadap madrasah, begitupun

sebaliknya. Penghargaan agama yang kurang terhadap pendidikan Islam modern juga melemahkan konsep konvergensi ini. Dalam upaya antisipatif, Muhammadiyah memulai pendidikan baru yang dinamakan Pendidikan Ulama Tarjih. Pada awalnya kegiatan ini beranggotakan 25 orang dengan penekanan terhadap pendalaman bahasa arab, namun Karena studi ini terlalu berat setelah berjalan dua setengah tahun tinggal lima orang saja. Pada tahun kedua, diberikan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pendidikan. Setidaknya menjadi contoh dalam konvergensi pendidikan di Indonesia.

Sumbangan dalam Keilmuan Ilmu-Ilmu Keislaman

Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai hal, termasuk pula penelitian yang dilakukan oleh Karel A. Steenbrink ini. Penelitian Steenbrink mengenai perkembangan lembaga dan pendidikan di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia sendiri umumnya dan Islam sendiri khususnya. Menyikapi penelitian Steenbrink tersebut setidaknya memberikan pengajaran kepada umat Islam bahwa perkembangan lembaga pendidikan dan pendidikan Islam di Indonesia selalu mengalami pergerakan yang signifikan, terutama dalam rangka menghadapi perkembangan dunia modern. Dengan penelitian ini pula hendaknya menjadi acuan bagi umat Islam dan Indonesia dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan pendidikan Islam itu sendiri supaya dapat mengikuti perkembangan modern, baik itu dari segi kurikulum, integrasi keilmuan, maupun output dari pendidikan tersebut berupa umat Islam yang memiliki ilmu dan berakhlak mulia.

SIMPULAN

Berdasar pemaparan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Karel A. Steenbrink terhadap lembaga pendidikan dan pendidikan Islam di Indonesia disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia baik dari sisi lembaga, sarana dan prasarana mengalami kemajuan. Kemajuan ini dalam rangka menghadapi modernitas yang tidak dapat dielakkan. Perkembangan pendidikan Islam ini dalam rangka mendidik umat Islam Indonesia untuk dapat menggairahkan kembali ilmu pengetahuan. Tidak ada dikotomi antar ilmu. Perlunya sebuah gerakan konvergensi dan integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena keduanya penting dalam kehidupan. Akhirnya tampak bahwa umat Islam Indonesia telah sadar akan pendidikan dan mulai mengembangkannya ke arah lebih baik lagi.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhyar, M. Z., & Samsudin, U. (2023). PENDIDIKAN ISLAM DALAM KURUN MODERN. *AL Fikrah: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 3(01), 1-14.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (1992). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. LP3ES.
- Effendi, R. (2021). Studi Islam Indonesia: Pendidikan Islam Modern (Kajian Historis Perspektif Karel A Steenbrink). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 2(1), 36-48.
- Firdausia, N., Kurnia, N., Thomafy, L., Sari, A. L., Mu'arofah, U., Amanda, R. S., Juwaini, Y., Anggraini, L., Haidaroh, S., Sucanti, T., Dewi, L. C. P., Khadijah, E. U., & elSaif, U. (2020). *Kenangan Indah di Pesantren: Curahan Hati Santri yang Selalu Rindu untuk Kembali*. Penerbit Pustaka Rumah C1nta.
- Hanifah, N. (2010). *Penelitian Etnografi dan Penelitian Grounded Theory*. Akademi Bahasa Asing Borobudur.
- Kafrawi, H. (1978). *Pembaharuan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Sebagai Usaha Peningkatan Prestasi Kerja Dan Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Cemara Indah.
- Madjid, N. (2013). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Dian Rakyat.
- Miswanto, A. (2021). Transformasi Pendidikan Islam Di Indonesia: Menimbang Model Kajian Karel A. Steenbrink. *Suhuf*, 33(2), 125-151.
- Steenbrink, K. A. (1991). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. LP3ES.
- Ziemek, M. (1986). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

TENTANG PENULIS



Firman Robiansyah lahir di Bandung pada tanggal 10 September 1980 dari pasangan H. Kanda Sholehudin dan Hj. Rosinah. Masa kecil penulis dihabiskan di Kampung Saradan Leuwigajah Cimahi hingga tamat SD di MI Sadarmanah. Kemudian setelah tamat SD pada tahun 1993, penulis melanjutkan sekolah ke MTs dan Aliyah Darul Ma'arif Bandung. Selama enam tahun, di sekolah tersebut, penulis juga belajar hidup mandiri di sebuah pondok pesantren pimpinan KH. Sofyan Yahya, MA hingga pada tahun 1999.

Pada tahun 1999, penulis melanjutkan studi ke program S1 Pendidikan Bahasa Arab IKIP Bandung (sekarang UPI), dan terakhir pada tahun 2008 penulis melanjutkan studi di program S2 Pendidikan Umum/Nilai. Selama menempuh studinya, Penulis ikut aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan sebagai berikut; pada waktu SMU penulis pernah menjabat bandahara OSIS dan ketua ambalan putra pramuka. Ketika kuliah, penulis aktif sebagai anggota Keluarga Besar Mahasiswa Bahasa Arab (KEMABA), anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di ormawa tingkat jurusan. Selain organisasi kemahasiswaan, penulis juga aktif di organisasi kemasyarakatan seperti Ikatan Pemuda Masjid (IPMA) Salaful Bina sebagai anggota, Forum Silaturahmi Pemuda Masjid (FSPM) Kelurahan Leuwigajah sebagai anggota, dan Karang Taruna Kelurahan Leuwigajah sebagai ketua.

Mulai tanggal 1 Januari 2005, Penulis tercatat sebagai dosen PAI Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Matakuliah yang diampu adalah Pendidikan Agama Islam (PAI), Seminar Pendidikan Agama Islam (SPAI) dan Pembelajaran Al-Quran untuk Anak Usia Dini. Selain sebagai dosen, Penulis juga memperoleh amanah sebagai ketua Dewan semakmuran DKM Luqmanul Hakim UPI Kampus Serang.

Pada tanggal 18 Juli 2009, penulis mempersunting seorang gadis keturunan minang yang bernama Hj. Athia Tsafithri Awal, Lc., M.Ag. Saat ini, penulis beserta istri tinggal di Kota Serang beserta ketiga buah hatinya; Fathi Yahya Mubarak, Afaf Maryam Malak Ruhina dan Muhammad Fayyadh Ali Abdurrahman.

AL-QUR'AN BERJALAN: PENDIDIKAN ISLAM, PENGETAHUAN YANG TERWUJUD, DAN SEJARAH DI AFRIKA BARAT

Eri Murniasih

Universitas Serang Raya

eri.murniasih@unsera.ac.id

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt yang diturunkan lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Rangkaian pengajian yang dimulai di sebuah gua di Gunung Hira oleh Malaikat Jibril dengan membacakan Firman Tuhan kepada seorang pria yang telah dipilih untuk memikul beban kenabian. Adalah Muhammad bin Abdullah mendengar perintah membaca dan menaatinya. Dia mendengarkan dengan seksama kata-kata dan mengulanginya seperti yang didengar. Muhammad mengajarkan bacaan ini pertama kepada istrinya, Khadijah, kemudian kepada orang terdekat yang hatinya tersentuh oleh bacaan tersebut dan tunduk diri untuk mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kepada semua umat manusia di muka bumi ini.

Pada permulaan abad ke-7 itu telah diletakkan basis untuk kehidupan individual dan sosial kaum Muslimin dalam segala aspeknya. Bahkan, masyarakat Muslim mengawali eksistensinya dan memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwahnya. Al-Qur'an dalam pandangan Arkoun adalah kitab suci yang memiliki pengaruh amat luas dan mendalam terhadap jiwa manusia. Kitab ini telah digunakan kaum Muslimin untuk mengabsahkan perilaku, melandasi berbagai aspirasi, memelihara berbagai harapan, dan memperkuat identitas kolektif. Membacanya adalah bentuk kesalehan dan menjalankan ajarannya merupakan kewajiban setiap Muslim di muka bumi. (Arkoun, 1997, p. 9)

Sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam, al-Qur'an mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan seluruh ciptaan Allah Swt dan untuk senantiasa mengambil hikmahnya. Al-Qur'an memuat konstruksi pengetahuan mengenai tujuan hidup yang direfleksikan pada tujuan pendidikan dan pencapaiannya untuk diturunkan pada konsepsi tujuan pendidikan sehingga mampu diorientasikan pada pembentukan manusia dengan pengembangan berbagai dimensi

kehidupannya, pencapaian iman dan takwa, dan aktualisasi ibadah sebagai tugas hidup. Al-Quran juga sebagai sumber rujukan utama ajaran Islam dan menjadi pedoman bagi para pemeluknya di seluruh dunia dalam menjalani kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Membawa Al-Qur'an di dalam pikiran seseorang dan memanifestasikannya melalui perbuatan adalah saling berkaitan. Mereka yang menguasai, menghafal dan menjaga Al-Qur'an diharapkan dapat menginternalisasikan maknanya sampai ia menembus ke dalam diri mereka yang paling dalam, yang pada gilirannya mengubah tindakan eksternal mereka. Artinya belajar adalah sesuatu yang jauh lebih dari menghafal teks. Sebenarnya ini adalah latihan spiritual holistik yang membentuk siswa untuk berjalan sesuai dengan kebenaran Al-Qur'an.

Dalam konteks pendidikan, Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah swt untuk semua umatnya dimuka bumi dan menjadi salah satu sumber tujuan pendidikan. Maka pendidikan Islam yang tidak terlepas dari kajian mengenai Al-Qur'an. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap ayat Al-Qur'an menjadi penting untuk memahami kandungan pendidikan yang terkandung di dalamnya. Al-Quran telah memberikan dasar yang kuat untuk membentuk pengetahuan dan pandangan holistik tentang tujuan pendidikan dalam Islam, yang melibatkan pengembangan berbagai aspek kehidupan dan spiritualitas individu. Kuntowijoyo mengatakan, "Al-Qur'an membangun konstruksi pengetahuan dengan tujuan agar kita memiliki kebaikan dan terbentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai normatif al-Qur'an, baik pada level moral maupun sosial".(Kuntowijoyo, 1993, p. 115) Pendidikan Islam secara ideal bersumber atas ajaran Al-Qur'an dan sunnah yang tersirat maupun tersurat tetap menjadi rujukan untuk memaknai hakikat pendidikan yang berkembang. Muhammad Quthb mengungkapkan jika pendidikan ingin bernuansa teologis dan humanistik, hendaknya didasarkan pada sumber pokok ajaran Islam; Al-Qur'an dan sunnah.(Suryadi, 2022)

Spirit al-Qur'an yang telah diturunkan Allah swt sejak 14 abad lalu kepada Nabi Muhammad saw menjadi pedoman dan petunjuk hidup manusia di muka bumi ini memberikan nilai-nilai yang positif sebagai sumber inspirasi bagi para pembacanya untuk mendalami dan mentafakkuri tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain menjadi pedoman dan petunjuk al-Qur'an yang telah diturunkan Allah swt 14 abad lalu juga merupakan salah satu sumber pendidikan untuk semua umatnya dimuka bumi. Dengan nilai dan spirit Al Qur'an ini, umat Islam

melakukan berbagai aktivitasnya untuk membangun peradaban. Ajaran al-Qur'an yang disampaikan Nabi Muhammad saw kepada seluruh umat manusia mengalir bagaikan air memenuhi ruang dan waktu ke seantero muka bumi. Dakwah, ajakan dan ajarannya yang sarat dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan sosial, sekat-sekat budaya dan strata social mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dakwah dan ajarannya ini terus dilakukan sampai dengan saat ini hingga lebih dari 1/3 penduduk bumi termasuk didalamnya adalah umat Islam yang ada di benua Afrika khususnya di Afrika Barat.

Pada tulisan ini penulis membatasi pembahasan seputar pendidikan Islam di Afrika Barat tentang bagaimana spirit al-Quran dalam pendidikan Islam di Afrika Barat untuk mengetahui bagaimana metode masyarakat muslim di Afrika Barat dalam mempelajari al-Qur'an dan bagaimana integritas nilai dari pendidikan Al-Qur'an di Afrika Barat terwujud dalam jiwa dan raga diri seorang muslim.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Masuknya Islam Di Afrika Barat

Dakwah Islam memasuki Benua Afrika pada tahun ke-5 kenabian. Pada abad ke-6 H, Nabi SAW mengutus sahabatnya untuk menyampaikan surat dakwah kepada Muqauqis (penguasa Mesir). Ekspansi kekuasaan Islam ke Benua Afrika dimulai saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Melalui panglima perangnya, Amr ibn As, Mesir dibebaskan dari penjajahan bangsa Romawi, yang waktu itu dikuasai oleh Muqauqis. Penaklukan di wilayah ini melalui jalur barat menyusuri pantai Atlantik hingga Senegal dan jalur timur melewati negara bagian Sudan Barat hingga Hausaland, dan jalur timur di Tripoli dan Mesir hingga Bornu. Setelah itu, Islam menyebar ke Afrika Utara serta terjadi islamisasi dan arabisasi (abad 7-8 M). (Wicaksono, 2020)

Penyebaran Islam mencapai Afrika Barat dengan melintasi gurun sahara, terutama oleh kaum Murabithun yang pada abad ke-11 menaklukkan Maroko dan Ghana. Ada dua penyebab yang berkontribusi terhadap ekspansi Islam di Afrika Barat. Penaklukan Afrika Utara memberikan dorongan yang signifikan terhadap perdagangan trans-Sahara. Daya tarik emas menarik semakin banyak pedagang muslim Berber dan Arab dari Afrika Barat Laut hingga Sudan. (Mustaghfirin, 2019) Para pedagang Muslim Afrika Barat Laut menjadi agen penyebaran Islam di Afrika Barat dan Tengah. Penyebab kedua adalah invasi Afrika Barat Al-Murabitin, yaitu kelompok Muslim fanatik yang

muncul pada abad ke-11 disebuah pulau di Sungai Senegal. (Muhammad A Saleh, 2014)

Peradaban Islam tumbuh dan berkembang di Afrika Barat secara bertahap. Margari Hill, sejarawan dari Stanford University menyebutkan, ada tiga tahap yang dilalui Islam di sub-Sahara.

Tahap pertama, raja-raja Afrika menahan pengaruh Muslim dengan memisahkan komunitas Muslim. Di awal kehadirannya, ajaran Islam hanya dianut oleh komunitas tertentu yang terhubung dengan jalur perdagangan trans-Sahara. Pada abad ke-11 M, menurut Hill, geografer Andalusia bernama Al-Idrisi mencatat, di wilayah Ghana dan Tekur terdapat sejumlah orang Arab dan imigran dari Afrika utara. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan Islam di Afrika adalah keberadaan kerajaan non-Muslim. Menurut Hill, para saudagar dan ulama berperan besar dalam penyebaran agama Islam di kawasan Afrika Barat. Para pedagang Muslim yang terpelajar, banyak membantu kerajaan-kerajaan non-Muslim dalam bidang administrasi kerajaan tersebut. Mereka memfasilitasi perdagangan jarak jauh dengan membuat aturan kontrak, kredit, dan informasi jaringan,. Dari abad ke-8 hingga 13 M, hubungan antara Muslim dan penduduk Afrika Barat mulai meningkat. Sejak saat itu, negara Muslim mulai muncul dan berkembang di Sahel. Lalu raja-raja Afrika mulai mengizinkan Muslim untuk berintegrasi.

Pada tahap kedua, Setelah Islam berkembang pesat di sub-Sahara, penguasa Afrika mulai mengadopsi Islam. Meskipun, penduduk kerajaan memiliki kepercayaan dan budaya yang berbeda. Banyak penguasa yang kemudian mencampur Islam dengan budaya dan ajaran lokal. Kekaisaran Mali (1215-1450 M), yang wilayahnya mencapai Mali modern, Senegal, sebagian Mauritania, dan Guinea, terdiri atas berbagai agama dan kelompok budaya merupakan kerajaan yang mengadopsi Islam. Menurut Hill, kekaisaran Mali merupakan negara yang terdiri atas berbagai agama dan kelompok budaya. Kaum Muslim memiliki peranan yang penting di pengadilan sebagai pengacara dan penasihat. Sejatinya, pendiri Kerajaan Mali bernama Sunjiata Keita bukanlah seorang Muslim. Raja Mali pertama yang masuk Islam adalah Mansa Musa (1307-1332). Ia menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Pada 1324, Raja Mali sempat menunaikan haji ke Tanah Suci. Kabar perjalanan haji Raja Mansa Musa ke Makkah sempat tersiar hingga ke Eropa karena kekayaan dan dana yang dikeluarkan untuk perjalanan itu begitu besar. Menurut Hill, pengeluarannya selama perjalanan ke Makkah sempat mendevaluasi harga emas di Mesir selama beberapa tahun.

Pada tahap ketiga, yaitu tahap Reformasi gerakan jihad di Afrika Barat (abad ke-19). Para pemikir, ulama, dan Muslim terpelajar mulai menyadari pentingnya melakukan reformasi. Umat Muslim mulai mengubah praktik keagamaan yang sempat dicampurbaurkan penguasa Afrika dengan budaya dan kepercayaan lokal dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang sesuai syariah. Gerakan ini melahirkan kekhalifahan Sokoto di Tanah Hausa dan negara Umarian di Senegambia. (Hill, 2009)

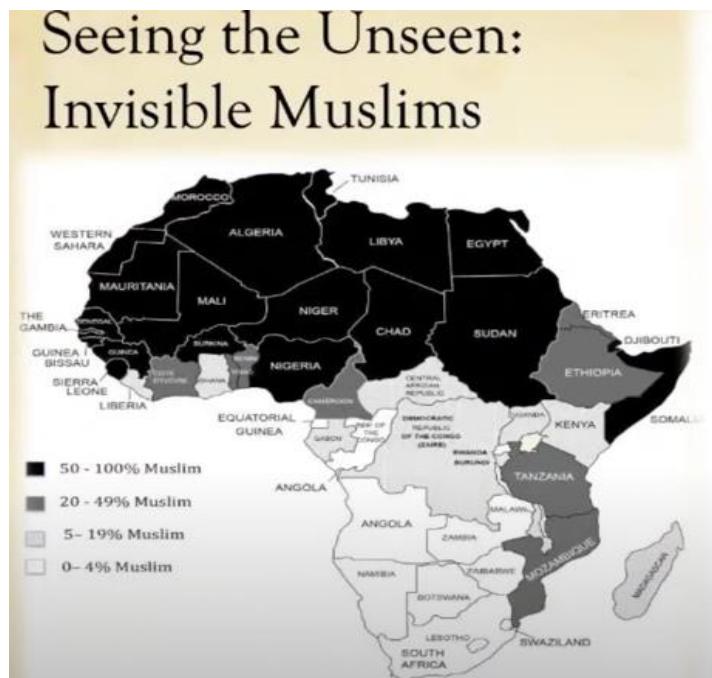
B. Geografi Dan Demografi Afrika Barat

Benua Afrika merupakan benua terluas ketiga setelah Asia dan Amerika dan unik karena tidak memiliki banyak pulau, kebanyakan tergabung dalam daratan. Sebagian besar berada di belahan bumi timur dan sedikit di belahan bumi barat. Benua Afrika terpotong oleh Garis Khatulistiwa sehingga mayoritas Afrika beriklim tropis dan memiliki curah hujan rendah. Benua Afrika memiliki gurun gersang dan tandus seperti gurun Sahara, Libia, Sahel, dan lembah Taoudenni. Di bagian selatan dan timur mempunyai pegunungan tertinggi yaitu Kilimanjaro dan memiliki sungai terpanjang di dunia yaitu sungai Nil (6.690 km). (Maarif, 2021)

Geoscheme PBB membagi benua ini menjadi lima wilayah, yakni Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Selatan. Wilayah dengan negara paling banyak ialah Afrika Timur, yakni sebanyak 18 negara (Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Komoro, Madagaskar, Mauritius, Mayotte, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Sudan Selatan, Somalia, Somaliland, Tanzania, Uganda, Zambia dan Zimbabwe), disusul Afrika Barat sebanyak 16 negara (Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone dan Togo), Afrika Tengah 9 negara (Angola, Chad, Gabon, Guinea Khatulistiwa, Kamerun, Kongo, Republik Afrika Tengah, Republik Demokratik Kongo, Sao Tome dan Principe), Afrika Utara terdiri dari 6 negara (Maroko, Algeria, Tunisia, Libya, Mesir dan Sudan), dan Afrika Selatan 5 negara (Afrika Selatan, Botswana, Lesotho, Namibia dan Eswatini). (*African History*, n.d.)

Di Afrika Selatan, pemeluk agama Kristen lebih banyak dibanding Islam dan Hindu. Di Afrika Tengah, jumlah terbanyak ialah penganut kepercayaan animisme. Di Afrika Timur, penganut Islam dan kepercayaan animisme hampir sama banyaknya. Agama lain yang dianut penduduk Afrika ialah Yahudi dan Katolik Roma. Afrika Utara dan Barat mayoritas beragama Islam. Ware menjelaskan menurut Pew Research Center, ada 27% dari 1,6 miliar umat

Islam di dunia tinggal di Afrika, dan lebih banyak tinggal di wilayah selatan gurun dibandingkan wilayah utara. Proporsi Muslim sub-Sahara diperkirakan meningkat dalam 20 tahun ke depan, “Afrika Hitam” seperti yang kadang disebut, memiliki lebih banyak umat Islam dibandingkan Pakistan atau Indonesia (negara yang saat ini memiliki populasi Muslim terbesar).(Ware, 2015, p. 17)



The Walking Qur'an: Islamic Education, Embodied Knowledge, and History in West Africa

C. Islam di Afrika Barat

Sehubungan dengan lamanya kehadiran Islam di wilayah Afrika Barat, pertumbuhan dan keragaman komunitas Muslim di wilayah tersebut, penelitian Barat terhadap Islam dan masyarakat Muslim di Afrika Sub-Sahara, hingga saat ini, masih sangat terbatas. Cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu menelusuri kelangkaan pengetahuan ini sejak zaman imperialisme Eropa dan akhir abad kesembilan belas. Saat ini imajinasi Eropa Barat, antara lain berdasarkan catatan dan laporan para penjelajah, misionaris, dan akademisi, memandang Afrika, khususnya Afrika Sub-Sahara, sebagai Benua Hitam yang dihuni oleh kaum primitif yang tidak memiliki sejarah dan hidup di luar peradaban. Ketika persepsi-persepsi ini menjadi bagian dari kebijakan kolonial Eropa dan keilmuan kolonial, persepsi-persepsi tersebut menciptakan warisan intelektual

dan budaya yang juga membentuk kembali sejarah, peta mental, dan pemahaman diri warga kolonial mereka. (Hirji, n.d.)

Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika Muhammad mendengar malaikat Jibril berbicara kepadanya dan mendengarkan dengan saksama untuk menghafal kata-kata berikut, Nabi menanggapi dengan cukup serius:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui” (Q 49:13).

Ayat ini berisi meditasi yang kuat tentang kesetaraan dan makna serta tujuan perbedaan tubuh manusia. Perbedaan disebabkan karena mengingat Tuhan, bukan karena perbedaan gender, kebangsaan, atau etnis. Dan jika kita mengingat Tuhan, kita bisa belajar banyak dari satu sama lain: keberagaman kita menjadi sumber kebijaksanaan. Ayat lain memperluas poin ini, secara khusus menyebutkan keragaman warna dalam keluarga manusia sebagai “tanda Tuhan”, sama seperti ayat-ayat Al-Qur’an sendiri yang merupakan tanda (ayat):

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَايَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan langit dan bumi, serta keanekaragaman lidah dan warna kulit kalian, dan sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berilmu.” (Q 30:22).

Tiga orang yang disebutkan dalam pepatah “meniru orang kulit hitam” semuanya adalah orang-orang terpelajar: Luqman yang bijaksana, Raja Najasyi dari Abyssinia, dan Bilal sang Muazzin. Kisah-kisah mereka memperkuat poin yang disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Sebuah kata singkat pada masing-masing kata membantu mengkontekstualisasikan makna yang dimaksudkan dari ucapan tersebut.

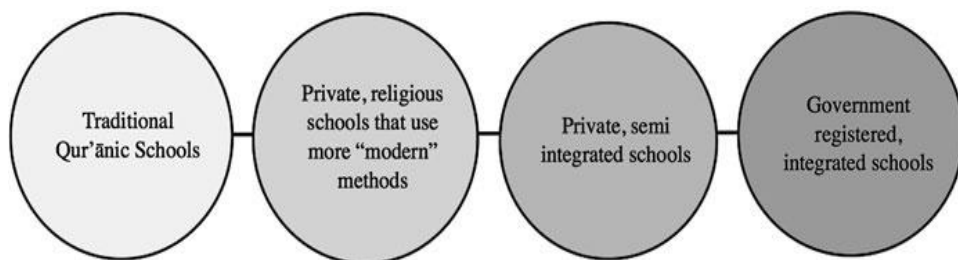
Salah satu surat di dalam al-Qur’an yang berisi tiga puluh ayat Namanya diambil dari seorang bijak Afrika pra-Islam yang direpresentasikan dalam Kitab

Suci sebagai teladan kesalehan dan guru doktrin kesalehan. tauhid (keesaan Tuhan yang radikal). Menariknya, surah ini membahas tentang pengetahuan tanpa akhir tentang Tuhan dan kesatuan umat manusia, yaitu Luqman yang bijaksana. Para penafsir selanjutnya berpendapat bahwa Luqman bukanlah seorang nabi melainkan seorang bijak, meskipun ia disebutkan secara menonjol dan membawa keberuntungan dalam Kitab. Mereka juga, mungkin bukan secara kebetulan, mengklaim bahwa Luqman adalah seorang budak, meskipun Al-Quran tidak memberikan pernyataan seperti itu.

Nabi Muhammad saw dibesarkan di Arab yang mengenal orang-orang Afrika lebih sebagai penakluk daripada sebagai budak, meskipun sebagian besar peneliti Arab di kemudian hari sepertinya sering melupakan hal ini. Adalah raja Najasyi seorang raja di Habasyah (Afrika) seorang Kristiani kulit hitam seorang raja yang tidak pernah menzalimi seorang pun yang ada di bawah kekuasaannya Nabi Muhammad SAW menyampaikan perkataan tersebut ketika memerintahkan para sahabat yang ditindak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk hijrah ke Habasyah. Kedatangan mereka pun disambut oleh Raja Habasyah yang dijuluki An-Najasyi. Raja ini memuliakan kaum Muslimin yang datang berhijrah ke negerinya. Kemudian Bilal seorang budak kulit hitam yang pertama kali menyuarakan dan mengumandangkan dengan suara merdunya panggilan azan untuk sholat.

D. Sekolah Islam Di Afrika Barat

Pendidikan Islam di Afrika Barat tidak lepas dari peran sekolah Islam, Boyle memaparkan ada empat jenis sekolah Islam utama yang ada di wilayah Afrika Barat. Perbedaan jenis sekolah ini muncul dari perbedaan mata pelajaran yang diajarkan, metode yang digunakan untuk mengajar, kualifikasi guru, otonomi dan pengawasan pemerintah, serta sumber pendanaan. Hal ini pada gilirannya dapat berbeda menurut negara dan kebijakan local.(Boyle, 2018)



*Islamic Education in West and Central Africa, Helen N. Boyle
 Handbook of Islamic Education, International Handbooks of Religion and Education 7*

1. Sekolah Al-Quran Tradisional

Pendidikan Al-Qur'an memiliki peran mendasar dalam membangun masyarakat muslim di Afrika Barat setidaknya selama lebih dari seribu tahun. Rudolph T.Ware III memaparkan dalam *The Walking Qur'an: Islamic Education, Embodied Knowledge, and History in West Africa* bahwa lembaga pendidikan yang berperan sebagai transmisi al-Qur'an sebagai jendela menuju cara mengetahui Islam dan perwujudannya dalam praktik kehidupan di Afrika Barat adalah sekolah Al-Qur'an. Di sekolah ini anak-anak menghafal dan mengaji Kitab Suci Islam serta belajar membaca dan menulis aksara Arab. Mereka juga diperkenalkan dengan ajaran dan praktik dasar agama. Sekolah ini berasal dari masa khalifah kedua Islam, Umar bin al-Khattab (634–644M), yang berjasa melembagakan akhir pekan dengan tradisional sekolah, yang dimulai pada hari Rabu setelah salat Dzuhur dan berakhir setelah salat Jumat. Sekolah al-Qur'an tidak memiliki kurikulum yang baku, seperti sistem pendidikan formal. Meski demikian, Muslim di sana sangat antusias untuk mengantarkan putra-putrinya belajar di sekolah Alquran.

Di saat anak-anak di belahan bumi lain sibuk belajar dengan kemudahan fasilitas alat tulis dari mulai mushfaf, buku tulis, pulpen hingga gadget dan internet, di Afrika Barat budaya manuskrip kuno masih bertahan hingga saat ini dalam mempelajari Al-Qur'an. Salah satu objek fisik yang paling penting yang membedakan sekolah Arab modern dari sekolah Qur'an adalah penggunaan papan kayu sebagai media utama untuk pembelajaran yang disebut dengan al-luwa atau alwah. Para siswa menggunakan tablet kayu atau *alwah* ini untuk berlatih kaligrafi Arab. Penulisan dilakukan dengan pena dengan menggunakan tinta. Metode ini dianggap cukup berhasil bagi anak-anak di Afrika.



Anak-anak Afrika dengan tablet kayu (alwah)

Dengan metode kuno ini Al-Quran dihafalkan dengan cara ditulis ulang setiap babnya. Sambil menulis, anak-anak akan menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka tidak hanya menghafalnya namun mereka menginternalisasi ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dengan menghapus pelajaran yang tertulis di papan mereka dengan air, proses pencucian dilakukan dengan penuh penghormatan, karena diyakini mengandung firman Allah lalu menelan cairan dari air cuci alwah tersebut, yang dipahami telah terisi dengan kekuatan rohani Al-Qur'an. Kadang-kadang ayat-ayat tertentu ditulis untuk membantu memperkuat kemampuan anak untuk mempelajari Kitab. Kadang ayat yang dipahami memiliki sifat penyembuhan ditulis lalu diberikan kepada anak-anak yang jatuh sakit. Dengan izin dari guru, para murid mengumpulkan air cuci dari alwah ini dalam botol kecil dan membawanya pulang untuk digunakan sebagai obat. Penggunaan air cuci dari alwah dengan cara ini telah lama dicatat sebagai sangat umum di Afrika Sub-Sahara. Praktek ini di Afrika Sub-Sahara, biasanya dijelaskan sebagai semacam "*Africanisasi*" Islam. (Ware, 2015, p. 57)

Dalam pendidikan Islam tradisional hubungan guru-murid adalah hal yang paling penting karena pengetahuan tidak dapat diraih seseorang hanya melalui buku tetapi tanpa seorang guru yang membimbing dan mengajarkannya. Maraknya mesin cetak di dunia Islam dan kemajuan metode pengajaran yang sangat berbeda dengan metode pembelajaran tradisional tidak dapat menggantikan posisi seorang guru. Pertemuan dan hubungan dalam belajar antara guru dengan murid ini sebagai menjaga mata rantai kesucian ilmu hingga ke Nabi Muhammad saw dan keberlanjutan sanad hingga ke rantai generasi selanjutnya. Maka seseorang diizinkan menyampaikan kembali ilmu yang telah didapat tidak hanya karena sudah mendapatkan ijazah sebagai tanda selesai dari proses pembelajaran. Namun seorang murid akan mendapatkan izin apabila sang guru telah melihat aktualisasi ilmu pengetahuan yang dicapainya dalam karakter dan perilaku murid karena ilmu pada sejatinya tidak dapat dipisahkan dari amal. Berbuat dan perilaku baik khususnya terhadap guru dalam bentuk khidmat adalah sebuah adab dalam belajar karena menerima pengetahuan yang sumbernya dari al-Quran dari seorang guru menghasilkan hutang moral yang tidak dapat dibayar sepenuhnya dengan materi. Maka berada dan bersama guru dalam waktu yang lama tidak hanya belajar tetapi juga melayani dari memijat anggota tubuh seorang guru yang lelah hingga membuat tehnya, dan tugas-tugas lain yang untuk meringankan bebannya dan menyerap karakteristiknya dan menanamkan kerendahan hati, diyakini adalah bentuk khidmah seorang murid kepada gurunya yang dapat mendatangkan

kebahagiaan dan keberkahan dan ini adalah bagian dari etika keilmuan untuk menanamkan rasa cinta dan hormat terhadap ilmu dan guru.(Ware, 2015, p. 53)

Pada akhir abad kedelapan belas metode pendidikan di seluruh dunia muslim telah banyak berubah, Terlepas dari keunikannya, menjadikan banyak Muslim dan non-Muslim kritis terhadap metode pembelajaran secara tradisional karena hanya berfokus pada bacaan dan hafalan, sehingga terbelakang secara pedagogi hingga akhirnya meninggalkan gaya belajar dan mengajar Al-Quran ini. Pendidikan sekuler dan jenis sekolah Islam baru menjadi menonjol. Banyak orang melihat sekolah-sekolah Al-Qur'an dalam kesenjangan epistemologis yang luas, dikritik karena bentuk pendidikannya yang "terbelakang" dan umumnya dianggap sebagai tempat di mana anak-anak hanya menirukan ayat-ayat Al-Qur'an tanpa banyak pemahaman, dan menyimpang dari etos pendidikan modern karena ayat-ayat Al-Quran diserap ke dalam tubuh melalui osmosis; pelayanan pribadi, hadiah, dan penghormatan dilimpahkan kepada guru. Menurut mereka sekolah model ini merupakan tempat yang paling buruk dan bahaya serta pelecehan anak.(Boyle, 2018)

2. Sekolah Agama Swasta Dengan Metode Modern

Bentuk sekolah kedua adalah Sekolah Keagamaan Swasta yang Menggunakan Metode Modern. Mereka tumbuh dari upaya pada pergantian abad kesembilan belas untuk "memodernisasi" sekolah Islam. Cendekiawan Islam merasa bahwa struktur pembelajaran perlu lebih mirip dengan apa yang digunakan di Barat. Sekolah-sekolah ini mempertahankan kurikulum yang sepenuhnya religius yang melampaui Al-Qur'a, mengelompokkan anak-anak ke dalam kelas, berdasarkan usia. Pedagogi Al-Qur'an yang lebih berpusat pada siswa. Sekolah-sekolah di negara-negara maju memberi jalan pada apa yang kita sebut sebagai metode yang lebih "Barat", di mana semua anak diharapkan untuk belajar dengan kecepatan yang sama dan mencapai prestasi yang sama sebagai sebuah kelompok. Sekolah-sekolah ini mempunyai otonomi yang besar dari peraturan dan campur tangan negara, meskipun dalam 20 tahun terakhir terdapat peningkatan keinginan negara-negara di Afrika Barat untuk mengatur semua sekolah swasta sampai tingkat tertentu. Para guru di sekolah-sekolah ini bisa saja merupakan campuran dari guru-guru yang dilatih secara tradisional dan para guru yang kembali dari Mesir atau negara-negara Teluk dengan pendidikan yang lebih "modern" dan mungkin beberapa pelatihan guru formal dan/atau ijazah atau sertifikat.(Boyle, 2018)

3. Sekolah Swasta Semi Terpadu

Sekolah ketiga yang semakin terus berkembang yaitu Sekolah Swasta Semi Terintegrasi. Semi-terintegrasi mengacu pada fakta bahwa sekolah ini memang menggabungkan mata pelajaran agama dan sekuler. Sekolah-sekolah ini mungkin mencakup, misalnya, pengajaran bahasa resmi, seperti Perancis atau Inggris, dan beberapa matematika dan sains serta topik-topik keagamaan dan Al-Qur'an, hafalan yang bagus. Mereka umumnya tidak mengikuti kurikulum pemerintah secara penuh; namun, hal ini merupakan respons terhadap pertumbuhan pasar sekolah, mengingat buruknya kualitas sekolah negeri di negara-negara tersebut. Konsumen di pasar ini menginginkan mata pelajaran Islam dan sekuler sehingga anak-anak menjadi Muslim yang baik dan warga negara yang produktif. Beberapa dari sekolah-sekolah ini bercita-cita menjadi sekolah yang terdaftar dan terintegrasi namun tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perbaikan atau perubahan yang diperlukan. Ada variasi yang luas dalam hal kurikulum, pedagogi, dan kualitas keseluruhan di sekolah-sekolah ini. (Boyle, 2018)

4. Sekolah Islam Negeri Terpadu

Sekolah Islam Negeri Terpadu mengacu pada kurikulum sekolah, yang terdiri dari agama “sekuler” dan mata pelajaran tradisional. Selain itu, jika sebuah sekolah “terdaftar”, biasanya sekolah tersebut setuju untuk mengikuti kurikulum yang disetujui pemerintah dan tunduk pada peraturan pemerintah. Artinya, di sebagian besar negara, sekolah-sekolah tersebut kini dianggap “negeri” dan sering kali dihitung dalam statistik pemerintah. Memang benar, di Ghana dan Mali, misalnya, sekolah-sekolah tersebut dimasukkan ke dalam subkategori sekolah “negeri”. Sekolah-sekolah tersebut diatur sampai tingkat tertentu, namun umumnya beroperasi dengan otonomi yang jauh lebih besar di tingkat sekolah dan ruang kelas dibandingkan sekolah negeri. Di Ghana, sekolah-sekolah ini menerima dana kapitasi penuh dari negara; di Mali dan Nigeria, dukungan negara kurang teratur dan mungkin datang dalam bentuk buku, mengikuti ujian nasional, mungkin gaji guru sekuler dan hal-hal seperti ini. Di Mali dan Nigeria, orang tua tetap membayar biaya karena bantuan pemerintah biasanya tidak cukup untuk menutupi seluruh biaya. (Biaya umumnya tidak mahal; di Mali, misalnya, direktur sekolah mengkategorikan 69% siswanya sebagai “miskin”. Sekolah terpadu yang terdaftar memberikan rasa aman kepada orang tua karena mengetahui bahwa anak-anak mereka dapat mengikuti ujian pelayanan dan dipromosikan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Biasanya perpindahan antara sekolah Islam terpadu yang terdaftar

dan sekolah negeri dapat dilakukan karena keduanya berada di bawah payung pemerintah. Demikian pula, sertifikat kelulusan dari sekolah Islam yang terdaftar diakui oleh lembaga-lembaga publik (tentunya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, tetapi juga universitas, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan). Ada yang berpendapat bahwa perubahan terbesar dalam pendidikan Islam di Afrika Barat telah terjadi atau sedang terjadi di sekolah-sekolah yang terdaftar dan terintegrasi, yang telah tunduk pada peraturan negara dan penggunaan kurikulum pemerintah sebagai imbalan atas dukungan negara. Di dunia yang semakin terglobalisasi, fokus mereka telah meluas dari pengembangan agama dan spiritual hingga mencakup hal-hal sekuler yang akan menghasilkan lapangan kerja. Sebelumnya, sekolah-sekolah ini beroperasi, sebagaimana disebutkan di atas, sebagai bagian dari jaringan sekolah yang longgar tanpa sistem administrasi yang menyeluruh dan otonomi yang besar dari campur tangan atau pengawasan pemerintah. (Boyle, 2018)

E. Al-Qur'an Berjalan

Konsep "Al-Qur'an yang Berjalan" merujuk pada ide bahwa pengetahuan Islam tidak hanya disampaikan melalui kata-kata tertulis dalam Al-Qur'an, tetapi juga melalui pengalaman fisik dan praktik ritual. Konsep ini terkait dengan gagasan bahwa Al-Qur'an bukan hanya teks yang harus dibaca dan dipahami, tetapi juga harus dihayati dan diinternalisasi melalui pengalaman langsung.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان خُلُقُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
القرآن . رواه مسلم

“Aisyah ra. berkata, "Akhlak Nabi shallahu alaihi wa sallam - adalah Al-Qur'an."

Aisha istri Nabi dan salah satu intelektual terpenting komunitas Muslim awal, diminta untuk menggambarkan karakter mendiang suaminya kepada seorang pria yang belum pernah mengenal Muhammad semasa hidupnya : “Sudahkah kamu membaca Al-Quran?” Pria itu menegaskan bahwa dia punya. “Kalau begitu kamu tahu karakternya,” jawabnya; “karakternya adalah Al-Qur'an.”

Hadits ini sering disebutkan dalam khotbah dan pidato di masyarakat Muslim kontemporer. Makna nyatanya adalah bahwa tingkah laku dan perilaku Nabi sesuai dengan wahyu yang telah dipilih untuk ditanggungnya. Seringkali

diucapkan dalam konteks akhlak, hadist ini tampaknya dimaksudkan untuk memerintahkan para pendengarnya agar mempelajari Al-Quran dan meneladani contoh normatif Nabi (sunah). Namun lebih dari itu, hadist ini dapat dipahami sebagai pernyataan ontologis tentang Nabi sendiri. Dalam bacaan ini, implikasinya bukanlah bahwa Nabi hanyalah sekedar wadah wahyu atau sekedar mencerminkan karakternya, melainkan bahwa Firman Tuhan telah memenuhi batinnya hingga pada titik di mana ia secara fisik mewujudkan Firman tersebut.

Seorang penghafal Al-Qur'an yang biasa disebut hafiz adalah wali, pelindung, dan penjaga dari firman Tuhan yang membawa Kitab atau Al-Quran di dalam diri. Kata lain yang digunakan untuk menyebut membawa Al-Qur'an dalam teks-teks klasik. kata *hafidz* adalah *hامل* (membawa), mereka yang menginternalisasikan Al-Qur'an membawa dan menjaga wahyu di dalam diri mereka.

Tujuan dasar dibalik pendidikan al-Qur'an adalah menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Manusia dipersiapkan, didisiplinkan, dibentuk, dan dilatih untuk menjadi wadah yang tepat bagi Firman Tuhan yang nantinya mempunyai tugas menyebarkan ilmu pengetahuan Islam yang terdapat di dalam gambaran Al-Qur'an. Pengetahuan dalam Islam tidak tinggal dalam teks; ia hidup pada manusia. Mewujudkan ilmu Islam berarti mengaktualisasikannya, mewujudkannya melalui perbuatan. Teks-teks klasik biasanya menekankan pada ketidakterpisahan pengetahuan dan Amal (perbuatan, latihan, tindakan). Pengetahuan perlu diwujudkan dalam bentuk konkrit di dunia agar dapat bernilai.

Dalam konteks pendidikan Islam di Afrika Barat, konsep "Al-Qur'an yang Berjalan" mengacu pada pendidikan Al-Qur'an di Afrika Barat jauh lebih kompleks daripada sekedar menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Selain menghafal, siswa juga belajar tentang tafsir, Al-Qur'an, sejarah Islam dan praktek-praktek keagamaan lainnya di mana pengetahuan Al-Qur'an diinternalisasi dan diaktualisasikan melalui gerakan tubuh dan pengalaman spiritual. Pengetahuan yang terintegrasi dalam tubuh manusia itu diciptakan bukan dilahirkan, dibawa ke dunia melalui praktik nyata yang diwujudkan secara jasmaniah oleh penyampai ilmu. Tujuan sekolah Al-Qur'an bukan hanya untuk mengajarkan Kitab tetapi juga untuk mengisi anak-anak dengan Firman Tuhan, sehingga memungkinkan mereka untuk menjadikan Nabi sebagai tauladan. (Ware, 2015, p. 165)

SIMPULAN

Masyarakat muslim Afrika telah membuat dan terus memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembelajaran dan budaya Islam. Pendidikan Islam yang memiliki tujuan utama untuk membentuk manusia sebagai wadah yang sesuai untuk Firman Allah juga melibatkan tidak hanya pikiran tetapi juga tubuh, dimana pengetahuan tidak hanya disampaikan melalui teks atau buku, tetapi juga melalui tubuh manusia seperti dalam doa ritual. Mereka bahkan melangkah lebih jauh untuk mengklaim bahwa Muslim di Afrika Barat telah memainkan peran penting dalam mempertahankan praktek lama dari transmisi pengetahuan yang disatukan yang telah dihentikan atau dilupakan di tempat lain di dunia Islam. Sekolah Al-Quran dipandang sebagai indeks kesehatan sosial dan spiritual komunitas Muslim Afrika Barat. Relevansi yang kuat dari cara-cara klasik dalam mempelajari dan mengajarkan Islam di sebagian besar Afrika dan pengabaian relatif (atau tidak terlihatnya) pendidikan semacam itu di sebagian besar dunia Arab menunjukkan hal yang nyata. Al-Qur'an disampaikan dari generasi ke generasi melalui memorisasi dan pengulangan. Al-Qur'an dianggap sebagai pengetahuan yang diwujudkan dan diwakili oleh tubuh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- African History*. (n.d.). Word Atlas.
<https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/af.htm>
- Arkoun, M. (1997). *Berbagai pembacaan Quran* (29th ed.). INIS.
- Boyle, H. N. (2018). Islamic Education in West and Central Africa. In *Handbook-of-Eslamic-Education* (pp. 637–650).
https://doi.org/10.1007/978-3-319-64683-1_36
- Hill, M. (2009). The Spread of Islam in West Africa : Containment , Mixing , and Reform from the Eight to the Twentieth Century. *Spice Digest, Spring*.
- Hirji, Z. A. (Zulfikar A. (n.d.). *Approaches to the Qur'an in Sub-Saharan Africa*.
- Kuntowijoyo. (1993). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Mizan.
- Maarif, S. D. (2021). *Pembagian Kawasan Benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia*. Tirto.Id. <https://tirto.id/pembagian-kawasan-benua-amerika-eropa-afrika-asia-australia-giA5>
- Muhammad A Saleh, Q. A. I. (2014). *Buku Pintar Sejarah Islam*. (1st ed.). Zaman.
- Mustaghfirin, A. (2019). Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban*, 14(2), 129–147.
<https://www.neliti.com/id/publications/332284/islamisasi-di-afrika->

sub-sahara

- Suryadi, R. A. (2022). Al-Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam. *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(2), 93–104.
- Ware, R. T. (2015). The walking Qur'an: Islamic education, embodied knowledge, and history in West Africa. In *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East* (Vol. 35, Issue 3). <https://doi.org/10.1215/1089201X-3426469>
- Wicaksono, H. (2020). Sejarah dan Penyebaran Islam di Asia dan Afrika. *Jurnal Rihlah*, 8(1), 46–65.

TENTANG PENULIS



Eri Murniasih, lahir di Jakarta pada hari Ahad, 08 Oktober 1978, putri ke-4 dari 6 bersaudara dari pasangan betawi H. Mursalih Mugheni dan Hj. Raisah Zaini. Mengawali pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Islam Daruttahzib Cipete Utara Jakarta Selatan pada tahun 1984 hingga 1988 dikarenakan jarak tempuh yang jauh akhirnya pindah ke sekolah yang dekat di SDN Cipete Selatan 03 pagi Jakarta Selatan dan menamatkan jenjang Sekolah Dasar pada 1990. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah (Madrasah Tsanawiyah) hingga atas (Madrasah Aliyah) di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan dan menamatkan pendidikannya di Pondok tersebut pada tahun 1996.

Setelah berhasil melewati test ujian penyaringan di Kementerian Agama pada tahun 1996 berhasil mendapatkan program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Al-Azhar – Cairo Mesir dan memilih jurusan Syariah Islamiyah. Setelah memperoleh hasil belajar yang baik di Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun pertama maka pada tahun ke-2 pendidikan berhasil mendapatkan beasiswa kedua dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia). Hingga menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar Licence pada tahun 2000.

Setelah di tanah air pada April 2001 menikah dengan Mulya R. Rachmatoallah seorang putra Banten. Kemudian mengawali pengabdian dengan mengajar Pendidikan Agama Islam di SMKS 17 Kota Serang Banten pada Juli 2001 hingga sekarang. Dalam pengabdian selain mengajar juga pernah menjabat sebagai waka kesiswaan (2006-2013), waka kurikulum dan kepala sekolah (2014-2018). Setelah lulus tes penerimaan pegawai negeri sipil Kementerian Agama pada 2004 diangkat menjadi pegawai negeri sipil Kementerian Agama pada Januari 2005. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengajar telah mengikuti program sertifikasi pada tahun 2009. Dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten program studi Pendidikan Agama Islam. Dengan yudisium terbaik berhasil meraih gelar Magister Pendidikan pada tahun 2022. Saat ini selain di SMKS 17 Kota Serang juga aktif mengajar di Universitas Serang Raya.

PESANTREN INDONESIA: MERENTANG TRADISI KE ARAH MASA DEPAN YANG BERKILAU

Saepul Bahri

Universitas Mathla'ul Anwar Banten

muruyipisan@gmail.com

Ahmad Munji

Universitas Al-khairiyah Cilegon

ahmadmunji86@gmail.com

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berakar kuat pada budaya dan sejarah Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren telah menjadi salah satu pilar kebudayaan dan pendidikan di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. (Hamid: 2017: 57) Dalam perannya sebagai pusat pendidikan Islam, pesantren tidak hanya menyampaikan ajaran Islam kepada santrinya tetapi juga mengintegrasikan unsur budaya lokal ke dalam proses pembelajaran. Hal ini menciptakan suasana unik di masing-masing pesantren yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Selain berperan sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berperan penting dalam melestarikan tradisi lokal. Disanalah tradisi keagamaan, seni, musik, dan bahasa daerah dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda. Pesantren berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kebudayaan Indonesia dan menjamin kelestarian warisan budaya dan agama dalam masyarakat modern.

Pesantren biasanya berlokasi di pedesaan atau terpencil, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Mereka seringkali menjadi pusat kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam di komunitas tersebut. Pesantren dijalankan oleh seorang direktur pesantren yang dihormati, yang sering disebut sebagai "Kyai". Peran Kyai sangat penting dalam menjalankan pesantren, memberikan bimbingan keagamaan dan mengawasi kegiatan pendidikan. Para santri di pesantren disebut "Santri" dan tinggal di pesantren selama jangka waktu tertentu dimana mereka belajar tentang Islam, budaya dan nilai-nilai moral. Tradisi pesantren seringkali kuat dalam pendekatan pengajaran yang berfokus pada pembacaan, pemahaman, dan penghayatan kitab suci Islam, yaitu Al-Quran, serta hadits-hadits yang berkaitan dengan ajaran agama.

Pesantren biasanya berlokasi di pedesaan atau terpencil, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Mereka seringkali menjadi pusat kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam di komunitas tersebut. Pesantren dijalankan oleh seorang direktur pesantren yang dihormati, yang sering disebut sebagai “Kyai”. Peran Kyai sangat penting dalam menjalankan pesantren, memberikan bimbingan keagamaan dan mengawasi kegiatan pendidikan. Para santri di pesantren disebut “Santri” dan tinggal di pesantren selama jangka waktu tertentu dimana mereka belajar tentang Islam, budaya dan nilai-nilai moral. Tradisi pesantren seringkali kuat dalam pendekatan pengajaran yang berfokus pada pembacaan, pemahaman, dan penghayatan kitab suci Islam, yaitu Al-Quran, serta hadits-hadits yang berkaitan dengan ajaran agama. (Asdiqoh: 2019: 16)

Pesantren tidak hanya menjadi wadah untuk mendalami agama dan budaya, namun juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai mendalam kepada santri seperti kedisiplinan, kesederhanaan dan ketaatan pada aturan. Santri di pesantren menjalani pola hidup sederhana dan tertib. Mereka menjalankan rutinitas sehari-hari yang meliputi kegiatan seperti salat berjamaah, pendidikan agama dan kerja keras untuk mempertahankan pondok pesantren dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pesantren tidak hanya sekedar tempat memperoleh ilmu agama, namun juga berperan sebagai pusat pengembangan karakter dan akhlak santri. Disini, Santri diajarkan untuk menghargai nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan integritas. Kehidupan bermasyarakat di pesantren juga mengedepankan rasa saling menghormati antar sesama santri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat secara keseluruhan. (Fahham: 2020: 106)

Pesantren mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Beberapa pesantren telah mengintegrasikan pendidikan umum seperti matematika, sains, dan bahasa ke dalam kurikulumnya dengan tetap mempertahankan penekanan pada pendidikan agama. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan Santri dengan pemahaman yang lebih luas dan keterampilan yang lebih baik untuk berkontribusi pada masyarakat modern. Pondok pesantren telah mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Sebanyak pesantren telah aktif mengintegrasikan pendidikan umum seperti matematika, sains, bahasa, dan ilmu komputer ke dalam kurikulumnya.

Namun, mereka tetap fokus pada pendidikan agama sebagai inti pendidikan mereka. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk memberikan Santri pemahaman yang lebih luas dan kemampuan yang lebih baik untuk beradaptasi dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Dengan mengintegrasikan pendidikan umum, pesantren mengharapkan santrinya tidak hanya kompeten dalam aspek keagamaan, namun juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan kontribusi positif di berbagai bidang masyarakat. Hal ini membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan tradisional dan kebutuhan dunia modern, memungkinkan Santri menjadi anggota masyarakat yang kompetitif dan berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia.

Terdapat banyak penelitian sebelumnya mengenai pesantren, namun peneliti menyaringnya untuk fokus pada peran pesantren. Helmi Aziz “Kepemimpinan Kyai dalam Mempertahankan Tradisi Pondok Pesantren (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Khalafi Al-Mu’awanah Kabupaten Bandung Barat) dalam Tadib Jurnal Pendidikan Islam Jilid V November 2016” menjelaskan bahwa Al-Mu’awanah Pondok Pesantren Kab. Bandung Barat tetap tangguh terhadap berbagai nilai global dan mampu menjunjung tinggi prinsip nilai lokal karena para Kyai berpegang teguh pada prinsip al-muhafazhathu 'alaal-qodimi al-ṣalīh wal akhdu bi al-jadid al - tunggu. aslah. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, maka pesantren tidak akan alergi terhadap perubahan dan perkembangan selama tetap dalam kerangka ajaran Islam. (Aziz: 2016: 18) Amir Fadhilah “Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai di Pondok Pesantren Jawa di Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol.8, Nomor 1, Juni 2011 menjelaskan bahwa Kyai mempunyai jaringan sosial yang terhubung secara internal (dengan pesantren) dan eksternal (dengan dunia di luar pesantren), antara lain jaringan genealogis, jaringan ideologi, jaringan intelektual, dan jaringan sosial. jaringan teologis. Jaringan. dan jaringan spiritual. (Fadhilah: 2011: 100)

Gatot Krisdiyanto “Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Modernitas,” dalam Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol.15, no. Pada 1 Juli 2019, ia menjelaskan modernitas di pesantren dapat dipahami dari sistem manajemen pendidikannya. Pengelolaan kelembagaan pesantren selalu berkaitan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan. Pesantren mempengaruhi pemahaman agama masyarakat. Pesantren dapat membentuk masyarakat sekitar pesantren yang sangat dinamis seiring dengan kemajuan modernitas. (Krisdiyanto: 2019: 20)

Abdul Tolib “Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern dalam Jurnal Risaalah, Vol. 1, No. 1, Desember 2015 menjelaskan pesantren bukan saja sebagai tempat belajar melainkan merupakan proses hidup itu sendiri, pembentukan watak dan pengembangan sumber daya. Secara garis besar, ciri

khas pesantren modern adalah memprioritaskan pendidikan pada sistem sekolah formal dan penekanan bahasa Arab modern dan Inggris. (Tolib:2016:60) Mohammad Masrur “Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren dalam Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017 menjelaskan Kyai memiliki karakter yang menjadi contoh bagi santri yang merupakan anak bangsa yang mempunyai kewajiban untuk membangun negeri ini. Sosok Kyai sederhana yang ikhlas dalam mendidik dan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai Kyai tercermin dari sifat guru dalam perspektif Islam. (Masrur: 2017:280)

Umi Musaropah “Karisma Kyai Dalam Organisasi Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional” dalam *Harian Ulumuddin* Volume 8 Nomor 2 Desember 2018 menjelaskan bahwa kharisma yang dimiliki semakin diterjemahkan ke dalam sifat dan sikap baru yang bisa menghilangkan kerugian yang ada. Prinsip dasar yang biasa digunakan adalah melestarikan hal-hal baik yang telah ada sambil mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik. (Musaropah: 2018: 154) Siti Muhibah “Keefektifan Kepemimpinan Kyai Pada Pondok Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren Salafiyah di Provinsi Banten) dalam *Alqalam* Vol. 33, No. 2 (Juli-Desember 2016) menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan Pondok Pesantren Kyai di Provinsi Banten adalah karismatik-otoriter. Pengaruh kepemimpinan dari Kyai Pondok Pesantren Provinsi Banten tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja dan aktivitas santri karena santri menganggap mengikuti petunjuk Kyai sebagai Kyai Ta’dzim. Namun model kepemimpinan Kyai yang masih diwariskan terkadang menjadi penyebab kemunduran perkembangan pesantren.

Safradji “Berbagai Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Masa Depan di Tafhim Al-’Ilmi, Februari 2020” menjelaskan bahwa secara eksistensial, pesantren terbukti mampu bertahan di tengah deras arus modernisasi dengan berbagai tantangan dan dampak negatifnya. (Safradji: 2020: 261) Farra Nadia “Kepemimpinan Kyai Visioner dalam Konteks Hukum Pesantren,” *Sraddha: Jurnal Pendidikan, Masyarakat dan Agama*, Vol.1, no. 1 Juni 2023 menjelaskan bahwa kepemimpinan visioner Kyai di Pondok Pesantren merupakan komponen penting dalam meningkatkan pembelajaran dan efektivitas organisasi. (Nadia: 2023: 15) Mohammad Syarifuddin Al Amin “Peran Ustadz Pondok Pesantren Dalam Menumbuhkan Minat Santri Terhadap Kitab Kuning Di Pondok Pesantren” Kyai Syarifuddin *Risalatuna: Jurnal Kajian Pesantren* Volume 1 Nomor 2 Juli 2021 menjelaskan bahwa Ustadz Ustadz Pondok Pesantren merupakan sosok yang sangat memegang

peranan penting yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, karena semakin tinggi kualifikasi dan keterampilan ustadz yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak dan semakin dewasa ustadz tersebut maka semakin tinggi pula kualitas pembelajarannya.(Syarifuddin: 2021:119)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Tradisi Ahlu Sunnah Wal Jamaah untuk Masa Depan yang Gemilang

Tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang sering disebut dengan Ahlus Sunnah merupakan salah satu aliran utama Islam yang sangat dihormati dan dianut oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Ahlus Sunnah menekankan mengamalkan ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadis, serta menghormati dan menganggap para sahabat Nabi sebagai teladan dalam beragama. Tradisi ini mencakup berbagai aspek kehidupan, keyakinan, dan praktik keagamaan Islam yang mendalam. Dalam tradisi Ahlus Sunnah, pemahaman aqidah (iman) Islam yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits sangat dijunjung tinggi. Mereka juga berterima kasih dan menghormati para Sahabat Nabi sebagai orang yang mengemban dakwah Islam langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut, Ahlus Sunnah menekankan kerelaan umat (ijma') dan penggunaan analogi (qiyas) untuk menjelaskan hukum Islam yang tidak diatur secara tegas dalam sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis.(Syuhud: 2022: 38)

Dengan prinsip-prinsip tersebut maka Ahlus Sunnah Wal Jamaah menjadi arus utama Islam, yang keimanannya berlandaskan pada Aqidah (iman) fundamental yang menjadi landasan keimanan umat Islam. Mereka percaya akan keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta dan sumber segala kebijaksanaan dan keadilan. Selain itu, Ahlus Sunnah meyakini adanya malaikat, makhluk gaib yang bertanggung jawab menjalankan perintah Tuhan dan membimbing umat manusia. Kepercayaan terhadap kitab suci seperti Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab suci terdahulu seperti Taurat dan Injil juga menjadi bagian tak terpisahkan dari keimanan mereka. Mereka mengenali utusan Tuhan sebagai utusan yang diutus untuk membimbing manusia dan menyampaikan pesan ilahi. Ahlus Sunnah juga meyakini hari kiamat sebagai masa dimana semua manusia akan hidup kembali dan akan diadili berdasarkan perbuatannya.(Yasid: 2022: 130)

Ahlu Sunnah Wal Jamaah meletakkan landasan penting bagi amalan keagamaan mereka dengan mengedepankan perbuatan, perkataan dan ridha

Nabi Muhammad SAW sebagaimana terdokumentasi dalam hadis. Mereka meyakini bahwa Sunnah Nabi merupakan sumber utama pemahaman dan penerapan ajaran Islam secara benar dan utuh. Oleh karena itu, pengkajian dan pemahaman mendalam terhadap hadis merupakan bagian integral dari pendidikan dan kehidupan beragama dalam tradisi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah menganggap Sunnah Nabi sebagai pedoman akhlak, etika, dan tata cara ibadah yang harus diikuti oleh umat Islam. Mereka memahami bahwa hadis-hadis tersebut memberikan wawasan yang lebih detail tentang penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan Sunnah, Ahlus Sunnah berupaya mencerminkan nilai-nilai ketakwaan, integritas dan cinta kasih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan menjunjung dan mengamalkan Sunnah, maka tradisi Ahlus Sunnah berperan penting dalam menjaga keaslian dan kelangsungan ajaran Islam serta menjamin umat Islam dapat hidup sesuai dengan ajaran agamanya. (Iyubenu: 2021: 189)

Pentingnya keyakinan terhadap akidah Ahlus Sunnah ini tidak hanya memperkuat landasan spiritual umat Islam, tetapi juga memberikan kerangka etika dan moral yang kokoh dalam menata kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati keyakinan tersebut, umat Islam aliran Ahlus Sunnah diharapkan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam serta menerapkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan ketakwaan dalam berhubungan dengan Allah SWT dan sesama manusia. Dalam tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Ahlus Sunnah) tahun, para sahabat Nabi Muhammad SAW menempati tempat yang sangat istimewa. Ahlus Sunnah menghargai dan menghormati para Sahabat sebagai orang yang hidup dan berinteraksi langsung dengan Nabi Muhammad SAW pada masa kenabian. Mereka percaya bahwa para Sahabat adalah teladan sejati dalam mengamalkan Islam karena mereka mempunyai kesempatan unik untuk secara langsung memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Nabi. Menurut Ahlus Sunnah, para sahabat dianggap sebagai contoh sempurna perwujudan nilai-nilai Islam, baik dalam ibadah, akhlak, maupun praktik sosial. Oleh karena itu, ilmu dan pengalaman para sahabat menjadi sumber otoritatif untuk memahami agama Islam dan menetapkan norma-norma agama.

Menghormati teman sejawat juga berperan penting dalam menjaga persatuan umat Islam. Ahlus Sunnah mencegah perselisihan dan konflik internal dalam Islam dengan tidak memperbolehkan kritik atau perpecahan terhadap para sahabat. Menurutnya, para sahabat merupakan pilar terpenting dalam penyebaran Islam dan diterimanya ajaran Nabi. Oleh karena itu, penting

untuk memahami peran dan kontribusi mereka untuk menjaga persatuan di masyarakat. Dengan menghormati para Sahabat Nabi, Ahlus Sunnah berupaya melestarikan warisan Islam yang otentik dan mengajarkan mereka rasa hormat sebagai bagian integral dari identitas keagamaan mereka.

Dalam tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Ahlus Sunnah), prinsip kesepakatan umat Islam yang dikenal dengan istilah “ijma” memegang peranan penting sebagai salah satu sumber hukum Islam. Ijma' mengacu pada kesepakatan atau konsensus para ulama dan umat Islam dalam masyarakat Islam mengenai suatu masalah atau hukum tertentu yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an atau Hadits. Ahlus Sunnah menganggap ijma' sebagai sumber otoritatif untuk menetapkan hukum dan peraturan Islam. Prinsip Ijma' digunakan dalam situasi di mana tidak ada panduan eksplisit tentang cara menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam sumber utama Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini para ulama dan umat Islam secara bersama-sama menyepakati suatu penafsiran atau keputusan tertentu, dan hal ini dianggap sebagai sumber hukum yang sah. Namun perlu diingat bahwa ijma' harus didukung oleh bukti yang kuat dan konsensus yang jelas dalam masyarakat Islam. Prinsip ini membantu menjaga kesatuan dan kohesi dalam pemahaman hukum Islam dan memberikan kerangka berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam kehidupan umat Islam. (Irawan: 2018: 462)

Dalam tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Ahlus Sunnah), qiyas merupakan salah satu metode hukum Islam yang penting dan digunakan untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan hukum yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an atau hadis. Qiyas adalah proses analisis komparatif terhadap situasi atau permasalahan yang tidak ada pedoman langsung dalam sumber utama Islam dan situasi yang diatur dalam Al-Qur'an atau hadis. Prinsip dasar Qiyas adalah ketika terdapat kesamaan substansial antara dua situasi, maka hukum yang berlaku pada situasi yang diatur dapat diterapkan secara analogis pada situasi yang tidak diatur. Saat melakukan qiyas, para ulama menggunakan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis untuk mengevaluasi persamaan atau kesesuaian antara dua situasi. Tujuannya adalah untuk mengupayakan keadilan dan konsistensi dalam penerapan hukum Islam. Qiyas merupakan salah satu alat yang dirancang untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, terutama dalam situasi di mana tidak ada referensi langsung dari sumber agama. Meskipun qiyas digunakan dengan hati-hati dan sesuai

dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, qiyas telah menjadi alat yang berharga dalam pengembangan hukum Islam selama berabad-abad.

Tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Ahlus Sunnah), perhatian terhadap persatuan dan kesatuan dalam lingkungan umat Islam dianggap sebagai prinsip yang sangat penting. Ahlus Sunnah memahami bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuannya sebagai umat. Mereka meyakini bahwa menjaga persatuan adalah kunci tercapainya tujuan bersama dalam mengamalkan agama Islam dan memajukan nilai-nilai Islam di masyarakat. Ahlus Sunnah memandang masyarakat sebagai sumber kekuatan yang besar dalam mengamalkan agama. Melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti ibadah, pengajian, dan kegiatan sosial, mereka menciptakan solidaritas dan saling mendukung antar saudara umat Islam. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik sehari-hari dan menyebarkan pesan keagamaan dengan lebih efektif. Selain itu, persatuan dalam komunitas Muslim juga merupakan benteng melawan berbagai ancaman dan tantangan yang mungkin dihadapi umat Islam. (Wijaya: 2020: 230)

Ahlus Sunnah atau disebut juga Sunni sangat menjunjung tinggi dan menghormati ulama dalam tradisi Islam. Ulama adalah ulama yang mempelajari ajaran Islam secara mendalam dan dianggap sebagai penjaga dan penyampai ilmu agama. Para ulama ini adalah sumber otoritatif untuk menjelaskan hukum Islam, mengeluarkan fatwa, dan membimbing umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kehadiran ulama memberikan kontrol yang kuat bagi umat Islam terhadap pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama serta memberikan wadah konsultasi untuk mengatasi berbagai permasalahan agama dan moral. Ahlus Sunnah juga meyakini bahwa penghormatan terhadap ulama merupakan bagian penting dari keimanan mereka. Rasa syukur tersebut tidak hanya tercermin dalam perkataan namun juga dalam tindakan nyata, seperti mendukung kegiatan ilmiah dan pendidikan agama, serta pemberian hadiah dan pengakuan kepada akademisi yang berupaya menyebarkan ilmu agama. Dengan demikian, Ahlus Sunnah menekankan pentingnya ulama dalam menjaga keutuhan dan kesucian ajaran Islam serta mengembangkan pemahaman agama yang mendalam pada masyarakat Islam.

Memperkaya Wawasan dengan Penguatan Kurikulum dan Metode Pengajaran Tradisional Pesantren

Kurikulum tradisional pesantren Indonesia berfokus terutama pada pendidikan agama Islam. Di pesantren, santri diajarkan berbagai aspek

fundamental Islam, termasuk kajian mendalam terhadap Al-Quran sebagai sumber utama ajaran agama. Selain itu, mereka mempelajari hadis Nabi Muhammad, yang memberikan panduan tambahan dalam memahami dan mengamalkan Islam. Fiqh, hukum Islam, juga merupakan bagian penting dari kurikulum untuk memahami bagaimana menjalani hidup sesuai dengan prinsip agama. Aqidah atau keyakinan Islam dan ilmu tafsir yang membantu memahami makna Al-Quran juga ditekankan dalam pendidikan Islam tradisional di pesantren. Oleh karena itu, pesantren membekali santri dengan landasan agama yang kuat dan meningkatkan pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam. Di lingkungan pesantren, pendidikan agama dilaksanakan dengan metode pengajaran lisan dan interaktif, dengan guru yang dihormati memberikan penjelasan dan diskusi kepada santri tentang ajaran Islam. (Laila: 2023: 155)

Salah satu elemen penting dari kurikulum Pesantren tradisional adalah menghafal Al-Quran, yang dianggap sebagai ibadah yang mulia dan tugas suci. Santri atau pesantren bertugas menghafalkan teks suci Al-Quran dalam bahasa Arab. Proses hafalan ini dilakukan dengan metode repetitif dimana para santri mempelajari dan mengulang-ulang ayat Alquran dengan seksama hingga dapat menghafalnya dengan baik. Tidak jarang para santri menghabiskan waktu berjam-jam dalam sehari untuk fokus menghafal Al-Quran, dan keberhasilan mereka dalam menghafal seringkali menjadi salah satu indikator keberhasilan para pesantren. Menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar tujuan akhir, tapi juga cara untuk memahami dan menginternalisasikan ajaran Islam secara mendalam. Dalam menghafalnya, santri juga memahami makna ayat-ayat Alquran dan mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. (Harun:2021: 212)

Santri di pesantren tradisional di Indonesia juga mengkaji hadis Nabi Muhammad sebagai sumber penting untuk memahami dan mengamalkan agama Islam. Hadits adalah catatan perkataan, perbuatan, dan perjanjian Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman tambahan yang diperlukan untuk memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Santri mempelajari berbagai kumpulan hadis yang disusun oleh para ulama terkemuka seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain-lain, yang dianggap sebagai sumber otoritatif bagi ajaran agama Islam. Kajian hadis membantu Santri memahami bagaimana Nabi Muhammad menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan bimbingan praktis dalam bidang ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), etika, dan hukum Islam. Dengan memahami

konteks dan sejarah hadis, Santri dapat memahami berbagai tradisi dan praktik Islam serta memperoleh pemahaman lebih dalam tentang norma-norma agama. (darmalaksana: 2020: 4)

Fiqh atau hukum Islam merupakan mata pelajaran penting dalam kurikulum pesantren tradisional yang berperan dalam memahami bagaimana ajaran agama dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Santri mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek Islam, termasuk ibadah, muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), dan hukum-hukum lainnya. Kajian fiqih membantu Santri memahami tata cara ibadah yang benar seperti shalat, puasa, zakat dan haji sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga memahami prinsip-prinsip moral dan etika yang harus mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam transaksi bisnis, perkawinan, dan hubungan sosial. Selain itu, pembelajaran Fiqih memberikan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Santri memahami bagaimana menerapkan aspek hukum seperti hukum waris, hukum pidana dan hukum kontrak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pengetahuan Fiqih yang mendalam, peserta didik mendapat pedoman hidup yang sehat sesuai dengan prinsip agama Islam dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. (Hasan: 2017: 1)

Metode pengajaran di pesantren tradisional Indonesia meliputi pengajaran lisan oleh guru-guru terhormat yang sering disebut kyai atau ustadz. Kyai adalah tokoh sentral di pesantren dan ajaran mereka dianggap sangat berwibawa. Mereka berperan penting dalam mendidik Santri tentang berbagai aspek agama Islam, membaca teks-teks agama dan memberikan penjelasan rinci tentang makna dan konteksnya. Santri duduk dengan penuh hormat ketika mendengarkan ceramah atau ceramah guru, dan kelas-kelas ini sering kali berlangsung dalam suasana yang sangat tradisional dan formal. Metode pengajaran ini mendorong partisipasi aktif Santri dalam pembelajaran dan diskusi. Santri diajarkan untuk bertanya, berdebat dan merenungkan ajaran Islam. Hal ini membantu mereka lebih memahami dan merefleksikan makna ajaran agama serta memberikan ruang berpikir kritis dan pemahaman Islam yang lebih baik. (Supriadi: 2022: 53)

Halaqah merupakan bagian penting dari metode pengajaran tradisional pesantren di Indonesia. Ini adalah diskusi kelompok yang dipimpin oleh guru, atau kyai, yang biasanya berlangsung setelah atau di antara pelajaran utama. Selama Halaqa, Santri duduk melingkar dan berpartisipasi aktif dalam diskusi tentang berbagai aspek agama Islam. Diskusi ini dapat mencakup pemahaman

yang lebih mendalam terhadap teks-teks keagamaan seperti Al-Quran dan Hadits, serta diskusi mengenai isu-isu moral, etika, dan kontemporer terkait Islam. Halaqah merupakan wadah dimana Santri mempunyai kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan merefleksikan konsep-konsep keagamaan. Hal ini mendorong pemikiran kritis, pemahaman yang lebih dalam dan pertukaran pendapat antara guru dan Santri serta antar teman sebaya. (Abubakar: 2015: 102)

Santri dari pesantren tradisional di Indonesia seringkali tinggal di asrama pesantren yang menjadi rumah kedua mereka selama mengenyam pendidikan. Asrama pesantren menciptakan lingkungan yang terkendali dan terspesialisasi untuk pembelajaran agama. Santri mengikuti rutinitas sehari-hari yang terstruktur yang mencakup waktu belajar Alquran, shalat berjamaah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kebersamaan di asrama juga memungkinkan para santri saling mendukung dan memotivasi dalam menghafal Al Qurandan dalam pendidikan agama. Selain itu, asrama pesantren membantu menciptakan kedisiplinan diri santri. Mereka harus mentaati aturan-aturan pesantren, antara lain waktu salat, larangan terhadap hal-hal yang dianggap haram dalam Islam, serta standar etika dan moral. Tinggal bersama di asrama juga membantu menghindari gangguan dari dunia luar yang dapat mengganggu pendidikan agama.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang fokus pada penanaman dan pengembangan adat istiadat dan nilai akhlak yang baik di kalangan santri. Selain pendidikan agama yang sehat, pesantren sangat menekankan pada pengembangan karakter dan etika yang kuat. Para Santri diajarkan untuk menjalani kehidupan yang bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Mereka belajar menghargai orang lain, berbuat baik, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam konteks Pondok Pesantren akhlak yang baik juga mencakup pengembangan sifat-sifat seperti kejujuran, integritas, kesabaran, rendah hati dan empati. Santri diajarkan untuk berperilaku baik tidak hanya dalam hubungannya dengan Tuhan tetapi juga dalam hubungannya dengan sesama manusia. Akhlak yang baik merupakan bagian integral dari pendidikan di pesantren dan dimaksudkan untuk membantu santri menjadi warga masyarakat yang bermoral tinggi dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan komunitas muslim secara keseluruhan. (Baihaqi: 2022: 61)

Membangun Masa Depan Pesantren Melalui Penguatan Peran Ulama

Peran ulama dalam pesantren adalah sangat penting dalam menjaga dan memelihara tradisi serta pendidikan Islam di Indonesia. Mereka adalah para pemimpin rohani yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan memainkan peran kunci dalam mentransmisikan pengetahuan agama ini kepada para santri pesantren. Ulama juga bertindak sebagai pengawas spiritual yang memberikan bimbingan moral dan etika kepada santri, membantu mereka dalam memahami dan menghayati nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ulama dalam pesantren juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga dan merawat tradisi Islam. Mereka menjaga integritas ajaran agama dan memastikan pesantren tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang otentik. Ulama juga sering memainkan peran penting dalam mendukung interaksi harmonis antara pesantren dan masyarakat sekitarnya, menjembatani komunikasi antara pesantren dan masyarakat, serta memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat setempat. (Choir: 2023: 131)

Ulama memiliki peran sentral sebagai instruktur utama di pesantren, menjadi sumber utama pengetahuan agama Islam bagi para santri. Mereka mengajar berbagai mata pelajaran agama yang mencakup studi mendalam tentang Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Aqidah, dan Ilmu Tafsir. Selama proses pengajaran, ulama membacakan teks-teks suci dan kitab-kitab agama, memberikan penjelasan mendalam tentang makna dan konteks ajaran tersebut, serta merespons pertanyaan dan keraguan santri. Dengan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, ulama membantu santri memahami prinsip-prinsip agama dan praktek-prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Peran ulama sebagai instruktur utama bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Islam. (Moesa: 2007: 168)

Ulama memainkan peran kunci dalam menjaga dan memelihara tradisi Islam dan nilai-nilai budaya dalam pesantren. Mereka bertindak sebagai penjaga warisan agama dan budaya yang telah diteruskan selama berabad-abad. Ulama membantu pesantren untuk mempertahankan aspek-aspek keislaman yang otentik dan mencegah pengaruh dari perubahan zaman atau budaya yang mungkin mengaburkan nilai-nilai asli Islam. Dengan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan tradisi-tradisi pesantren, ulama membantu menjaga kesinambungan warisan agama yang kuat. Selain itu, ulama juga berperan dalam memastikan bahwa pesantren tetap menjadi pusat pendidikan agama yang terpercaya dan terkemuka. Mereka memastikan bahwa kurikulum dan

metode pengajaran yang digunakan di pesantren sesuai dengan nilai-nilai Islam yang otentik dan relevan dengan kehidupan kontemporer. (Satria: 2016: 28)

Banyak ulama yang berasal dari pesantren juga merupakan pemikir dan intelektual yang aktif dalam komunitas Muslim Indonesia. Mereka memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran Islam di Indonesia dan berkontribusi pada pemahaman agama yang lebih mendalam. Ulama-ulama ini terlibat dalam penelitian ilmiah, penulisan buku, serta debat intelektual tentang berbagai isu agama dan sosial yang relevan dengan masyarakat. Mereka tidak hanya membantu memelihara ajaran agama, tetapi juga membuka ruang untuk pemikiran kritis, pembaruan, dan adaptasi agama dalam konteks modern. Peran ulama sebagai pemikir dan intelektual menghubungkan pesantren dengan dunia luar dan memungkinkan mereka berkontribusi pada pembentukan pandangan dan kebijakan Islam di Indonesia. (Damanhuri: 2019: 21)

Para ulama dalam pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan memimpin kehidupan keagamaan di masyarakat setempat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan shalat jumat, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan khutbah yang menginspirasi dan memberikan nasihat agama yang memandu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kedalaman pengetahuan mereka tentang Islam, ulama pesantren juga berfungsi sebagai pemimpin spiritual yang memberikan bimbingan moral dan etika kepada warga masyarakat, sehingga menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dan tradisi Islam di lingkungan tersebut. Keberadaan ulama dalam pesantren bukan hanya sebagai pemimpin keagamaan tetapi juga sebagai sosok yang sangat dihormati dan dihargai dalam masyarakat setempat. Mereka menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang taat agama, dan pengetahuan mereka dalam bidang agama menjadi sumber inspirasi dan bimbingan bagi masyarakat. (Ma'mur: 2022: 58)

Ulama memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan dan pengembangan pesantren. Mereka bukan hanya sebagai guru agama, tetapi juga sering terlibat dalam proses pembuatan keputusan strategis terkait kurikulum, kebijakan, dan pembangunan fisik pesantren. Dalam konteks ini, ulama membawa pemahaman mendalam tentang ajaran Islam yang diperlukan untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebutuhan santri. Mereka juga berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pesantren yang mencakup masalah administratif, keuangan, dan organisasi. Selain itu, ulama sering menjadi pemimpin moral dalam proses pembangunan fisik

pesantren, memastikan bahwa pembangunan tersebut memenuhi standar etika Islam dan berkontribusi pada lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan ibadah. Peran ulama dalam pengelolaan pesantren juga mencakup menjaga kesinambungan tradisi pesantren dan memastikan pesantren tetap menjadi pusat pendidikan Islam yang kuat. Mereka berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai pesantren dan memastikan bahwa pesantren terus beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip agama.

Berdaya Saing di Era Baru: Keajaiban Inovasi dalam Metode Pengajaran Pesantren

Inovasi dalam metode pengajaran pesantren telah menjadi semakin penting untuk menjawab tuntutan zaman modern dan memastikan pesantren tetap relevan dalam pendidikan agama. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang kaya tradisi, telah memainkan peran penting dalam menjaga dan menyebarkan ajaran agama selama berabad-abad. Namun, dengan perubahan dinamika sosial, teknologi, dan tantangan zaman modern lainnya, pesantren perlu beradaptasi agar bisa memberikan pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan santri di era ini. Inovasi dalam metode pengajaran pesantren melibatkan penggunaan teknologi, pendekatan interaktif, diversifikasi kurikulum, dan pembelajaran aktif. Hal ini membantu pesantren untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan konteks dunia modern. Pesantren juga perlu memberikan perhatian khusus pada pendidikan karakter dan nilai-nilai moral yang kuat, sehingga santri tidak hanya memahami ajaran agama tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam masyarakat. (Edi: 2023: 53)

Beberapa pesantren telah memanfaatkan teknologi modern dengan cerdas dalam metode pengajarannya. Mereka mengadopsi komputer, internet, dan perangkat mobile sebagai alat untuk memperluas akses santri terhadap sumber-sumber pengetahuan Islam yang lebih luas dan beragam. Dengan menyediakan materi pembelajaran online, forum diskusi, dan platform e-learning, pesantren memberikan fleksibilitas kepada santri untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan pemahaman mereka tentang ajaran agama. Hal ini juga membuka pintu bagi santri yang berada di lokasi yang jauh dari pesantren atau memiliki keterbatasan fisik untuk tetap terlibat dalam proses pembelajaran agama Islam. Penggunaan teknologi dalam pesantren juga memungkinkan pesantren untuk menyampaikan informasi dengan lebih efisien dan terukur.

Materi pembelajaran online dapat diperbarui secara berkala, dan forum diskusi online memfasilitasi interaksi antar-santri tanpa terbatas oleh batasan geografis.

Pendekatan interaktif dalam metode pengajaran adalah salah satu inovasi yang signifikan di pesantren modern. Dalam pendekatan ini, santri tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi mereka aktif terlibat dalam diskusi, perdebatan, dan pemecahan masalah terkait ajaran Islam. Hal ini memungkinkan santri untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menyelidiki konsep-konsep agama dengan lebih mendalam, dan memahami cara menerapkan ajaran Islam dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Pendekatan interaktif ini juga mendorong dialog terbuka antara santri dan ulama, menciptakan lingkungan yang inklusif di mana santri dapat bertanya, mempertanyakan, dan mendiskusikan berbagai aspek keagamaan. Pendekatan interaktif ini bukan hanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang agama, tetapi juga membantu santri mengembangkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kompleks dalam kehidupan modern. (Iskandar: 2023: 4)

Pengembangan kurikulum pesantren dengan memasukkan mata pelajaran tambahan yang relevan dengan tantangan zaman modern merupakan inovasi yang sangat penting. Dengan melibatkan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan bahasa asing dalam kurikulum, pesantren membantu santri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia kontemporer. Ini memungkinkan santri untuk menggabungkan pengetahuan agama dengan pemahaman tentang perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga mereka dapat lebih baik memahami kompleksitas tantangan modern yang mereka hadapi. Pengembangan kurikulum pesantren dengan memasukkan mata pelajaran tambahan yang relevan dengan tantangan zaman modern merupakan inovasi yang sangat penting. Dengan melibatkan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan bahasa asing dalam kurikulum, pesantren membantu santri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang dunia kontemporer. Ini memungkinkan santri untuk menggabungkan pengetahuan agama dengan pemahaman tentang perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga mereka dapat lebih baik memahami kompleksitas tantangan modern yang mereka hadapi. (Kursini: 2021: 51)

Penggunaan metode pembelajaran aktif di pesantren telah membawa perubahan positif dalam pendidikan agama. Dalam metode ini, santri diundang untuk terlibat dalam proyek-proyek praktis yang relevan dengan ajaran agama,

seperti kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, dan penelitian tentang isu-isu yang berkaitan dengan Islam. Ini membantu santri untuk menerapkan konsep-konsep agama dalam situasi dunia nyata, mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana agama Islam berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari. Selain pemahaman agama yang lebih dalam, metode pembelajaran aktif juga mengajarkan nilai-nilai sosial yang penting dan keterampilan praktis kepada santri. Mereka belajar tentang kepedulian sosial, kerjasama tim, dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas. Ini membantu menciptakan santri yang tidak hanya berkompeten dalam aspek agama, tetapi juga siap untuk berperan aktif dalam menjawab masalah sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

Penerapan sistem mentoring personal di beberapa pesantren telah membuktikan nilai yang sangat positif dalam perkembangan santri. Dalam sistem ini, setiap santri memiliki seorang mentor atau guru pribadi yang bertanggung jawab untuk membimbing mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan spiritual dan akademis. Mentor ini adalah figur yang sangat dihormati dalam pesantren dan memiliki pengetahuan agama yang luas. Mereka tidak hanya memberikan bimbingan terkait dengan pelajaran agama, tetapi juga memberikan nasihat tentang etika, moralitas, dan bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sistem mentoring personal membantu memperkuat hubungan antara santri dan ulama pesantren. Santri dapat merasa lebih nyaman untuk membuka diri dan berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang mereka hadapi dengan seorang mentor pribadi yang mereka percayai. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif di mana santri merasa didengarkan dan diberikan bimbingan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. (Rasyidin: 2017: 138)

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, pesantren modern memiliki kesempatan dan tanggung jawab untuk mengintegrasikan pendekatan multikultural dalam metode pengajarannya. Ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan mata pelajaran atau program yang mempromosikan pemahaman tentang perbedaan budaya, agama, dan keberagaman etnis. Santri dapat diajak untuk memahami konteks global dan berinteraksi dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda, sehingga mereka dapat menghargai keberagaman dan membangun kerjasama antarbudaya yang positif. Pendekatan multikultural juga membantu santri untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi yang efektif dalam lingkungan multikultural.

Mereka belajar untuk mendengarkan perspektif yang berbeda, berbicara dengan rasa hormat terhadap perbedaan, dan membangun jaringan dengan individu dari berbagai latar belakang. (Yusuf: 2020: 304)

Pesantren modern memahami pentingnya sistem evaluasi dan pengukuran kinerja untuk memastikan efektivitas pendidikan yang mereka tawarkan kepada santri. Dengan adanya sistem ini, pesantren dapat memantau perkembangan akademis, keterampilan beragama, serta kemajuan sosial dan karakter santri. Melalui pengumpulan data yang sistematis, pesantren dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan santri secara individu, memahami area di mana perbaikan diperlukan, dan merancang program intervensi yang sesuai. Selain itu, sistem evaluasi juga membantu pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan mereka secara keseluruhan. Dengan memeriksa hasil evaluasi secara berkala, pesantren dapat menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan program pembinaan agar lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, informasi yang dikumpulkan melalui evaluasi kinerja juga dapat menjadi dasar untuk berbagai perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang lebih baik.

Jembatan Kesejahteraan: Pesantren sebagai Katalisator Perubahan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di banyak masyarakat di Indonesia dan negara-negara yang memiliki tradisi pesantren serupa. Sebagai pusat pendidikan agama Islam yang kuat, pesantren membantu menyebarkan nilai-nilai agama, membangun karakter, dan meningkatkan pemahaman spiritual di antara santri mereka. Dengan demikian, pesantren berperan dalam membentuk individu yang tidak hanya mampu mengamalkan ajaran agama, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, pesantren juga memberikan kontribusi langsung pada pemberdayaan ekonomi lokal. Banyak pesantren memiliki lahan pertanian dan usaha ekonomi lainnya yang menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Mereka juga sering terlibat dalam kegiatan bisnis yang berkelanjutan seperti produksi dan penjualan produk pertanian, kerajinan tangan, atau pendidikan ekonomi Islam. (Yulivan: 2021: 178)

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki peran penting dalam mendidik santri dalam aspek agama. Mereka memberikan pelatihan yang mendalam tentang ajaran Islam, meliputi pemahaman tentang

Al-Quran, Hadits, fiqih, akhlak, dan banyak aspek agama lainnya. Selain itu, banyak pesantren juga memperluas spektrum pendidikan mereka dengan menyediakan program pendidikan umum seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan sebagainya. Dalam upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan santri, beberapa pesantren juga menawarkan pelatihan dalam keterampilan praktis seperti pertanian, kerajinan tangan, dan tata busana. Ini membantu santri dalam mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi lokal mereka dengan memiliki beragam keterampilan yang berguna dan relevan. Pendidikan yang diberikan oleh pesantren tidak hanya membekali santri dengan pengetahuan agama yang kuat, tetapi juga dengan kemampuan yang diperlukan untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal mereka. Santri yang terampil dalam berbagai bidang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat mereka, membantu memajukan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya.

Kehadiran lahan pertanian dan usaha ekonomi di pesantren memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi lokal. Pesantren sering memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam dan peternakan, menciptakan peluang kerja bagi penduduk setempat. Selain itu, beberapa pesantren juga terlibat dalam produksi kerajinan tangan seperti tenunan, seni kaligrafi, dan barang-barang seni Islam lainnya. Produk-produk ini dapat dijual di pasar lokal, menciptakan sumber pendapatan tambahan untuk pesantren dan menggerakkan ekonomi lokal secara keseluruhan. Selain berperan sebagai penyedia lapangan kerja, pesantren juga dapat memainkan peran dalam pengembangan bisnis dan ekonomi lokal dengan mendukung kewirausahaan. Mereka dapat memberikan pelatihan dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah kepada santri dan anggota masyarakat setempat. Hal ini dapat membantu menciptakan peluang bisnis baru dan mendiversifikasi ekonomi lokal.

Pesantren tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga memainkan peran penting dalam pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka sering menjadi pusat yang menyediakan bantuan kepada orang-orang yang kurang beruntung, termasuk anak-anak yatim, fakir miskin, dan korban bencana alam. Pesantren mempromosikan nilai-nilai belas kasihan dan solidaritas dalam praktik Islam, dan ini tercermin dalam upaya mereka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan berperan aktif dalam pelayanan sosial, pesantren membantu memperkuat kerja sama

sosial dan membangun hubungan yang kuat antara santri dan masyarakat setempat. Ini juga menciptakan iklim kemanusiaan yang sehat di masyarakat di sekitar pesantren. Dukungan dan bantuan yang diberikan oleh pesantren juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan mereka yang membutuhkan, membantu mereka dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi.

Pesantren memainkan peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya dan tradisi, baik dalam konteks Islam maupun budaya lokal. Mereka menjadi tempat di mana ajaran Islam tradisional dan nilai-nilai kultural turun-temurun disampaikan dari generasi ke generasi. Pesantren sering mengadakan perayaan budaya seperti upacara adat, seni pertunjukan, dan acara sosial yang memungkinkan santri untuk memahami, menghargai, dan merayakan warisan budaya dan sejarah yang kaya dalam komunitas mereka. Pelestarian budaya dan tradisi ini juga membantu mempertahankan identitas budaya masyarakat. Dalam era globalisasi, pesantren dapat berperan sebagai penjaga budaya dan menjadi wadah untuk menjaga keunikan dan keberagaman tradisi lokal. Ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan warisan budaya yang menjadi ciri khas suatu masyarakat tetap hidup dan relevan dalam masyarakat yang terus berubah. (Umairso: 2018: 195)

Pesantren bukan hanya tempat pendidikan agama tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka sering mengadakan berbagai acara keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, tadarusan, dan peringatan hari-hari besar Islam. Acara-acara ini menjadi momen untuk memperkuat ikatan keagamaan dan memperdalam pemahaman agama di antara santri dan warga masyarakat setempat. Selain itu, pesantren juga menjadi tempat di mana berbagai acara sosial dan budaya diadakan. Misalnya, pernikahan, pesta keluarga, dan upacara adat sering dilakukan di pesantren sebagai bagian dari tradisi sosial masyarakat. Hal ini menciptakan ikatan komunitas yang kuat antara santri dan warga masyarakat, serta memperkuat hubungan baik antarwarga dalam sebuah komunitas yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan.

PENUTUP

Dalam era yang terus berubah dengan pesat, pesantren memegang peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya dan tradisi. Sebagai lembaga pendidikan yang kental dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal, pesantren menjadi penjaga api warisan budaya yang telah diteruskan dari

generasi ke generasi. Dengan tekunnya pengajaran agama, adab, dan adat istiadat, pesantren tidak hanya membentuk generasi yang taat beragama, tetapi juga menjaga agar akar budaya dan tradisi kita tetap tumbuh subur.

Pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga sekolah kehidupan yang mengajarkan nilai-nilai seperti gotong-royong, toleransi, dan kearifan lokal. Dalam pesantren, tradisi-tradisi lama terus hidup, seperti seni beladiri tradisional, musik, dan kesenian yang menjadi identitas khas masyarakat. Ini adalah jembatan antara masa lalu yang kaya dengan masa depan yang cerah.

Pesantren bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat kebudayaan yang memelihara tarian, lagu, cerita rakyat, dan berbagai ekspresi seni lainnya. Dengan menjaga budaya dan tradisi, pesantren menjaga akar identitas kita sebagai bangsa. Inilah makna yang mendalam dari peran pesantren dalam pelestarian budaya dan tradisi, sebuah tugas suci yang dilakukan dengan penuh kebanggaan dan cinta akan warisan nenek moyang kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Abdullah. *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren Surabaya*:Imtiyaz 2017
- Asdiqoh, Siti. *Implementasi Pendidikan karakter pada Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali Salatiga*: LP2M, 2019
- Muchaddam Fahham, Achmad. *Pendekatan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan karakter dan Perlindungan Anak* Jakarta: Public Institut 2020
- Aziz, Helmi. “Kepemimpinan Kyai dalam MenjagaTradisi Pesantren (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Khalafi Al-Mu’awanah Kabupaten Bandung Barat) dalam *Tadib Jurnal Pendidikan Islam* Volume V November 2016”
- Fadhilah, Amir “Struktur dan Pola Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren Di Jawa dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No.1*, Juni 2011
- Krisdiyanto, Gatot “Sistem Pendidikan Pesantren Dan Tantangan Modernitas, dalam *Jurnal Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 15, No. 01, Juli 2019
- Tolib, Abdul. “Pendidikan Di Pondok Pesantren Modern dalam *Jurnal Risaalah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2015
- Masrur, Mohammad. “Figur Kyai dan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren dalam *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*: Volume 01; Nomor 02, Desember 2017

- Musaropah, Umi. "Kharisma Kyai Dalam Organisasi Pendidikan Pesantren Tradisional dalam Jurnal Ulumuddin Volume 8, Nomor 2, Desember 2018
- Safradji "Multi Sistem Pendidikan Pesantren dan Tantangan Masa Depan dalam *Taffim Al-Ilmi*, Februari 2020
- Nadia, Farra. "Kepemimpinan Visioner Kyai dalam Konteks Undang Undang Pesantren , *Sraddha: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama* Vol. 1, No. 1, Bulan Juni, Tahun 2023
- Syarifuddin Al Amin, Mohammad. "The Role of Ustad Pesantren in Increasing Santri's Interest on Kitab Kuning in Pesantren Kyai Syarifuddin *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* Volume 1, Number 2, July 2021
- Syuhud, A. Fatih. *Ablussunah Wal Jamaah: Islam, Wasatbiyah, Tasamuh, Cinta Damai* Jawa Timur: Pustaka Al-Khoirot, 2022
- Yasid, Abu. *Prinsip Moderat Paham Ablussunah Wal Jamaah (Aswaja)* Yogyakarta: IRCiSoD 2022
- Iyubenu, Edi AH. *Sesaudara dalam Iman, Sesaudara dalam Kemanusiaan* Yogyakarta: DIVA Press, 2021
- Irawan MN, Aguk. *Penakluk Badai Novel Biografi Hadratu Syaikh KH Hasyim Azy'ari* Yogyakarta: Republika 2028
- Wijaya, Aksin. *Berislam Di Jalur Tengah* Yogyakarta: IRCiSoD 2020
- Laila dkk, Zulkifli. *Kapita Selekta Pendidikan Islam* Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023
- Harun, Salman. *Tafsir Tarbawi: Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an* Ciputat: Lentera Hati, 2021
- Darmalaksana, Wahyudin. *Design Thinking Hadis Pembelajaran, Riset dan Partisipasi Masyarakat* Bandung: Fakultas Ushuludin UIN Bandung 2020
- Abu Hasan, Wismanto. *Fiqih Ibadah* Pemalang: Nem 2017
- Supriadi, Endang. *Sosiologi Pesantren, Pesantren, Keislaman dan Keindonesiaan* Semarang: CV Lawwana, 2022
- Abubakar, Marzuki. *Pesantren Di Aceh Perubahan, Aktualisasi dan Pengembangan* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015
- Fahham, Achmad Muchaddam. *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*
- Bachaqi, *Pesantren Gen Z: Re Aksentuasi Nilai Moderasi Beragama Pada Lembaga Pendidikan* Selemam: CV Budi Utama, 2022

- Choir, Abu. *Manajemen Entrepreneurship Pesantren* indramayu: CV Adanu Abimata, 2023
- Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial berbasis agama* Yogyakarta: LKiS 2007
- Satria, Ranga. *Transformasi Pendidikan Islam Di Minangkabau Abad 20 M* Ciputat: Sakata 2016
- Damanhuri, *Kemasyuran Syaikh Abdurrauf As-Singkili, Riwayat Hidup, Karya Besar, Kontribusi Intelektual, Pengabdian dan Kepeloporannya* Banda Aceh: Ar-Raniry Press 2019
- Ma'mur, Jamal. *Dakwah Islam Moderat Ala KH Afjudin Muhajir dan KH Abdul Muqith Ghazali* Yogyakarta: IRCiSoD, 2022
- Edi, Sarwo. *Manajemen Pendidikan Islam: Inovasi dan Solusi Masa Depan Dunia Pendidikan Islam* Indramayu: Adab 2023
- Iskandar, Akbar. *Pembelajaran Kreatif dan Inovatif Di Era Digital* Makasar: Cendekiawan Inovasi Digital 2023
- Kusrini, Siti. *Jejak Pendidikan Ulama Nusantara: Geneologi, Histografi, dan Kontekstualisasi Pendidikan Islam di Nusantara* Semarang: CV Asna Pustaka, 2021
- Rasyidin, Walni. *Landasan Pendidikan* Bandung: UPI Press 2017
- Yusuf, Achmad. *Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius di Pesantren Ngalah Pasuruan* Depok: Rajawali Press 2020
- Yulivan, Ivan. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pondok Pesantren dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan* Surabaya: CV Jakad Media 2021
- Umairso, *Kepemimpinan Transformasional Profetik Kajian Paradigmatik Ontos Integralistik Lembaga Pendidikan Islam* Rawamangun: Kencana 2018

TENTANG PENULIS



Saepul Bahri lahir di Pandeglang pada tanggal 24 Juli 1980 dari Pasangan H. Sarmedi Asrori (alm) dan Hj Salpiah. Masa kecil penulis bersekolah di SD Hegarmanah Werasari Subang Jawa Barat dikarenakan ikut orang tua yang berdinias di Werasari. Kemudian melanjutkan ke SMP N 1 Menes di Menes Pandeglang lulus tahun 1995. Penulis nyantri di bawah asuhan Kyai Haji Ahmad Rifai Arif Pimpinan Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Gintung, belajar Tangerang hingga lulus tahun 1999.

Pada tahu yang sama penulis melanjutkan studi ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat lulus tahun 2004. Pada tahun 2007 penulis menjadi guru Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar sampai dengan tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Sekolah Pasca Sarjana Konsentrasi Pemikiran islam lulus tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis menjadi Dosen Universitas Mathla'ul Anwar sampai dengan sekarang.

Penulis aktif di kegiatan intra kampus dan ekstra kampus. Penulis aktif di UKM Resimen mahasiswa pada tahun 2000 – 2004, HMI MPO tahun 2001-2002, Perguruan tenaga dalam Wahyu Sejati 2003-2004, serta aktif pula di Himpunan Keluarga Pandeglang Yogyakarta (HIKMAPY) 2003-2004. Saat ini penulis dipercaya memegang amanah sebagai Wakil Ketua Pengurus Daerah Mathla'ul Anwar, Principal (Kepala Sekolah)Primary Mathla'ul Anwar Global School (MAGS) dan Pembina UKM Pramuka UNMA Banten

TENTANG PENULIS



Ahmad Munji, lahir di Katibung Lampung Selatan Pada tanggal 8 Februari 1986 dari pasangan Kharuji dan Faridah. Menyelesaikan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Katibung 1998 dan Madrasah Tsanawiyah di Katibung Lampung Selatan Provinsi Lampung 2001. Selanjutnya melanjutkan study ke Pondok Pesantren dan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Citangkil 2002 dan Masuk Perguruan Tinggi Al-Khairiyah STIT Al-Khairiyah Prodi PAI Tahunan 2005 dan melanjutkan Jenjang Pasca Sarjana Prodi PAI di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Setelah Lulus di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Khairiyah Citangkil – Cilegon, mengajar di Madrasah Diniyah Al-Khairiyah Citangkil, Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Citangkil pada Tahun 2007 s.d Sekarang. Kegiatan sebagai tenaga edukasi lainnya, dilakukan diberbagai Perguruan Tinggi Al-Khairiyah, yakni STIT Al-Khairiyah 2007 - 2023, Universitas Al-Khairiyah 2018 s.d Sekarang.

Semasa kuliah aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan; DEMA STIT Al-Khairiyah, Himpunan Pemuda Al-Khairiyah, KAMMI Cilegon, KNPI Cilegon, IMC. Kerap menulis diberbagai media on line yang ada di Banten terkait kebijakan pemerintah, industri dan Sosial Masyarakat.

Karir sebagai Dosen di STIT Al-Khairiyah, Wakil Rektor 1 Universitas Al-Khairiyah, Sekretaris Jenderal PB Al-Khairiyah. Ketua TIM Pemenangan Pilkada di Di Kota Cilegon 2020, Ketua Relawan Jokowi - Ma'aruf Amin 2019. Pengurus Partai Persatuan Pembangunan Kota Cilegon.

Terlibat dalam Kepengurusan Lembaga FAlakiyah Al-Khairiyah, Lembaga Mubaligh Al-Khairiyah, Lembaga Muamalah Al-Khairiyah, LAZ Al-Khairiyah. Pernah terlibat sebagai penyelenggara kegiatan Vaksinasi Covid 19 di Kota Cilegon, Konflik Rumah Ibadah di Kota Cilegon.

Hasil Pernikahannya dengan Riyah Khairiyah Pada tahun 2011 telah dikaruniai dua orang puteri yaitu; Amira Jasmine Syaheda dan Fathira Aghnia Syaheda.

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN SEKULARISASI: TRADISI PESANTREN DAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

Ummu Habibah

UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

akuhabibah@gmail.com

Faizudin

STIT Al-Khairiyah Cilegon

faizudin.cilegon92@gmail.com

PENDAHULUAN

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam, telah lama menjadi penjaga keaslian dan keberlanjutan ajaran agama Islam di Indonesia. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, pesantren tidak dapat menghindari dampak perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang semakin kompleks. Salah satu isu yang muncul dan menarik perhatian adalah sekularisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Sekularisasi, dalam konteks ini, merujuk pada proses di mana unsur-unsur keagamaan atau keislaman dalam pendidikan pesantren dapat mengalami penyesuaian atau pengaruh oleh nilai-nilai sekuler atau non-keagamaan.

Pesantren memainkan peran penting dalam menjaga tradisi keislaman karena berfungsi sebagai pusat pembentukan karakter dan pengetahuan agama. Namun, pesantren mungkin merasa perlu untuk berubah agar tetap relevan di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan tantangan pendidikan kontemporer. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana pesantren dapat mempertahankan prinsip-prinsip dasar agama Islam sambil tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Penelitian tentang sekularisasi dalam pendidikan Islam di pesantren sangat penting untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika ini. Dengan memahami perubahan yang terjadi pada kurikulum, teknik pengajaran, dan nilai-nilai Islam, kita dapat memahami bagaimana pesantren berinteraksi dengan tuntutan modern dan bagaimana mereka mempertahankan esensi pendidikan Islam dalam lingkungan yang selalu berubah.

Masyarakat Indonesia telah mengadopsi pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered approach*) untuk mengembangkan masyarakat dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Ini, setidaknya, untuk mengatasi krisis ekonomi, keuangan, dan ketahanan pangan yang mengurangi kepercayaan rakyat pada pemerintah. Dalam situasi seperti ini, pesantren memiliki kesempatan untuk membangun civil society.

Semua upaya untuk mengembangkan wacana civil society harus diperhatikan dan dihargai karena wacana ini sangat terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan ini pasti memerlukan upaya untuk merekonstruksi, mengubah, atau bahkan menghancurkan pikiran-pikiran yang sudah ada. Ini termasuk pikiran-pikiran yang berasal dari Barat dan yang saat ini diusahakan di Indonesia melalui pendekatan konsep keagamaan, seperti konsep masyarakat madani.

Namun, pada tataran institusional, akar-akar civil society Indonesia sudah ada, meskipun sangat sederhana, seperti lembaga perantara antara negara dan masyarakat, baik modern maupun tradisional. Pada tahap ini, perlu dipikirkan tentang bagaimana mengembangkan lembaga-lembaga ini untuk mencakup kemampuan yang semakin rasional sehingga mereka dapat berkomunikasi, berhubungan, atau berkolaborasi dengan kelompok dan lembaga lain. Organisasi dan gerakan Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta lembaga pendidikan seperti pesantren, dan lainnya, telah menjadi dasar civil society secara kelembagaan.

Dari penjelasan tersebut di atas, tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat. Kita tahu bahwa pesantren selama ini relatif memiliki kemandirian yang relatif kokoh dibandingkan dengan lembaga pendidikan dan sosial yang lain. Sebab, hampir semua keberadaan pesantren berangkat dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam konteks yang demikian, pesantren sangat potensial dalam mengembangkan masyarakat melalui berbagai aktivitasnya. Sebab, di masyarakat pedesaan terutama, pesantren memiliki kedudukan yang strategis dalam mengembangkan masyarakat sekitar dan terhadap santri yang belajar di dalamnya. Dan ini pula yang penulis maksud dengan potensi pesantren terhadap pengembangan masyarakat (*civil Society*).

PEMBAHASAN

Pendidikan agama Islam

Pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam setiap tindakan. Nilai-nilai Islam mempengaruhi semua penalaran dan perilaku hidupnya. Azyumardi Azra mengatakan bahwa pendidikan Islam memiliki tiga karakteristik:

- a. penekanan pada pencarian, penguasaan, pengembangan ilmu pengetahuan atas dasar ibadah yang dilakukan sepanjang hayat,
- b. pengakuan akan kemampuan atau potensi seseorang untuk berkembang dalam suatu kepribadian,
- c. Pengamalan ilmu pengetahuan atas dasar tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat manusia (Ayzumardi:2004:69)

Pendidikan Islam adalah tentang pengamalan yang benar dan bertanggung jawab dari pengetahuan dan proses penghayatan. Baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Sesuai dengan ajarannya, Nabi Muhammad s.a.w. telah mengajak orang-orang yang beriman untuk beriman, beramal baik, dan berakhlak mulia.

Secara umum, tujuan pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan sikap, pikiran, dan perilaku melalui amal perbuatan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya. Tujuan ini sangat relevan untuk kebutuhan individu dan Masyarakat

Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek keimanan, tetapi juga menekankan aspek amal; iman tidak bermakna tanpa amal. Zakaiah Daradjat menambahkan bahwa ketika seseorang dapat memahami Islam secara menyeluruh, mereka dapat menjadi "*al-insan al-kamil*" dengan pola taqwa. *Al-insan al-kamil* adalah manusia yang sempurna secara rohani dan fisik, yang dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah SWT. (Daradjat:2004:29)

Fenomena yang berkembang dalam menjalani kehidupan ini seringkali menjadi problem yang sulit dihentikan dan diselesaikan, padahal untuk menjalani kehidupan hendaknya saling berdampingan dan saling menghormati satu sama lainnya. Tetapi hal ini berbeda jauh dari apa yang menjadi harapan dalam melakukan hubungan sosial kemasyarakatan sehingga banyak terjadi perbuatan yang kurang mengenakan dan saling bunuh, tuduh menuduh karena menganggap paling hebat dan berani. hal ini perlu diluruskan dan diarahkan supaya tidak terjadi kegaduhan dalam masyarakat, oleh karena itu perlunya

pendidikan bagi masyarakat menjadi penting sebab dengan pendidikan manusia akan diarahkan oleh dalil-dalil yang menjadi tuntunan hidup manusia.

Agama berfungsi sebagai alat untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan membangun karakter yang berbudi luhur, berakhlak mulia, dan hati yang bersih, sehingga hidup di dunia menjadi mulia. Dengan sempurnanya, manusia diciptakan untuk melakukan hal-hal baik dan mendapatkan ridho ilahi. Selain itu, manusia memiliki akal fikiran, yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk.

Sementara itu, menurut Harun Nasution, yang dikutip oleh Syahidin, tujuan pendidikan agama Islam (secara khusus di sekolah umum) adalah untuk membuat manusia menjadi takwa, yaitu orang yang patuh kepada Allah dalam menjalankan ibadah. Pendidikan agama juga menekankan pembangunan kepribadian muslim, khususnya akhlakul karimah, tetapi mata pelajaran agama tidak diganti dengan mata pelajaran etika dan akhlak (Syahidin, 2005: 20).

Namun, Al-Nahlawi menganggap pendidikan Islam sebagai "pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat (kolektif)" (Abdurrahman, 1979: 20).

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara efektif dan efisien. aktif mengembangkan kapasitasnya untuk memiliki kekuatan keagamaan, kemandirian, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, kelompoknya, bangsa, dan negara.

Sekularisasi

Istilah sekularisasi secara semantik memiliki makna dan arti yang beragam dan bervariasi namun memiliki nuansa yang sama. Untuk itulah diperlukan penelusuran makna secara etimologis maupun terminologis agar diperoleh pemahaman arti secara komprehensif. Sekularisasi yang dipakai dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dalam bahasa Inggris *secularization*, yang berasal dari bahasa Latin *saeculum* yang biasanya diartikan sebagai *the temporal world* (dunia temporal) sebagai lawan dari *the Kingdom of God* (Kerajaan Tuhan). (Yusuf:2000:25)

C. William menggunakan istilah "masa ini" (Yusuf:2000:25) untuk menggambarkan *Saeculum*. Bahkan lebih jelas pengertian Backer, yang

menyatakan bahwa istilah sekular berarti tidak hanya sesuatu yang profan tetapi juga sesuatu yang tidak suci, tidak bertuhan, dan sebagainya. Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa "sekular" mengacu pada kehidupan saat ini, kontemporer, atau duniawi, daripada masa depan, atau apa yang disebut "akherat" dalam agama Islam.

Istilah "sekularisasi" telah berkembang sehingga sering diartikan dengan berbagai arti tergantung pada subjek, sudut pandang, tujuan, dan subjek penelitian orang yang menggunakannya. (Yusuf:2000:25) Sebagian besar orang menganggap sekularisasi sebagai pemisahan antara urusan duniawi dan *ukhrawi* (akhirat) atau urusan negara (politik) dan agama. Sekularisasi, yang telah dikembangkan sejak Abad Pertengahan, menunjukkan bahwa dunia ilmu pengetahuan menjadi lebih ilmiah dan argumentatif dan bahwa hal-hal yang anti-kodrati dan teologis akan digantikan oleh hal-hal yang bersifat alamiah. Menurut seorang pengamat sosial politik Barat, "*Trend a way a secular and rational interpretation is known as "sekularization"*".

Sekularisasi dapat didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari agama dan metafisika. Artinya, terlepasnya dunia dari pengertian-pengertian religious yang suci, dari pandangan dunia yang semu, atau dari semua mitos supernatural. Kemudian manusia mengalihkan perhatiannya lepas dari dunia tersebut kearah dunia saat ini.

Surjanto Poepowardojo menyatakan bahwa sekularisasi menginginkan adanya pemisahan jelas antara ilmu pengetahuan dan agama, dan menganggap ilmu pengetahuan sebagai entitas independen. Jadi, berdasarkan rasio, manusia memiliki otonomi, yang berarti mereka dapat bertindak bebas sesuai keinginan mereka. Atas dasar orientasi ilmiah, manusia memiliki keinginan untuk menemukan hal-hal baru, dan dengan metode ilmiah empiris yang telah berkembang sejak abad ke-18, manusia memiliki kemampuan kreatif untuk menangkap dan mengungkapkan kebenaran nyata.

Yusuf al-Qardhawi, menambahkan bahwa sekularisme, dalam bahasa Arab bukanlah "*al-'Ilmaniyyah*" melainkan "*al-Ladiniyyah*" atau "*al-La'aqidah*", namun penggunaan "*al-'Ilmaniyyah*" adalah untuk mengelabui umat Islam, karena kalau diterjemahkan kepada "*al-Ladiniyyah*" atau "*al-La'aqidah*", umat Islam pasti akan menolaknya, karena itu, sungguh jahatlah penterjemahan sekular kepada istilah "*al-'Ilmaniyyah*"

Sekularisasi tidak hanya melingkupi aspek-aspek kehidupan sosial dan politik saja, tetapi juga telah merembes ke aspek kultural, karena proses tersebut menunjukkan lenyapnya penentuan simbol-simbol integras kultural.

Hal ini menunjukkan proses historis yang terus menerus yang tidak dapat dibalikkan, di mana masyarakat semakin lama semakin terbebaskan dari nilai-nilai spiritual dan pandangan metafisis yang tertutup. Al-Attas menyebutnya sebagai suatu perkembangan pembebasan, dan hasil akhir dari sekularisasi adalah relativisme historis. (Pardoyo:1993:20) Menurut Nurcholish Madjid, sekularisasi menjadi suatu keharusan bagi setiap umat beragama, khususnya umat Islam, jika pada suatu saat mereka kurang memberikan perhatian yang kepada aspek duniawi kehidupan dunia ini. Karena menurut pendapatnya, sekularisasi bukanlah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, yang merupakan ideologi yang bersifat tertutup, melainkan justru dimaksudkan sebagai islamisasi atau "pen-Tauhid an".

Pengaruh sekularisasi didunia Pendidikan Islam

Sejak kedatangan Belanda ke Indonesia dengan berbagai misinya, telah mampu memporak-porandakan peradaban bangsa Indonesia dari bangsa yang memiliki peradaban tinggi berdasarkan nilai Islam, semua system sosial pun mengalami perubahan yang cukup signifikan, sehingga budaya gotong royong bangsa ini semakin terkikis dan berubah menjadi sikap individualistic

Selain itu, masalah yang sangat penting adalah masalah pendidikan, di mana mereka melakukan hegemoni kekuasaan melalui media pendidikan. Dalam kenyataannya, hanya orang-orang yang memiliki akses ke Pendidikan didasarkan pada keturunan Belanda sendiri atau pribumi dengan garis keturunan bangsawan, inilah awal komersialisasi pendidikan di Indonesia. Selain itu, Belanda memasukkan sekularisme ke dalam sistem pendidikan, memisahkan agama dari dunia dan pendidikan agama dari pendidikan umum. Ini mengarah pada sistem pendidikan baru yang dibangun di Indonesia.

Di Belanda, model pendidikan yang dikenal sebagai "sekolah" diterapkan, meskipun di Indonesia juga ada model pendidikan seperti surau, langgar, padepokan, dan pesantren. Kehadiran model pendidikan sekolah secara tidak langsung menantang model pendidikan di Indonesia, sehingga kesan yang muncul adalah bahwa pendidikan pesantren dianggap tradisional sedangkan sekolah dianggap modern.

Konsep "politik asosiasi" menunjukkan sekularisasi pendidikan. Dengan mendorong sistem pendidikan baru yang berbasis web, politik ini bertujuan untuk menciptakan negara Belanda.kenetralan terhadap agama, yang bertujuan untuk memisahkan hubungan antara kaum terpelajar dan komunitas keagamaan.

Mulkhan menambahkan bahwa pemerintah kolonial berusaha untuk mengurangi pendidikan Islam dengan mengmodernisasi pendidikan dan mengubah kerangka sosial. Teologi dan ideologi santri membentuk kultur priyayi. (Mulkhan:1994:7)

Rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial untuk menerapkan Islam politik, misalnya kebijakan yang digunakan pemerintah kolonial Indonesia untuk menangani masalah Islam. Kebijakan-kebijakan ini menghilangkan Islam sebagai bentuk ekspresi politik. Inti Islam Politik adalah sebagai berikut: (1) pemerintah harus memberi kebebasan kepada orang-orang dalam hal ibadah murni, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda; (2) pemerintah harus memanfaatkan adat kebiasaan masyarakat untuk mendorong orang-orang ke Belanda; dan (3) pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa orang-orang ke fanatisme dan gagasan Pan-Islam di bidang politik dan kenegaraan. (Husaini:2008:6)

Selama awal abad ke-20, penjajah Belanda menerapkan politik etika yang meningkatkan liberalisme di Indonesia. Unifikasi adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengikat negeri jajahan. dengan penjajahnya dengan membawa budaya Barat ke Indonesia. Menurut Snouck Hurgronje, pendidikan dapat membantu mengintegrasikan orang Indonesia dan penjajah sehingga mereka memiliki persepsi sosial dan politik yang sama, terlepas dari perbedaan agama.

Seharusnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 menjadi momentum untuk mengakhiri penjajahan secara keseluruhan, termasuk menyingkirkan ideologi sekular-liberal yang ditanamkan oleh penjajah. Namun, Ini tampaknya tidak terjadi. Bukan mengubah ideologi atau sistem penjajah, revolusi kemerdekaan Indonesia hanyalah mengubah pemerintah yang berkuasa. Meskipun pemerintahan berubah, ideologinya tetap sekular.

Dengan demikian, sekularisme terus berkembang dan memasuki semua aspek kehidupan, bahkan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. oleh pemerintah Indonesia, di mana pendidikan agama hanya berlangsung beberapa jam dalam kurikulum. Yang lebih menyedihkan lagi, pemisahan antara pendidikan agama dan umum masih ada hingga saat ini.

Dalam Bab VI tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bagian kesatu (umum) Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 tahun 2003, pasal 15 menyatakan: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus."(undang-

undang Sisdiknas:2003) Pasal ini jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.

Selain itu, sekularisasi pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan agama diberikan melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang diawasi oleh Departemen Agama. Di sisi lain, pendidikan umum diberikan melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan, dan perguruan tinggi umum. yang bertanggung jawab atas Departemen Pendidikan Nasional.

Demikian juga, pasal 4 menyatakan bahwa, pertama-tama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi contoh, mendorong kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan dilakukan dengan menumbuhkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi semua orang. Keenam, pendidikan dilakukan dengan memberdayakan semua orang untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengendalian layanan pendidikan.

Ketidakjelasan ini semakin terlihat ketika Peraturan Menteri mengenai Standar Proses Pendidikan, Standar Isi, dan Standar Kompetensi Lulusan dikeluarkan. Di mana peran pendidikan agama meningkat terbukti jelas. Agama bukan inti dari semua bidang. Agama memiliki tempat sendiri, sementara bidang lain memiliki tempat yang berbeda. Keterpisahan ini semakin menunjukkan bahwa ada paradigma yang salah tentang bagaimana kurikulum disusun dan dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional negara ini. (peraturan menteri tentang standar isi:2006)

Oleh karena itu, jika kita melihat beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada Undang-undang Sisdiknas, yang menunjukkan bahwa pemahaman sekuler telah masuk dan berdampak padanya, kita dapat melihat bahwa hal utama yang harus dijunjung tinggi adalah Hak asasi manusia adalah yang paling penting dari semua prinsip, termasuk agama, karena nilai-nilai hak asasi manusia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dengan demikian, sekularisme bukan hanya berpandangan tentang "politik satu suku dan agama suku lain" tetapi juga menyempitkan ruang

lingkup agama. Selain itu, hal-hal yang termasuk dalam sekularisme adalah melakukan amal dengan Islam secara separuh. Semua yang menguntungkan dan mudah diterima. Namun, ketika menyebabkan kesulitan ditolak. Dengan demikian, sekularisme adalah keyakinan yang sangat berbahaya untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan umat Islam karena Allah berfirman, "Adakah kamu percaya (beriman) kepada sebahagian kandungan Kitab (al-Quran) dan ingkar akan sebahagiannya?" (QS. *Al-Baqarah*: 85).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam di indonesia

Pesantren berasal dari kata santri, yang memiliki awalan "pe" di depan dan akhiran "an", yang berarti "tempat tinggal para santri." Sebagaimana dikutip oleh Zamakhsyari Dhofier, (Dhofier:1994:22) Prof Johns menyatakan bahwa istilah "Santri" berasal dari bahasa Tamil dan berarti "guru mengaji". Menurut C.C. Berg, kata "shastri" berasal dari kata "shastra", yang dalam bahasa India berarti "orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana yang ahli dalam buku-buku suci agama Hindu. "Shastra" juga berarti "buku-buku suci, buku-buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan."

Survei pertama tentang pendidikan pribumi Belanda pada tahun 1819 menunjukkan bahwa tidak ada pesantren yang sebenarnya di seluruh Jawa. Mereka hanya ditemukan di Priangan, Pekalongan, Rembang, Kedu, Surabaya, Madiun, dan Ponorogo. Di tempat lain, tidak ada pendidikan resmi sama sekali; hanya pendidikan informal yang diberikan di rumah pribadi dan di masjid. Anak-anak dari pesisir utara pergi ke sana untuk belajar lebih lanjut. (Bruinessen:1999:25) Pada awalnya, pesantren hanyalah lembaga pendidikan, jadi survei Belanda tersebut penting. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah Belanda tidak dapat mendaftarkan beberapa pesantren di Jawa.

Tidak dapat disangkal bahwa tujuan utama dari munculnya pesantren ini adalah untuk menyebarkan ajaran Islam seperti yang ditemukan dalam kitab-kitab kuno yang dikenal di Indonesia sebagai "Kitab Kuning." Penyebaran ilmu keislaman ini pada awalnya sangat informal. Anak-anak dan orang dewasa memperoleh pengetahuan tentang membaca dan menghafal al-Qur'an dari orang-orang di kampung yang telah menguasainya sebelumnya. Murid-murid yang sangat tertarik akan pergi ke rumah seorang ulama dan bahkan tinggal di sana untuk belajar agama. Guru dan murid biasanya mondok di sini. Dan pondokan inilah yang kemudian menjadi pesantren.

Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa lingkungan pesantren biasanya terdiri dari rumah kyai, sebuah tempat peribadatan yang juga berfungsi sebagai

tempat pendidikan, sebuah atau lebih rumah pondokan, sebuah atau lebih ruang makan, dan kolam atau ruang mandi atau berwudlu. (steenbrink:1986:16) Jika pesantren adalah yang dimaksud, pemerintah Belanda tidak mungkin menemukan mereka secara menyeluruh.

Di tempat-tempat seperti ini, santri dan murid biasanya menggunakan bahasa Arab sebagai alat untuk mempelajari kitab-kitab tentang fiqh (hukum Islam), ushul fiqh (pengetahuan tentang sumber-sumber dan sistem yurisprudensi Islam), hadist, adab, tasawuf, tarikh (sejarah Islam), tauhid (teologi Islam), dan akhlak (etika Islam). Kitab-kitab yang membahas masalah ini biasanya disebut "kitab kuning". Untuk mencapai mata pelajaran tersebut, jelas diperlukan guru yang cukup terdidik dan berpengalaman, serta pendidikan yang lebih sistematis. Mereka dapat memperolehnya di pesantren. (Dhofier:1994:20)

Pesantren memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang keagamaan, bahkan dari saat mereka didirikan. Karena pengajaran agama di pesantren memiliki dampak agamis, menurut Karel, (steenbrink:1986:16) yang menciptakan lingkungan yang unik, serta disiplin dalam menegakkan shalat dan memenuhi kewajiban syari'at Islam lainnya. Sebagai "desa" tersendiri, pesantren yang besar, di mana tinggal ratusan bahkan ribuan santri yang mengikuti pendidikan. Ini juga sangat memengaruhi pelaksanaan hukum di wilayah pesantren, seperti di kota Kaliwungu ini.

Karel juga mengatakan bahwa pesantren dihormati bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi lebih ditekankan sebagai tempat tinggal yang dipenuhi dan dipenuhi dengan nilai-nilai agama. Dia menunjukkan bahwa shalat didirikan dengan begitu taat di tempat lain seperti di sana. Pada siang hari, orang dapat mendengarkan para santri membaca al-Qur'an dengan lagu yang indah, memperbaiki bacaan mereka dengan tajwid yang benar, atau hanya untuk mengharapkan pahala dari membacanya. Pada malam hari, orang juga dapat mendengarkan para santri membaca al-Qur'an dan mendirikan shalat di tengah kesendirian malam. (steenbrink:1986:16) Ini jelas merupakan konsekuensi dari cara para santri memahami kitab-kitab yang dipelajari serta arahan para kyai, yaitu kitab kuning.

Dilihat dari sudut pandang fungsi kemasyarakatan secara keseluruhan, pesantren adalah pilihan yang sangat baik untuk mengembangkan situasi yang terjadi di luarnya. Secara historis, pesantren berfungsi sebagai subkultur yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pesantren memiliki

nilai, struktur sosial, dan tujuan yang lengkap, membuatnya lebih seperti dunia sendiri yang berbeda dari dunia luar. (Wahid:2001:102)

Pesantren adalah sistem pendidikan Islam dan sebuah "komunitas" yang unik di Indonesia. Ia adalah diskusi yang terus berubah. Pesantren memiliki banyak dimensi, atau multidimensional, sehingga banyak hal yang dapat dipertimbangkan saat berbicara tentangnya. Di mana ia melakukan banyak hal, seperti pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, budaya, dan bahkan perjuangan selama era kolonial Belanda.

Pesantren memainkan peran penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang keagamaan. Karena pengajaran agama di pesantren membawa pengaruh agamis, menurut Karel, (steenbrink:1986:16) yang menghasilkan lingkungan yang unik dan disiplin dalam menegakkan shalat dan memenuhi kewajiban syari'at Islam. Pesantren yang besar, di mana ratusan, jika tidak ribuan santri tinggal untuk belajar, merupakan "desa" yang unik. Hal ini sangat memengaruhi pelaksanaan syari'at di wilayah pesantren.

Jenis pendidikan di pesantren saat ini sangat beragam, dan dapat dibagi menjadi tiga kategori: (1) pesantren yang mengadakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA) maupun yang memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMU), seperti Pesantren Al-Muayyad Surakarta dan Pesantren-pesantren di Mranggen Demak; (2) pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama dalam bentuk madrasah; dan (3) pesantren yang hanya mengajarkan (Abdillah:2001:)

Pesantren tetap menjalankan fungsi-fungsinya yang sama, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang menyebarkan ilmu agama (tafaquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*), lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial (*social control*), dan lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Bagaimana peran-peran ini dilaksanakan hanya dipengaruhi oleh perbedaan jenis pesantren di atas.

Sebagai sumber pendidikan Islam konvensional, pesantren dianggap memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat dengan melakukan pembinaan lingkungan dan perubahan masyarakat. (Ziemek:1996:3) Pendidikan pesantren dikatakan sebagai lembaga pendidikan tradisional karena mereka dikembangkan dari tradisi yang kuat di masyarakat Indonesia. Pesantren bahkan merupakan salah satu contoh budaya pendidikan asli Indonesia, yang berasal dari tradisi pendidikan keagamaan dan program pendidikannya berpusat pada tafiqquh fi al-din, yang berarti memperdalam

pengalaman, memperluas pengetahuan, dan menguasai sumber ajaran Islam yang kaya. (Umar:2015:15)

Akar-akar *civil society* di Indonesia

Selama paruh kedua dekade 1980-an, terjadi pergeseran politik yang signifikan. Pergeseran ini dianggap oleh pengamat sebagai katalisator untuk demokratisasi dan kemajuan civil society di Indonesia. Muslim yang sebelumnya berada di tepi politik mulai masuk ke tengah-tengah. Pada saat yang sama, demokratisasi tampaknya mendapatkan momentum baru. Ini membuka banyak pintu bagi ekspresi dan eksperimen demokrasi yang selama ini tertutup, dan mendorong banyak gerakan prodemokrasi, yang dianggap sebagai komponen penting dalam pembentukan civil society. (Azra:1999:5)

Karena keduanya tidak dapat dipisahkan, negara dan masyarakat (negara dan civil society) harus memperoleh perhatian yang sama saat menganalisis demokratisasi. Negara menjadi kuat karena melemahkan masyarakat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, demokratisasi hanya dapat dicapai melalui penguatan masyarakat (menjadi civil society). sementara pemerintah mengurangi intervensinya dalam sektor publik dan membiarkan masyarakat bergerak, berinisiatif, dan mandiri. Pengawasan hukum, hankam, pelayanan administratif, dan pelaksanaan keputusan publik adalah satu-satunya wewenang pemerintah.

Istilah *civil society* atau *masyarakat kewargaan* dan sering disepadankan dengan *masyarakat madani*, tampaknya semakin mendapat tempat dalam *discourse-discourse* politik kontemporer Indonesia, meskipun di beberapa tempat masih mengandung pengertian beragam tergantung pada apa *civil society* didefinisikan.

Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada masa terjadinya transformasi dari masyarakat feodal agraris menuju masyarakat industrialis kapitalis. *Civil Society* sebagai gagasan bisa dikatakan sebagai anak kandung dari filsafat pencerahan (*enlightenment*) yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme yang menggantikan peran agama, dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti *monarchi*. (Murod:1999:70-72)

Dilihat dari asal-usulnya, kita dapat mengatakan bahwa istilah societis civilis pertama kali digunakan oleh Cicero, atau bahkan lebih dahulu sampai Aristoteles. Hanya Cicero yang menggunakan istilah ini dalam filsafat politiknya. Sampai abad ke-18, civil society dianggap sama dengan negara, yaitu suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok masyarakat lain.

(Hikam:1999:1) Baru pada paruh kedua abad ke-18, civil society dianggap sebagai entitas yang berbeda karena proses pembentukan sosial dan perubahan struktur politik yang terjadi di Eropa sebagai hasil dari pencerahan dan modernisasi.

Setelah itu, civil society juga pernah dipahami secara radikal dengan menekankan unsur-unsur kemandirian dan posisinya, sehingga menjadi antitesis dan negara (negara). Namun, secara garis besar, ada dua kutub utama dalam pemahaman tentang civil society. Kutub marxian-sosialis menempatkan civil society pada dataran material dari pola hubungan produksi kapitalis. Akibatnya, keberadaan civil society di sini disamakan dengan kelas borjuisi dan posisi negara yang kuat.

Kedua, sisi liberal-kapitalistis, yang biasanya lebih unggul dalam hal kesadaran hukum yang formal-legal. Menurut John Stuart Mill, penghormatan kepada hak-hak individu adalah ciri masyarakat liberal-kapitalistik. Setiap individu memiliki kemerdekaan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Negara harus memberikan kesempatan agar hak-hak tersebut semaksimal mungkin dilaksanakan melalui aturan hukumnya. Satu-satunya cara negara dapat membatasi hak seseorang adalah dengan memastikan bahwa setiap orang tidak melanggar hak orang lain. (Murod:1999:74)

Secara institusional, civil society dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang hidup sebagai warga negara mandiri yang memiliki kebebasan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara bebas dan egaliter dalam diskusi dan praktik mengenai masalah umum masyarakat. (Hikam:1999:85) Menurut Hikam AS, civil society adalah area kehidupan sosial yang terorganisir dengan ciri-ciri seperti kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi dibandingkan dengan negara, dan ikatan dengan nilai-nilai hukum dan norma. (Hikam:1999:85)

Dalam konteks keindonesiaan, kehadirannya diperlukan selama proses pembentukan masyarakat baru selama masa kolonial Belanda melalui industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, fenomena civil society menjadi lebih jelas. Ini ditandai dengan munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi, yang mendorong pembentukan organisasi modern yang bersifat nasionalis dan keagamaan pada awal abad ke-20. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa civil society negeri ini mulai rusak.

Selama perjalanannya, civil society telah mengalami periode pertumbuhan yang cukup menguntungkan. Hal ini terjadi setelah revolusi (tahun 1950-an),

ketika organisasi sosial dapat berkembang dengan bebas dan mendapatkan dukungan kuat dari warga negara yang baru merdeka. Selain itu, negara tidak melakukan intervensi selama periode ini, sehingga kekuatan masyarakat menjadi penyeimbang kekuatan negara. Namun, iklim seperti ini tidak akan bertahan lama, sehingga civil society negeri ini dapat membangun dasar yang kukuh. (Hikam:1999:85)

Sebaliknya, yang sedang berkembang itu segera mengalami urutan terus menerus. Di bawah rezim Soekarno dengan "Demokrasi Terpimpin", kondisi civil society mencapai puncaknya. Setelah rezim itu runtuh, muncul Orde Baru, yang terjadi justru sebaliknya, yang sedang mulai berkembang. Kondisi civil society mencapai puncaknya di bawah rezim Soekarno dengan "Demokrasi Terpimpin"-nya. Tumbangnya rezim Soekarno dan munculnya Orde Baru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan civil society di Indonesia. Industrialisasi menyebabkan munculnya dan perkembangan kelas baru dalam masyarakat. Demikian pula dengan semakin tingginya tingkat pendidikan individu dalam komunitas.

Dalam konteks politik, jelas bahwa Orde Baru terus berusaha memperkuat posisi negara di semua aspek. Tentu saja, hal ini harus dibayar dengan mengurangi kemandirian dan partisipasi politik anggota masyarakat. Penetrasi negara yang kuat, terutama melalui jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengurangi ruang bebas. Akibatnya, kondisi civil society dan kemajuan mereka selama Orde Baru menunjukkan beberapa paradoks. Misalnya, kelas menengah seharusnya semakin mandiri sebagai pengimbang kekuatan negara, seperti yang terjadi di negara-negara kapitalis Barat. Paradoks lain terlihat dalam posisi LSM dan ormas-ormas, yang sering disebut sebagai pilar civil society. Meskipun jumlahnya cukup besar pada saat itu, kondisi mereka masih sangat lemah.

Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah suatu tempat di mana perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri dapat dilakukan tanpa terhalang oleh kondisi kehidupan material dan tidak terikat pada jaringan kelembagaan politik resmi. Dalam hal ini, civil society dapat muncul di luar negara dalam berbagai organisasi dan asosiasi. Kelembagaan civil society dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial keagamaan, paguyuban, dan kelompok kepentingan. Penulis juga percaya bahwa pesantren juga termasuk dalamnya.

Peranan pesantren dalam pengembangan *civil society* di masyarakat

Pesantren memainkan peran penting dalam masyarakat Islam pedesaan karena mereka melindungi umat dan prinsip Islam dari ancaman dari kekuatan struktural yang datang dari luar. Pengasuh pesantren, atau kyai, dianggap sebagai pemimpin agama dan kemasyarakatan yang kharismatik. Memang ada beberapa orang yang menganggap mereka sebagai kelompok yang menentang konsep kemajuan, atau konsep kemajuan, tetapi mereka dinilai dengan baik dan sangat pandai membaca pikiran orang lain. Mereka jauh lebih baik dari para penguasa karena mereka ahli agama dan terus terang. (Hikam:1999:8)

Oleh sebab itu, sejalan dengan upaya penguatan masyarakat, pesantren memiliki peluang yang besar. Sebab, lembaga seperti pesantren memainkan peranan yang penting dalam mengartikulasikan, membela dan memperluas reformasi sosial melalui program-program yang berhubungan dengan pendidikan, dan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan.

Karena masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, membutuhkan bimbingan rohaniah, yang dapat diberikan oleh pesantren dan kiainya, yang berfungsi sebagai tempat pendidikan dan kegiatan spiritual. Mereka membutuhkan pendidik dan pimpinan yang dapat mempertimbangkan dan membuat keputusan tentang masalah yang mereka perselisihkan. Pondok pesantren, sebagai pusat pendidikan dan sumber kepemimpinan nonformal, juga menyediakan ruang untuk berbagai kegiatan yang tentunya memiliki banyak peluang untuk melakukan fungsi yang lebih luas, (Rahardjo:1988:10) seperti memberdayakan masyarakat umum, tentu saja.

Padahal, penulis percaya bahwa pesantren memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemberdayaan tersebut. Ketahuilah bahwa masyarakat sangat mempertimbangkan keberadaan pesantren, terutama di daerah pedesaan. Ini masuk akal karena, selain dianggap sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga dianggap sebagai institusi "kawah candradimuka" yang bertugas meningkatkan moral dan etika para santri yang belajar di dalamnya. Adanya kemajuan teknologi dan dampak negatifnya, terutama dekadensi moral, memaksa masyarakat untuk "menitipkan" anak-anak mereka di lembaga pesantren. Di lembaga ini, mereka berharap anak-anak dilatih sedemikian rupa sehingga mereka tidak terkontaminasi oleh efek buruk dari kemajuan teknologi.

Namun, ada beberapa hambatan. Sebagian besar pesantren tidak menyediakan siswanya dengan berbagai ilmu dan keterampilan yang diperlukan masyarakat. Dengan figur sentralnya (Kyai), pesantren idealnya harus berusaha memberikan pendidikan tambahan selain pendidikan agama. Ini harus menjadi

bukti kepedulian mereka terhadap realitas lingkungannya. Pesantren dapat menawarkan kursus yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi, seperti mengajar teknik komputer, montir, elektronik, atau teknologi informasi. Namun, dapat dimungkinkan untuk menyediakan pendidikan tambahan yang ditujukan untuk aktualisasi diri para santri ketika mereka menjadi bagian dari komunitas mereka sendiri, seperti mengajarkan keterampilan seperti berdagang, bertani, berkebun, beternak, dan bertukang.

Pesantren dapat mencapai hal ini jika mereka ingin membuka diri dengan bekerja sama dengan lembaga dan lembaga lain, memiliki keinginan yang kuat—terutama para pengasuhnya—untuk mencapai tujuan tersebut. Jika ini dapat dicapai, pesantren tidak hanya akan terus berfungsi sebagai institusi yang memiliki kemampuan untuk "membentengi" moral masyarakat, tetapi juga akan memiliki kemampuan untuk mempromosikan masyarakat umum (*civil society*) melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Sekularisasi pada dasarnya merupakan proses perubahan persepsi masyarakat tentang perubahan peran agama bagi masyarakat. Perubahan tersebut berkaitan dengan peran agama sebagai institusi, sistem norma maupun sistem kognitif. Oleh karena itu menelusuri proses sekularisasi didasarkan pada pemahaman agama berdasarkan definisi-definisi agama berdasarkan kategori institusional, normatif dan kognitif.

Pesantren di Indonesia mengalami dampak dari perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi pendidikan Islam. Sekularisasi dalam pendidikan Islam, yang telah ada sejak kedatangan Belanda ke Indonesia, telah memengaruhi sistem pendidikan dan nilai-nilai tradisional. Meskipun demikian, pesantren memiliki kesempatan untuk membangun *civil society* dan mempertahankan esensi pendidikan Islam dalam lingkungan yang selalu berubah. Pesantren juga dianggap sebagai lembaga "kawah candradimuka" yang bertugas meningkatkan moral dan etika para santri. Dengan demikian, pesantren memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.

Pada dasarnya pesantren memiliki peran pokok dalam mengembangkan pendidikan Islam (*tafaqquh fi al-din*) yang bersumber dari Al-Qur'an, al-hadits dan ijtihad para ulama dengan merujuk pada kitab-kitab kuning. Pesantren memiliki potensi untuk melakukan pengembangan pendidikan *civil society* di masyarakat dengan melakukan berbagai upaya. langkah ideal bagi pesantren

dalam melakukan pengembangan pendidikan civil society di masyarakat secara umum dapat ditempuh dengan dua cara: (1) melakukan berbagai aktivitas yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya 2) dengan membuat perencanaan pendidikan yang diarahkan pada kemampuan dan ketrampilan para santri dalam merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat asalnya. salah satu upaya penguatan peran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri “Status Pendidikan Pesantren Dalam Sistem Pendidikan Nasional”
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999)
- Al-Nahlawi, Abdurrahman, *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha (Damaskus: Dar al-Fikr) Al-Rasyidin dan Subarto, Rudhy. tt. Ilmu dan Epistemologi, dalam Jurnal Al-Huda* (Jakarta: Al-Huda : 1979)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam dan Sekularisme diterjemahkan dari buku: Al-Islam wal Ilma'niyah wajban lil wajbin, Cet.I*, (Bandung:Pustaka Setia, 2006)
- Azra,Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan*, (Bandung: Rosdakarya, 1999)
- Azra, Ayzumardi , *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia Memasuki Milenium Baru*, (El Hikmah, Vol 1 / 2, 2004)
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999)
- Husaini, Adian, *Islam liberal*, (Jakarta: Gema Insane Press, 2008)
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Dakwah Islam*, (Yogyakarta: Siperss,1994)
- Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik Sekapur Sirih Nurcholish Madjid* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti : 1993)

- Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Syahiddin. 2005. *Aplikasi Metode Pendidikan Qurani dalam Pembelajaran Agama di Sekolah*, (Tasikmalaya: Ponpes Suryalaya:2005)
- Umar, *Dinamika Sistem Pendidikan Islam dan Modernisasi Pesantren*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2015)
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi:Esai-esai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Yusuf, Choirul Fuad “*Peran Agama Dalam Masyarakat*” (Universitas Indonesia, 2000)
- Ziemek, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, terj. Butche B. Soendjojo, ed. Siregar, (Jakarta: P3M, 1996)
- UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X Pasal 15
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar

TENTANG PENULIS



Ummu Habibah, M.Pd, lahir di Jakarta 02 April 1995 putri kedua dari lima bersaudara pasangan bapak H. Muhammad Shidiq dan Ibu Nurjannah, mengawali Pendidikan di Taman Kanak-kanak Islam Raudhatul Ummah pada tahun 2000, melanjutkan Pendidikan dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah Dharma Bhakti ADY dan lulus pada tahun 2006, keudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Modern “Kulliyatul Al-naasyiin Al-islamiyah (KULNI)” yang saat ini berganti nama menjadi “Daarul Ulum Lido kampus 2” lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Kabupaten Tangerang jurusan Agama dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke jenjang strata satu di Universitas Muhammadiyah Tangerang mengambil program Pendidikan Bahasa Arab dan lulus pada tahun 2017. Melanjutkan kuliah untuk strata dua di program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan program Pendidikan Agama Islam dan lulus pada tahun 2021 dan di tahun 2023 melanjutkan ke jenjang strata tiga di Program Doktor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan jurusan Pendidikan Agama Islam.

TENTANG PENULIS



Faizudin lahir di Serang pada 19 September 1992 dari pasangan bapak. Syihabudin ibu Fauzah penulis menghabiskan masa kecil di link. Pagebangan. Kel. Kubangsari Kec. Ciwandan Kota Cilegon dan mulai belajar di SD/ MI Al-Khairiyah Kubangsari. Melanjutkan pendidikan ke MTs dan MA Al-Khairiyah Tegalbuntu Ciwandan.

Pada tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan setrata satu (S1) mengambil program studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Khairiyah dan meneruskan pendidikan Pascasarjana di UIN SMH Banten mengambil program studi

Pendidikan Agama Islam. Selama melakukan pendidikan di SMA penulis aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai penasehat Osis, Pradana Putra Ambalan KH. Abdullah. Pada saat kuliah penulis aktif sebagai Ketua Racana Brigjen KH. Syam'un, Himpunan Mahasiswa Islam, Pemuda AL-Khairiyah.

PENDIDIKAN ISLAM DAN INDOKTRINASI DI INDONESIA: KAJIAN KRITIS TULISAN CHARLENE TAN

Misbahuddin

Pondok pesantren Al Maghfiroh,
233621208.misbahuddin@uinbanten.ac.id

Ofik Taufiqurrohman

Institut Agama Islam Banten
233621202.ofik@uinbanten.ac.id

PENDAHULUAN

Isu kompleks indoktrinasi dalam pendidikan Islam menjadi suatu masalah yang mencakup beragam aspek yang memerlukan pemahaman dan penanganan yang mendalam (Supriadi, 2021:76). Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengajaran ajaran agama Islam dalam sekolah, tetapi juga melibatkan bagaimana pemahaman, nilai-nilai, dan keyakinan diintegrasikan ke dalam pendidikan. Pertanyaan mendasar tentang apa yang dianggap sebagai indoktrinasi dan apa yang merupakan pendidikan yang berkualitas masih menjadi perdebatan (Hábl, 2017:193). Sementara beberapa melihat indoktrinasi sebagai upaya untuk memengaruhi pemikiran individu dengan pandangan atau ideologi tertentu secara eksklusif, yang mengabaikan pemikiran kritis, yang lainnya mungkin menilai itu sebagai pengajaran keyakinan agama yang seharusnya menjadi bagian dari pendidikan agama. Masalah ini semakin rumit dengan tantangan global seperti radikalisasi, terorisme, dan intoleransi yang berhubungan dengan agama Islam (Suyanto et al., 2022:162). Oleh karena itu, isu indoktrinasi dalam pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang hati-hati, seimbang, dan multidimensional untuk mengatasi konflik antara kebebasan berpendapat dan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat yang semakin pluralistik (Ezzani & Brooksm 2019:791).

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam membahas isu kompleks mengenai indoktrinasi dalam pendidikan Islam, terutama berdasarkan pandangan Charlene Tan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan

untuk memahami definisi indoktrinasi dalam konteks pendidikan Islam, tetapi juga untuk mengkritisi pandangan yang mungkin memiliki implikasi signifikan dalam praktik pendidikan. Charlene Tan, dalam penulisannya, telah mengungkapkan keprihatannya terhadap pendidikan Islam yang dianggap sebagai sarana indoktrinasi, namun untuk memahami kebenaran di balik pernyataannya, peneliti harus lebih dalam memahami aspek-aspek esensial dari konsep indoktrinasi dalam pendidikan Islam. Pentingnya memahami makna indoktrinasi dalam konteks ini adalah dasar dari penelitian ini. Indoktrinasi, jika tidak dipahami dengan baik, dapat mengarah pada pengaruh kuat terhadap pemikiran individu tanpa memberikan kesempatan untuk pemikiran kritis atau eksplorasi pandangan yang beragam (Crice, 2019:300). Dalam pendidikan Islam, di mana pembentukan nilai-nilai dan keyakinan agama sangat penting, risiko indoktrinasi yang berlebihan dapat menghasilkan generasi yang memiliki pemahaman yang sempit dan kurang mampu untuk berpikir secara independen. Bahaya indoktrinasi dalam pendidikan Islam terutama terkait dengan kemungkinan terjadinya radikalisisasi, intoleransi, dan bahkan terorisme (Tambak, 2021:114). Indoktrinasi, sebagai sebuah konsep, mencakup ideologi, pengaruh, serta kontrol terhadap pemikiran dan pandangan individu (Richter et al., 2018:14). Peneliti perlu memahami dengan cermat bagaimana pandangan ini terkait dengan praktik pendidikan Islam di Amerika dan mungkin di tempat lain. Sementara pandangan Charlene Tan mengungkapkan keprihatan tentang kemungkinan indoktrinasi dalam pendidikan Islam, penting juga untuk mempertimbangkan apakah pandangan ini mencerminkan realitas yang ada di masa lalu dan saat ini.

Kutipan awal yang menyajikan perasaan frustrasi seorang kepala sekolah menunjukkan adanya ketidakpastian dan kegelisahan di lapangan. Berita-berita terkait dari Afghanistan, Amerika, dan California juga menyoroti kompleksitas isu ini, menciptakan konteks yang penting untuk memahami bagaimana masyarakat menghadapinya. Namun, untuk menjawab pertanyaan apakah indoktrinasi dalam pendidikan Islam benar-benar menjadi masalah yang signifikan, peneliti perlu lebih lanjut memahami konsep indoktrinasi, bagaimana pandangan ini dapat tercermin dalam praktik pendidikan, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Dalam pengungkapan pandangan dan kritik terhadap pandangan Charlene Tan, penelitian ini akan merinci definisi indoktrinasi,

serta menyelidiki apakah pandangan ini sesuai dengan realitas pendidikan Islam di masa lalu dan saat ini. Hal ini mencakup evaluasi terhadap materi buku pelajaran, kurikulum, serta praktik yang terkait dengan pendidikan Islam. Selain itu, artikel ini juga akan mencoba mengilustrasikan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan contoh tragedi yang saat ini terjadi di Indonesia, untuk memberikan perspektif yang lebih kuat terkait dampak potensial dari indoktrinasi dalam pendidikan Islam. Penelitian ini, dengan pendekatan yang sistematis dan kritis, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang isu yang kompleks ini dan membantu menjawab pertanyaan apakah indoktrinasi dalam pendidikan Islam adalah isu yang relevan dan signifikan di masa kini.

Penelitian ini mengambil pendekatan kajian kepustakaan sebagai metode utamanya. Kajian kepustakaan digunakan untuk secara komprehensif menggali dan mengevaluasi pandangan dan pemikiran yang terdapat dalam buku karya Charlene Tan, "Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia" yang terbit pada tahun 2011 (Tan, 2011). Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah penting, termasuk identifikasi pandangan, argumen, dan pemahaman yang disampaikan oleh Charlene Tan dalam bukunya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bukti dan referensi yang digunakan oleh penulis untuk mendukung argumennya. Tujuan utama adalah memahami konsep indoktrinasi dan bagaimana Charlene Tan menggambarannya dalam konteks pendidikan Islam, khususnya di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini melanjutkan dengan mencari implikasi dan relevansi dari pandangan Charlene Tan dalam realitas pendidikan Islam di Indonesia. Hal ini termasuk penelitian terhadap potensi risiko dan dampak yang dapat timbul dari praktik indoktrinasi dalam pendidikan Islam, terutama mengingat konteks sosial dan budaya yang unik di Indonesia. Pendekatan kajian kepustakaan memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi beragam sumber informasi yang relevan, seperti teori, data empiris, dan literatur terkait yang dapat membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang isu indoktrinasi dalam pendidikan Islam (Zhang & Fagan, 2016:122). Dengan demikian, metodologi penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu indoktrinasi dalam pendidikan Islam dan untuk menyelidiki relevansinya dalam konteks Indonesia yang unik. Pendekatan ini memberikan landasan yang kokoh untuk mengkaji buku Charlene Tan secara kritis dan untuk

mengevaluasi sejauh mana pandangannya mencerminkan situasi sebenarnya dalam pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep dan Definisi Indoktrinasi

Indoktrinasi adalah suatu proses di mana seseorang atau sekelompok orang diajarkan atau dipengaruhi dengan suatu ideologi, keyakinan, atau sistem nilai tertentu (Robinson et al., 2020:739). Kata "indoktrinasi" berasal dari kata Latin "*docere*," yang berarti "mengajar," dan "*doctrina*," yang berarti "apa pun yang diajarkan." Jadi, secara harfiah, indoktrinasi berarti penyaluran dari apa yang diajarkan. Pada awalnya, indoktrinasi tidak memiliki makna merendahkan, hanya merujuk pada instruksi atau pengajaran. Namun, pada awal abad ke-20, pandangan negatif tentang indoktrinasi mulai berkembang, terutama karena pengaruh pendidik progresif di Amerika Serikat yang mengutuk segala bentuk pendidikan otoriter, termasuk pendidikan agama (Keller, 2023:34). Pandangan negatif ini diperparah oleh perlawanan Amerika terhadap Nazi Jerman dan Republik Rakyat Tiongkok, dua negara yang terkenal karena teknik brainwashing mereka selama dan setelah Perang Dunia II.

Sejarah Eropa juga meninggalkan banyak orang di dunia berbahasa Inggris merasa waspada terhadap pendidikan agama, terutama yang bergantung pada pendekatan konfesional untuk menanamkan keyakinan agama pada penganutnya (Hansson, 2018:293). Akibatnya, indoktrinasi telah dianggap sebagai tangan kanan rezim totaliter dan metode pendidikan mereka yang memaksa, sementara "pendidikan" dianggap sebagai "proses instruksi yang manusiawi dan rasional," yang diyakini dipraktikkan oleh negara demokratis. Namun, meskipun indoktrinasi telah menjadi konsep yang merendahkan secara umum, para ahli tidak dapat sepakat mengenai definisi dan kriteria indoktrinasi. Indoktrinasi berkaitan dengan niat, konten, metode, atau hasil yang tidak diinginkan. Meskipun telah menjalani pemeriksaan dan perdebatan akademis yang intens, tidak ada konsensus yang dicapai, dan indoktrinasi tetap menjadi istilah yang dipertentangkan. Indoktrinasi terus menjadi topik perbincangan yang signifikan di media massa dan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam konteks kebangkitan agama, konflik antar-agama, dan terorisme yang didorong oleh agama. Dalam konteks pendidikan Islam, istilah "indoktrinasi" merujuk pada suatu proses di mana individu atau kelompok diajar atau dipengaruhi dengan keyakinan, nilai-nilai,

dan ajaran Islam. Ini adalah bagian integral dari pendidikan Islam, yang pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Namun, penting untuk memahami bahwa pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada satu pendekatan atau cara pengajaran agama Islam (Alkuoatli et al. 2018:367). Sebaliknya, pendidikan Islam mencakup beragam pendekatan pengajaran agama Islam yang dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kelompok sosial yang dilibatkan. Pentingnya memahami keragaman dalam cara Islam diinterpretasikan dan dipraktikkan oleh berbagai kelompok Muslim tidak dapat dilebihkan. Islam adalah agama yang memiliki banyak cabang dan aliran yang berbeda, dan setiap kelompok dapat memiliki interpretasi yang unik terkait dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, penting untuk menghindari pemahaman yang terlalu sederhana dan homogen tentang Islam. Terlebih lagi, dalam dunia pasca-Peristiwa 11 September, ada peningkatan kesadaran terhadap beragam representasi Islam dalam lanskap global. Faktor-faktor sejarah, geografis, agama, politik, sosial, dan budaya yang kompleks telah berperan dalam membentuk berbagai pemahaman tentang Islam di berbagai belahan dunia (Anderson, 2021:47). Oleh karena itu, penting untuk mengakui dan memahami beragam sudut pandang dan interpretasi yang ada terkait dengan Islam, serta mempromosikan dialog dan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama ini.

Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini juga berarti bahwa pendekatan pengajaran harus mempertimbangkan keragaman ini dan mendorong siswa untuk mengembangkan pemahaman yang kritis dan berpikiran terbuka terhadap berbagai sudut pandang dalam Islam, tanpa mengesampingkan pentingnya memahami prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang mendasarinya (Aldegether, 2020:98). Oleh karena itu, indoktrinasi dalam konteks pendidikan Islam merujuk pada upaya untuk mengajarkan dan mempengaruhi individu atau kelompok dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, yang seringkali mencerminkan keragaman dalam praktek keagamaan dan pemahaman Islam. Di sisi lain, Charlene Tan mengemukakan pandangan dan argumennya bahwa pendidik atau guru di Amerika yang percaya bahwa pendidikan Islam bisa menjadi indoktrinatif dengan fokus pada konteks masa lalu dan saat ini pandangan ini banyak diterjemahkan dari berbagai *headline* berita dan penelitian yang mengaitkan pendidikan Islam dengan indoktrinasi. Pandangan ini merupakan refleksi dari ketegangan yang timbul di masyarakat

Amerika mengenai pendidikan Islam maupun agama Islam itu sendiri. Di bawah ini adalah pemahaman dari pandangan Charlene Tan diuraikan sebagai berikut.

1. Para pendidik dan guru di Amerika yang percaya bahwa pendidikan Islam dapat menjadi indoktrinatif melihatnya sebagai proses di mana siswa diberikan pengetahuan dan keyakinan agama tanpa ruang untuk pertanyaan atau keraguan. Mereka merasa bahwa pendidikan Islam cenderung hanya mengajarkan pandangan-pandangan Islam tanpa memberikan perspektif yang lebih luas atau kritis.
2. Guru-guru yang dituduh melakukan indoktrinasi dianggap hanya mengajarkan tentang sejarah Islam, ajaran agama, dan keyakinan tanpa mencakup perbandingan agama atau konteks global yang lebih luas.
3. Beberapa kasus konkret yang disebutkan dalam pandangan ini mencakup contoh-contoh seperti kasus seorang guru di California yang diduga mengajarkan Islam secara tidak kritis atau sekolah-sekolah yang menyediakan stasiun keagamaan Islam untuk siswa.
4. Pandangan ini juga mencakup asosiasi pendidikan Islam dengan radikalisme dan terorisme. Beberapa argumen mengklaim bahwa sekolah Islam dapat menjadi tempat di mana siswa dipengaruhi untuk menerima keyakinan radikal atau bahkan menjadi anggota kelompok teroris.
5. Charlene Tan mencatat perubahan dalam makna konsep "indoktrinasi" dari awalnya hanya merujuk pada pengajaran, menjadi suatu makna yang memiliki konotasi negatif. Ini disebabkan oleh sejarah, terutama pengaruh gerakan pendidikan progresif atau tenaga pendidik di Amerika dan pengalamannya dengan rezim otoriter seperti Nazi dan Komunis yang menggunakan metode-metode brainwashing.
6. Tenaga pendidik di Amerika mengakui kesulitan dalam mendefinisikan indoktrinasi dengan jiktanya. Apakah indoktrinasi berhubungan dengan niat, konten, metode, atau hasil yang diinginkan? Belum ada konsensus mengenai definisi indoktrinasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti memiliki opini akan pandangan Charlene Tan tentang indoktrinasi dalam pendidikan formal dapat mencakup beberapa diantaranya sebagai berikut.

1. Pandangan bahwa pendidikan Islam selalu berasosiasi dengan indoktrinasi yang dapat dianggap sebagai generalisasi atau stereotip

terhadap pendidik dan guru di Amerika yang mengajar pendidikan secara umum. Tidak semua pendidik Islam di dunia melakukan indoktrinasi (Iona, 2016:564). Mencap pendidik atau sekolah Islam secara kolektif sebagai indoktrinatif bisa menciptakan kesan yang tidak adil.

2. Pandangan Charlene Tan didasarkan pada headline berita dan penelitian yang diindikasikan mengaitkan pendidikan Islam dengan indoktrinasi. Kritik mungkin muncul terkait dengan kurangnya data empiris yang mendukung pandangan ini. Apakah pandangan ini didukung oleh bukti konkret yang luas atau hanya berdasarkan beberapa kasus tertentu?
3. Pandangan tentang pendidikan islam selalu berasosiasi dengan indoktrinasi mungkin tidak cukup membedakan antara kasus-kasus individual di mana indoktrinasi mungkin terjadi dan pendekatan pendidikan Islam secara umum. Padahal Indoktrinasi dapat terjadi dalam kasus-kasus ekstrem, tetapi itu tidak selalu mewakili pendekatan pendidikan Islam secara keseluruhan.
4. Pandangan Charlene Tan mengenai perubahan dalam makna "indoktrinasi" dari awalnya hanya merujuk pada pengajaran ke konotasi negatif memunculkan pertanyaan tentang apakah pandangan ini mungkin terlalu berlebihan. Padahal perkembangan konsep ini tidak selalu bersifat negatif dan dapat tergantung pada konteks dan metodenya.
5. Pandangan akan pendidikan islam dan indoktrinasi dapat muncul terkait dengan kesulitan mendefinisikan indoktrinasi. Padahal tanpa definisi yang jelas dan konsensus, mengklaim indoktrinasi dapat menjadi subjektif dan rentan terhadap penyalahgunaan.
6. Sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, harus diarahkan untuk mengajarkan nilai-nilai dan keyakinan agama, tetapi ini tidak selalu harus dianggap sebagai indoktrinasi. Pendidikan agama yang baik harus memungkinkan ruang untuk pemahaman yang lebih nuansa, pertanyaan, dan diskusi.

Penting untuk memahami bahwa pandangan ini adalah refleksi dari opini dan pandangan yang berbeda dalam masyarakat Amerika terkait dengan pendidikan Islam dan agama secara keseluruhan. Kritik terhadap pandangan

Charlene Tan menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks dan nuansa dalam diskusi tentang pendidikan agama dan indoktrinasi.

Indoktrinasi pada Pendidikan Islam Menurut Charlene Tan Indoktrinasi di Pendidikan Formal (Ponpes Islam Al Mukmin)

Charlene Tan mengkritik Pondok Pesantren Islam Al Mukmin (Ngruki) dalam konteks indoktrinasi dalam pendidikan formal. Kritik ini mencakup berbagai aspek:

1. Kurikulum: Tan berpendapat bahwa kurikulum di Ngruki, meskipun sebagian besar mengikuti kurikulum nasional, memiliki konten agama yang kuat yang mendorong tiga keyakinan pengendalian utama. Pertama, siswa diajarkan untuk menolak negara sekuler demi negara Islam. Kedua, mereka dididik untuk meyakini bahwa mereka memiliki kewajiban agama untuk mendirikan negara Islam. Ketiga, siswa diajarkan tentang pentingnya jihad bersenjata dalam mendirikan negara Islam. Keyakinan-keyakinan ini diambil dari teks agama dan didukung oleh pengajar mereka.
2. Kegiatan: Kegiatan ekstrakurikuler di Ngruki, seperti kegiatan di alam terbuka dan jadwal ketat, digunakan untuk memperkuat komitmen ideologis siswa terhadap keyakinan yang diajarkan di sekolah.
3. Kurikulum Tersembunyi: Aspek tersembunyi dari kurikulum di Ngruki mencakup budaya pembelajaran, hubungan guru-siswa, dan pengaruh Abu Bakar Ba'asyir. Di sini, Tan menyoroti bahwa siswa dihimbau untuk tidak mempertanyakan apa yang mereka pelajari, dan hubungan mereka dengan guru-guru mereka ditandai oleh ketaatan tanpa pertanyaan. Ba'asyir memiliki pengaruh yang kuat dan dihormati di Ngruki, yang membantu mempromosikan dan mengukuhkan kondisi totalistik ideologis di sekolah.

Dalam keseluruhan kritiknya, Charlene Tan menyatakan keprihatinannya terhadap cara Ngruki mengkondisikan siswanya ke dalam sebuah ideologi totalistik yang mencakup serangkaian keyakinan kontrol. Keyakinan-kunci tersebut berkaitan dengan penolakan terhadap negara sekuler, pendirian negara Islam, dan advokasi jihad bersenjata. Tan menyoroti berbagai aspek sekolah, termasuk kurikulum, kegiatan, dan kurikulum tersembunyi, yang semuanya berkontribusi pada indoktrinasi siswa, yang Tan anggap sebagai masalah yang perlu diperhatikan. Di sisi lain, untuk

memberikan kritik terhadap pandangan Charlene Tan mengenai indoktrinasi dalam pendidikan formal di Pondok Pesantren Islam Al Mukmin (Ngruki), ada beberapa aspek yang bisa peneliti pertimbangkan. Tan berpendapat bahwa pendidikan di Ngruki bermasalah karena Tan mengkondisikan siswa ke dalam sebuah ideologi totalistik melalui kurikulum, kegiatan, dan kurikulum tersembunyi. Peneliti mengevaluasi satu per satu poin pandangannya.

1. Kurikulum: Tan mengkritik bahwa kurikulum di Ngruki, meskipun sebagian besar mengikuti kurikulum nasional, memiliki kecenderungan agama yang kuat yang mempengaruhi tiga keyakinan pengendalian utama. Kritik pada titik ini bisa ditujukan pada generalisasi Tan terhadap kurikulum berbasis agama. Ada potensi bahwa Tan mungkin tidak mempertimbangkan bagaimana pendidikan agama bisa juga bersifat multidimensional dan tidak selalu mengarah ke indoktrinasi. Selain itu, Tan juga tampaknya tidak membahas apakah ada ruang dalam kurikulum tersebut untuk interpretasi atau diskusi terbuka, yang bisa memengaruhi sejauh mana materi tersebut bersifat indoktrinatif.
2. Kegiatan: Mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang digunakan untuk memperkuat komitmen ideologis, kita bisa menanyakan sejauh mana kegiatan ini benar-benar mempengaruhi pandangan ideologis siswa (Warriner, 2016:495-508). Apakah kegiatan tersebut memang dirancang dengan tujuan indoktrinasi, atau apakah mereka juga memiliki tujuan pendidikan lainnya? Adanya kegiatan ekstrakurikuler dengan nuansa ideologis tidak selalu berarti ada indoktrinasi; itu bisa juga menjadi cara untuk memperdalam pemahaman agama atau moralitas.
3. Kurikulum Tersembunyi: Tan mengangkat poin bahwa ada aspek-aspek tersembunyi dari kurikulum yang berkontribusi pada indoktrinasi. Namun, satu kritik bisa menjadi apakah Tan mempertimbangkan bahwa hal-hal seperti budaya pembelajaran dan hubungan guru-siswa bisa sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti latar belakang sosial ekonomi atau pribadi (Gorski, 2017:65). Oleh karena itu, konklusi mengenai pengaruh guru atau tokoh tertentu bisa jadi terlalu cepat atau generalistik.

Indoktrinasi dalam Pendidikan Non-Formal Kasus Jemaah Islamiyah (JI).

Charlene Tan membahas indoktrinasi dalam pendidikan non-formal dan informal dalam konteks kasus Jemaah Islamiyah (JI). Charlene Tan menyoroti beberapa aspek dalam pandangan mengenai indoktrinasi di JI adalah sebagai berikut.

1. Jaringan Informal Kelompok Muslim: Charlene Tan menekankan bahwa JI mengandalkan jaringan informal dan longgar dari Muslim yang berpemikiran serupa. Jaringan ini dibentuk dan dipertahankan melalui ikatan kekerabatan, lembaga pendidikan, organisasi sosial dan politik, kelompok diskusi kecil, dan media sosial. Jaringan ini melibatkan berbagai teknologi baru seperti situs web yang dilindungi sandi, pesan SMS terenkripsi, surel aman, dan sumber daya audio-visual. Jaringan seperti ini membantu merekrut dan mengindoktrinasi anggota JI.
2. Peran Pendidikan Informal: Charlene Tan menggambarkan bahwa anggota JI sebagian besar direkrut dan diindoktrinasi melalui pesantren Islam, madrasah, kelompok studi Islam, pelatihan militer Islam, medan perang religi, dan lembaga amal Islam. Pendidikan informal ini diyakini lebih kuat dalam menyebarkan ideologi dan merekrut anggota daripada pendidikan formal dan non-formal karena melibatkan pengalaman sehari-hari dan interaksi yang terus-menerus (Gamage et al., 2021:92).
3. Peran Keluarga dan Dukungan Komunitas: Charlene Tan menyoroti peran latar belakang keluarga, ikatan kekerabatan, dan dukungan komunitas dalam menguatkan tradisi indoktrinasi. Banyak anggota JI berasal dari latar belakang agama yang kuat, dan dukungan dari keluarga dan komunitas mereka memperkuat keyakinan mereka dalam indoktrinasi.
4. Pengaruh Konteks Sosial dan Politik: Charlene Tan mengakui bahwa faktor eksternal dan internal memainkan peran penting dalam indoktrinasi JI. Faktor eksternal termasuk dampak negatif globalisasi dan modernisasi pada kehidupan Muslim, sementara faktor internal meliputi ketidakpuasan umum terhadap negara, korupsi, dan degenerasi moral. Keadaan ini memicu beberapa Muslim mencari jawaban dalam agama dan mendukung gagasan tentang negara Islam.

5. Manipulasi Sosial dan Politik: Charlene Tan menunjukkan bahwa JI berhasil memanipulasi faktor sosial dan politik yang mempengaruhi Muslim Indonesia. Mereka menggunakan konteks sosial dan politik yang relevan untuk meyakinkan sesama Muslim menerima keyakinan kontrol tentang konspirasi internal dan perang melawan Muslim.

Dalam analisis Charlene Tan, faktor-faktor ini bersama-sama membentuk tradisi indoktrinasi yang kuat di JI dan mendorong rekrutmen dan penyebaran ideologi radikal di antara anggotanya. Akan tetapi beberapa pandangan peneliti yang mengkritik pandangan Charlene tentang indoktrinasi dalam pendidikan formal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Penekanan pada Pendidikan Formal: Dalam analisis Charlene Tan, pendidikan formal terlihat kurang ditekankan. Meskipun ia mencatat bahwa anggota JI sebagian besar direkrut dan diindoktrinasi melalui pendidikan non-formal dan informal, pendidikan formal juga dapat memainkan peran penting dalam memahami bagaimana indoktrinasi terjadi. Kurangnya fokus pada pendidikan formal mungkin mengabaikan pengaruh sistem pendidikan resmi dalam menanamkan nilai-nilai, ideologi, dan pemahaman agama.
2. Kehati-hatian dalam Generalisasi: Dalam beberapa bagian analisis, terdapat generalisasi yang mungkin terlalu umum. Charlene Tan menggambarkan anggota JI sebagai sebagian besar berasal dari latar belakang agama yang kuat, tetapi hal ini dapat mengaburkan keragaman dan perbedaan individual dalam motivasi dan keyakinan mereka. Dalam konteks pendidikan formal, siswa dapat memiliki beragam pengalaman dan pandangan yang tidak selalu mencerminkan keyakinan radikal.
3. Kurangnya Data Empiris: Dalam pandangan kritis, dapat ditemukan kekurangan data empiris yang mendukung klaim dan temuan yang disajikan oleh Charlene Tan. Data konkret dan studi kasus yang kuat dapat memberikan dasar yang lebih kuat untuk argumennya. Kritik ini mungkin menyoroti perlunya penelitian lanjutan dan analisis yang lebih mendalam.
4. Sikap Terhadap Pendidikan Agama: Charlene Tan menyebutkan bahwa banyak anggota JI berasal dari lingkungan agama yang kuat, tetapi pandangan kritis mungkin menyoroti bahwa pendidikan agama itu sendiri tidak selalu mengarah pada radikalisasi. Penting untuk

membedakan antara pendidikan agama yang inklusif dan pendidikan yang menggalakkan radikalisasi.

Tradisi Pendidikan Islam

Charlene Tan dalam tulisannya membahas pandangan dan kritiknya tentang indoktrinasi dalam pendidikan Islam, khususnya dalam konteks masa lalu dan saat ini. Dia menguraikan gagasan tentang tradisi Muslim yang edukatif, yang berbeda dengan indoktrinasi, dan menguraikan tiga keyakinan pengendali (control beliefs) dalam konteks Muslim, yaitu pluralisme, rasionalitas kuat, dan otonomi kuat. Berikut ini adalah pandangan dan kritik Charlene Tan tentang pengendalian kepercayaan ini dalam konteks pendidikan Islam:

1. **Pluralisme:** Charlene Tan menyoroti pentingnya pluralisme dalam tradisi Muslim edukatif. Dia menyatakan bahwa pluralisme berarti tidak memaksakan pandangan bahwa satu tradisi Muslim memiliki monopoli kebenaran. Sebaliknya, tradisi Muslim yang pluralis terbuka terhadap alternatif dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan tempat. Pandangan ini bertentangan dengan sikap yang mengutuk tradisi lain (Muslim dan non-Muslim) dan lebih mendukung dialog dan pemahaman. Charlene Tan mengutip berbagai Ahli Muslim yang telah mempromosikan pluralisme, baik dalam konteks politik, sosial, maupun agama. Ini adalah pendekatan yang mendukung kerukunan antarumat beragama dan mempromosikan pemahaman antar-tradisi yang berbeda.
2. **Rasionalitas Kuat:** Dalam konteks rasionalitas, Charlene Tan menjelaskan pentingnya pengembangan pikiran kritis dalam pendidikan Islam. Ia menyatakan bahwa pelajar Muslim harus dilengkapi dengan alat-alat intelektual untuk bertanya, berpikir, dan mempertanyakan, apa yang telah mereka pelajari. Rasionalitas kuat ini memungkinkan mereka untuk mencari justifikasi bukti atas keyakinan mereka dan membandingkan pandangan mereka dengan pandangan alternatif. Ini adalah pendekatan yang mendorong pelajar untuk memahami dan membenarkan keyakinan mereka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari dalam maupun luar tradisi mereka.
3. **Otonomi Kuat:** Charlene Tan menjelaskan bahwa nilai otonomi kuat dalam pendidikan Islam berhubungan dengan keyakinan bahwa Muslim memiliki peran sebagai khalifah atau utusan Allah S.W.T di dunia. Otonomi kuat ini mengacu pada pengembangan kemampuan

individu untuk membuat pilihan mereka sendiri dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan refleksi kritis terhadap tradisi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menentukan identitas mereka sendiri dan tujuan hidup mereka. Charlene Tan menekankan bahwa pendidikan Islam harus membantu para pelajar untuk menjadi mandiri dalam mengelola kebebasan mereka.

Charlene Tan berargumen bahwa pengendalian kepercayaan ini penting dalam membentuk tradisi Muslim edukatif yang terbuka dan mencegah indoktrinasi. Pandangan ini mengarahkan pelajar untuk menjadi individu yang lebih toleran, rasional, dan otonom. Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan generasi Muslim yang mampu berpikir kritis, toleran terhadap perbedaan, dan mampu menjalin hubungan harmonis dengan orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Pandangan Charlene Tan tentang indoktrinasi dalam pendidikan Islam yang mencakup elemen-elemen seperti pluralisme, rasionalitas kuat, dan otonomi kuat memiliki sejumlah kelebihan yang dapat membantu meminimalkan risiko indoktrinasi dan mempromosikan pendidikan yang lebih inklusif dan kritis.

Implikasi dan Relevansi Indoktrinasi Pendidikan Islam di Indonesia

Indoktrinasi dalam pendidikan Islam di Indonesia memiliki implikasi dan relevansi yang signifikan. Terlebih dalam konteks Indonesia, yang memiliki populasi muslim yang besar, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam pembentukan nilai, keyakinan, dan identitas masyarakat. Implikasi dan relevansi indoktrinasi dalam pendidikan Islam yaitu dalam konteks positif, pendidikan Islam yang baik dapat menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama Islam yang mendorong kedamaian, toleransi, dan kemanusiaan. Hal ini merupakan bentuk relevansi positif yang dapat membantu membangun masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip agama yang menghargai persatuan dan keragaman. Namun, pendidikan Islam juga dapat memiliki implikasi negatif jika digunakan sebagai alat untuk indoktrinasi ideologi ekstrem atau radikal. Terdapat risiko bahwa pendidikan Islam yang ekstrem dapat mempengaruhi generasi muda dengan keyakinan yang menantang kerukunan sosial dan stabilitas negara (Abdullah, 2017:396). Hal ini mengingatkan potensi penggunaan pendidikan Islam sebagai alat untuk mempromosikan pandangan sempit atau radikal yang tidak selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Relevansi indoktrinasi

dalam pendidikan Islam juga terlihat dalam konteks hubungan antara pendidikan dan konflik. Terdapat kasus di mana pendidikan Islam yang indoktrinatif telah dikaitkan dengan konflik antar-agama dan terorisme. Ini adalah relevansi yang sangat signifikan, karena pendidikan yang mendorong radikalisasi dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas sosial. Dalam menghadapi implikasi dan relevansi indoktrinasi dalam pendidikan Islam di Indonesia, penting untuk mempromosikan pendekatan yang seimbang. Pendidikan Islam harus mendorong pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama, nilai-nilai kemanusiaan, dan menghormati pluralisme. Pendidikan harus memungkinkan siswa untuk berpikir kritis, mempertanyakan, dan memahami perspektif yang berbeda. Selain itu, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu memonitor kurikulum dan metode pengajaran untuk memastikan bahwa tidak ada penyebaran ajaran ekstrem atau radikal yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas sosial.

Ilustrasi Dampak Potensial

Pondok Pesantren Al-Zaytun telah menjadi sorotan yang dan memiliki potensi adanya indoktrinasi dalam konteks pendidikan Islam terhadap santrinya di awal tahun 2023. Kasus ini disebut sebagai indoktrinasi pendidikan Islam karena menunjukkan penyimpangan praktik keagamaan dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih umum dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu ahlussunnah waljamaah atau ahli tafsir, hadis serta fikih. Dalam konteks pluralisme agama, praktik-praktik yang berbeda ini dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok agama umumnya di masyarakat. Pengenalan ajaran yang tidak konsisten dengan mayoritas umat Islam bisa memicu ketidaksetujuan dan konflik dengan orang-orang yang memahami agama Islam dengan cara yang berbeda. Ini bisa merusak kerukunan antar-agama dan mengancam pluralisme agama yang telah lama menjadi ciri khas Indonesia. Dari segi rasionalitas, praktik-praktik yang menyimpang seperti mengubah bunyi syahadat, menganggap negara selain Islam sebagai kafir, atau tidak mewajibkan salat, menunjukkan ketidakrasionalan dalam penafsiran agama. Ini menciptakan potensi bagi santri dan lulusannya untuk memiliki pemahaman yang sesat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai rasional dalam agama Islam. Rasionalitas adalah prinsip yang penting dalam mendekati agama secara kritis dan ilmiah.

Strong autonomy dalam pendidikan Islam penting agar siswa memiliki kebebasan berpikir dan pertanyaan kritis tentang ajaran agama mereka. Indoktrinasi pendidikan Islam yang ketat, seperti yang terlihat dalam kasus Al-Zaytun, dapat membatasi kemampuan siswa untuk berpikir secara independen dan mempertanyakan apa yang mereka pelajari. Ini adalah tantangan serius dalam memastikan bahwa siswa memiliki otonomi kuat untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang agama dan moralitas. Oleh karena itu, kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan harus mempromosikan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, menghormati pluralisme, dan memberikan otonomi yang cukup untuk siswa agar mereka dapat berpikir secara kritis dan independen. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memantau kurikulum dan metode pengajaran dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam agar memastikan bahwa ajaran ekstrem atau sesat tidak disebarluaskan, yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas sosial di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan terkait pemahaman dan mengkritisi definisi serta praktik indoktrinasi dalam pendidikan Islam, dengan fokus pada pandangan Charlene Tan, adalah bahwa indoktrinasi dalam pendidikan Islam bisa menjadi masalah yang kompleks dan perlu diperhatikan dengan cermat. Dalam pandangan Charlene Tan, pendekatan yang berfokus pada pluralisme, rasionalitas kuat, dan otonomi kuat dapat membantu mengurangi risiko indoktrinasi dan menciptakan pendidikan Islam yang lebih inklusif, kritis, dan toleran. Namun, pendekatan ini juga dapat mendapatkan kritik, termasuk kekhawatiran terkait kesulitan dalam implementasi dan potensi miskonsepsi.

Dalam konteks kasus pesantren Al-Zaytun, isu indoktrinasi dalam pendidikan Islam dapat dianggap relevan dan signifikan, terutama jika ada tanda-tanda praktik pendidikan yang membatasi pluralisme, mengabaikan rasionalitas kuat, atau mengurangi otonomi individu. Saran terkait isu indoktrinasi dalam pendidikan Islam adalah perlunya penelitian yang lebih mendalam dan analisis yang komprehensif untuk memahami secara lebih baik dampak praktik pendidikan Islam terhadap siswa dan masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam dapat memanfaatkan saran dan pandangan dari

berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan kelompok masyarakat, untuk terus meningkatkan kualitas dan inklusivitas pendidikan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects for the world community. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 391-426.
- Aldegether, R. (2020). Saudi Arabia's Vision 2030: Approaches to multicultural education and training. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(8), 92-102.
- Alkouatli, C. (2018). Pedagogies in becoming Muslim: Contemporary insights from Islamic traditions on teaching, learning, and developing. *Religions*, 9(11), 367.
- Anderson, J. (2021). *Understanding cultural geography: Places and traces*. New York NY: Routledge.
- Croce, M. (2019). Exemplarism in moral education: Problems with applicability and indoctrination. *Journal of Moral Education*, 48(3), 291-302.
- Ezzani, M., & Brooks, M. (2019). Culturally relevant leadership: Advancing critical consciousness in American Muslim students. *Educational Administration Quarterly*, 55(5), 781-811.
- Gamage, K. A., Dehideniya, D. M. S. C. P. K., & Ekanayake, S. Y. (2021). The role of personal values in learning approaches and student achievements. *Behavioral sciences*, 11(7), 102.
- Gorski, P. C. (2016). Poverty and the ideological imperative: A call to unhook from deficit and grit ideology and to strive for structural ideology in teacher education. *Journal of Education for Teaching*, 42(4), 378-386.
- Hábl, J. (2017). The problem of indoctrination, with a focus on moral education. *Ethics & Bioethics*, 7(3-4), 187-198.
- Hansson, L. (2018). *Science education, indoctrination, and the hidden curriculum. History, philosophy and science teaching: New perspectives*. New York NY: Springer.
- Ioana, I., & Cracsner, C. (2016). Education vs. indoctrination. *Scientific Research and Education in the Air Force*, 2, 561-574.

- Keller, J. A. A. (2023). *George S. Counts on the Role of Indoctrination in Education: An Exegesis*. Dissertation. Georgia State University
- Richter, E. D., Markus, D. K., & Tait, C. (2018). Incitement, genocide, genocidal terror, and the upstream role of indoctrination: can epidemiologic models predict and prevent?. *Public Health Reviews*, 39(1), 1-22.
- Robinson, P. H., & Holcomb, L. (2020). Indoctrination and Social Influence as a Defense to Crime: Are We Responsible for Who We Are?. *Mulawarman Law Review*, 85, 739.
- Supriadi, U., Romli, U., Islamy, M. R. F., Parhan, M., & Budiyanti, N. (2021). The Role of Islamic Education Teachers in Preventing Radicalism at Madrasa Aliyah. *Nazhbruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 74-90.
- Suyanto, B., Sirry, M. I., & Sugihartati, R. (2022). Pseudo-radicalism and the de-radicalization of educated youth in Indonesia. *Studies in Conflict & Terrorism*, 45(2), 153-172.
- Tambak, S. (2021). The method of counteracting radicalism in schools: Tracing the role of Islamic religious education teachers in learning. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 45(1), 104-126.
- Tan, C. (2011). *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia*. Oxon: Routledge.
- Warriner, D. S. (2016). 'Here, without English, you are dead': ideologies of language and discourses of neoliberalism in adult English language learning. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 37(5), 495-508.
- Zhang, C., & Fagan, C. (2016). Examining the role of ideological and political education on university students' civic perceptions and civic participation in Mainland China: Some hints from contemporary citizenship theory. *Citizenship, Social and Economics Education*, 15(2), 117-142.

TENTANG PENULIS



Misbahuddin Lahir di Tangerang Pada 29 September 1993. Keseharian mengajar dan mengelola pondok pesantren, memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam (M.Pd) pada program Pasca sarjana UIN SMH Banten pada tahun 2022. Saat ini sedang menempuh Program Doktorat di bidang Pendidikan Agama Islam di kampus yang sama.



Ofik Taufiqurrohman lahir di Serang pada 27 Desember 1979. Aktivitas keseharian sebagai tenaga pengajar di Institut Agama Islam Banten (IAIB) Serang dan di Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Pontang. Menempuh pendidikan Strata Satu di prodi PAI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada jurusan Teknologi Pembelajaran program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2011. Saat ini sedang menempuh Program Doktorat di bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA DAN MALAYSIA: PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM

Fatrilia Rasyi Radita

Universitas Insan Pembangunan Indonesia

aliyahabullah@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi sistem pendidikan Islam di berbagai negara, baik yang berpenduduk mayoritas muslim dan non-muslim mempunyai corak serta sistem yang satu dengan yang lainnya terkadang terdapat perbedaan. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam berbeda nuansanya dengan negara yang relatif berimbang. Sudah dapat dicerna bahwa perbedaan dalam suatu negara pasti ada, walaupun bentuk perbedaan itu ada yang mencolok perbedaannya ada yang hampir tidak kelihatan. Pendidikan Islam bisa berarti proses atau lembaga. Sebagai proses, pendidikan Islam merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik menuju terbentuknya pribadi muslim sempurna melalui upaya pengarahan, pengajaran, pelatihan, pemberian contoh, bimbingan, pengasuhan dan pengawasan secara islami. Sedangkan sebagai lembaga, pendidikan Islam merupakan lembaga pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya dilandasi nilai-nilai Islam dan untuk mewujudkan cita-cita islami (Susanto, 2015)

Pendidikan memenuhi tujuan studi banding hanya jika dikaitkan dengan masyarakat dan negaranya. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai upaya mengembangkan potensi peserta didik, tetapi juga dilihat dari hubungannya dengan individu, masyarakat dan negaranya. Setiap orang memiliki konsep yang berbeda tentang tujuan pendidikan yang ingin mereka capai, yang belum tentu disepakati oleh masyarakat luas lainnya. Oleh karena itu, setiap teori pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Namun, bukan berarti suatu masyarakat atau negara harus menolak konsep pendidikan orang lain atau mengabaikan komponen serupa dalam teori pendidikan orang lain (Asmawati Suhid dkk , 2015)

Demikian pula, pendidikan Islam suatu negara merupakan cerminan dari filosofi dan media sosial yang membawa serta filosofi Islam negara tersebut. Tentu saja, mungkin ada kesamaan dalam keberadaan dan implementasi pendidikan Islam di beberapa negara. Namun, karena adanya perbedaan budaya, politik, masyarakat, ekonomi, dan latar belakang lembaga pendidikan, serta aliran pemikiran yang dianut umat Islam, lembaga pendidikan tentu akan dibedakan satu sama lain (M. Y. A Bakar , 2015)

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang berasal dari satu keluarga dan keduanya merupakan anggota ASEAN. Indonesia yang berprinsip Pancasila dan mayoritas penduduknya beragama Islam, serta Malaysia yang telah menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, menyelenggarakan pendidikan Islam di lembaga-lembaga pendidikannya dan juga memeliharanya dalam konstitusinya (Lubis Aqsha dkk, 2015)

Dalam konsep sistem pendidikan nasional terdapat satu bagian yang integral, yakni pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan satu subsistem dari sistem pendidikan nasional yang tidak dapat dilepaskan dalam memahami keseluruhan perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Sebab pendidikan Islam tidak saja tampil sebagai pelengkap dalam perjalanan pendidikan nasional, tetapi memberi warna bahkan memberi landasan dan menentukan arah tujuan pendidikan nasional (Haryanto,2015)

Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan perbandingan pendidikan Islam diajarkan di Indonesia dimana Pancasila sebagai prinsip negara yang secara resmi mengakui enam agama yaitu: Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Sedangkan Malaysia sebagai negara federal kerajaan hanya mengakui Islam sebagai agama resmi negara. Oleh karena itu, penelitian ini cukup signifikan untuk mengetahui perbandingan dan implementasi pendidikan Islam di kedua negara .

PEMBAHASAN

Perbandingan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Malaysia

A. Pendidikan islam di Indonesia

Usia Pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan selama dan seiring dengan umur kemerdekaan negara Indonesia, hal ini karena dalam fakta sejarah disebutkan bahwa ‘benih-benih’ dari pendidikan Islam adalah munculnya semangat untuk merdeka. Benih-benih nasionalisme muncul dari lembaga pendidikan Islam waktu itu, dari pesantren, surau dan masjid, sehingga sangat

logis apabila kolonial sangat mengekang keberadaan lembaga Pendidikan Islam waktu itu .

Keberadaan pendidikan Islam, tentu tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraannya pada masa lampau. Pendidikan Islam pada periode awal [masa Nabi Saw] tampak bahwa usaha pewarisan nilai-nilai diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia agar terbebas dari belenggu akidah sesat yang dianut oleh sekelompok masyarakat elite Quraisy yang mempertahankan status quo, melestarikan kekuasaan, dan menindas orang-orang miskin. Gagasan yang dibawa Nabi Saw dalam proses pendidikan tersebut adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai keimanan baik secara individual maupun kolektif, dengan tujuan mengikis habis segala kepercayaan jahiliyah pada saat itu. Secara meyakinkan, pendidikan Nabi dinilai berhasil dan dengan pengorbanan yang besar, tradisi dan kepercayaan jahiliyah berangsur-angsur dapat dibersihkan dari jiwa mereka, dan kemudian menjadikan tauhid sebagai landasan moral dalam kehidupan (Hafsah,2014)

Memahami pendidikan nasional Indonesia tidak boleh melupakan peran lembaga pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang lentur dan berbasis kultur nasional yang masih asli (indigenous). Dalam sistem pendidikan nasional, pondok pesantren semula sebagai alternatif lembaga pendidikan disamping sistem pendidikan klasikal yg diselenggarakan Belanda. Namun pada akhirnya pesantren menunjukkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan pribadi-pribadi mandiri yang tak kenal kompromi dengan penjajah. Pada perkembangan selanjutnya, pondok pesantren tetap mencetak para lulusan yang mandiri dan mampu berkompetisi secara realistis, yaitu dapat berlomba dalam berusaha dan bekerja (Endang Komara ,2016)

Pendidikan Islam dalam teori dan praktik selalu mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena pendidikan Islam secara teoretik memiliki dasar dan sumber rujukan yang tidak hanya berasal dari nalar, melainkan juga berasal dari wahyu. Kombinasi nalar dan wahyu ini ideal, karena memadukan antara potensi akal manusia dan tuntunan firman Allah terkait dengan masalah pendidikan. Kombinasi ini menjadi ciri khas pendidikan Islam yang tidak dimiliki oleh konsep pendidikan pada umumnya yang hanya mengandalkan kekuatan akal dan budaya manusia (Abd. Rachman Assegaf , 2013)

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhsuburkan hubungan

harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Pribadi-pribadi hasil proses pendidikan Islam adalah yang mampu mengemban amanat sebagai khalifah di muka bumi, yang dapat memelihara dan memanfaatkan alam untuk mendatangkan kemaslahatan bagi sesama manusia (Haidar Putra Daulay , 2013)

Melihat kenyataan ini, dunia pendidikan Islam khususnya di Indonesia perlu mendapat perhatian serius, hal ini karena adanya keterkaitan pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Oleh karena itu perlu terobosan model dan strategi dalam pendidikan Islam sehingga relevan dengan tuntutan zaman. Upaya kreatif dan inovatif pengembangan pendidikan Islam di Indonesia akan memberikan hasil: Pertama, pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia akan mendapat dukungan dan citra positif. Kedua, pendidikan Islam dapat memberikan sumbangan dan alternatif bagi pembenahan Sistem Pendidikan Nasional dengan segala keunggulan dan problematikanya Ketiga, sistem pendidikan Islam akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan kemasyarakatan (Suyata, 1992).

Ahmad Tafsir, mengutip Al-Syaibani tentang menjabarkan tujuan pendidikan Islam, sebagai berikut :

1. Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan akhirat.
2. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat.
3. Tujuan professional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi dan sebagai kegiatan masyarakat.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pendidikan harus bersumber kepada Al-Quran dan hadits, karena akan membentuk manusia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., dan untuk memelihara nilai-nilai kehidupan sesama manusia agar menjalankan seluruh kehidupannya, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan Rasul- Nya.

B. Filosofis dan Tujuan Pendidikan Islam

Filosofis pendidikan Islam adalah bagian dari ilmu filsafat, maka dalam mempelajari filsafat terlebih dahulu harus memahami tentang pengertian

filsafat terutama dalam hubungannya dengan masalah pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata *filosofia* yang berarti cinta, dan kata *sophos* yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap Ilmu dan hikmah Filsafat pendidikan pada umumnya dan filsafat pendidikan Islam khususnya, adalah bagian dari ilmu filsafat, maka dalam mempelajari filsafat itu harus memahami terlebih dahulu definisi atau pengertian filsafat terutama dalam hubungannya dengan masalah pendidikan (Abududin Nata,2005)

Tujuan pendidikan Islam harus sesuai dengan tujuan hidup dan diarahkan untuk mencapai tujuan hidup muslim yang terangkum dalam do'a yang selalu dibacanya setiap kali melakukan shalat, yang juga merupakan ikrar kepada Allah bahwa shalatnya, ibadahnya, hidup dan matinya semata-mata hanya bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Dengan demikian tujuan hidup seorang muslim secara vertical adalah keridhaan Allah dan secara horizontal adalah rahmat bagi alam semesta. Tujuan hidup muslim ini adalah juga tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan kembali oleh empat ratus sarjana dan pemikir muslim yang datang dari berbagai penjuru dunia dalam Konferensi Pendidikan Islam sedunia di Mekkah (1977) sebagaimana disebutkan di atas.

Tujuan pendidikan Islam yang selaras dengan tujuan hidup muslim, seperti dikemukakan tadi, memungkinkan manusia muslim memahami kedudukannya sebagai hamba Allah, melaksanakan tugas hidupnya untuk beribadah semata-mata kepada Allah, yakni mengabdikan, melaksanakan pengabdianannya hanya kepada Allah saja, baik dalam arti khusus, maupun luas.

Tujuan pendidikan Islam di atas, diharapkan juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan dalam diri manusia empat rasa tanggung jawab, yaitu: (1) tanggung jawab kepada Allah, (2) tanggung jawab kepada hati nuraninya sendiri, (3) tanggung jawab kepada masyarakat, dan (4) tanggung jawab memelihara semua yang terdapat di langit dan di bumi serta apa yang ada di antaranya sebagai anugerah Tuhan kepada manusia, termasuk harta yang dimilikinya untuk kemanfaatan manusia dan alam lingkungan hidupnya.

Pendidikan harus mampu mengalihkan dan menanamkan aspirasi dan idealism masyarakat kedalam jiwa generasi penerus. Maka pendidikan harus menggali dan memahaminya melalui pemikiran filosofis secara menyeluruh terutama tentang problema pendidikan. Dengan demikian terlihat jelas bahwa filsafat pendidikan adalah filsafat yang memikirkan tentang masalah kependidikan. Oleh karena ada kaitan dengan pendidikan, maka filsafat diartikan sebagai teori pendidikan dalam semua tingkat. Filsafat mengkaji dan

memikirkan tentang hakikat segala sesuatu secara menyeluruh, sistematis, terpadu, universal dan radikal yang hasilnya menjadi pedoman dan arah bagi perkembangan ilmu-ilmu yang bersangkutan (Ahmad Tafsir,2014)

Pendidikan selalu diwarnai oleh pandangan hidup (*way of life*). Diantara pandangan hidup ialah rasionalisme ialah faham yang mengatakan bahwa kebenaran diperoleh melalui akal dan diukur dengan akal. Akal itulah alat pencari dan pengukur kebenaran. Maka filosofis pendidikan sangat penting karena dalam proses pendidikan kebenaran menjadi tujuan.

Pendidikan yang benar adalah memberikan kesempatan kepada keterbukaan terhadap pengaruh dari dunia luar dan perkembangan dari dalam diri anak didik. Dengan demikian barulah fitrah itu diberi hak untuk membentuk pribadi anak dan dalam waktu yang bersamaan faktor dari luar akan mendidik dan mengarahkan kemampuan dasar (fitrah) anak (Ahmad Sastra,2014)

Sistem Pendidikan di Indonesia

Pada awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim. Sambil berdagang mereka menyiarkan agama Islam kepada orang-orang yang mengelilinginya yaitu mereka yang membeli barang-barang dagangannya. Begitulah setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan ajaran Islam. Didikan dan ajaran Islam mereka berikan dengan perbuatan, dengan contoh dan tiru teladan. Mereka berlaku sopan santun, ramah tamah, tulus ikhlas, amanah dan kepercayaan, pengasih dan pemurah, jujur dan adil, menepati janji serta menghormati adat istiadat anak negeri. Dengan demikian tertariklah penduduk negeri hendak memeluk agama Islam

Begitulah para pengajar agama Islam pada waktu itu melaksanakan penyiaran Islam kapan saja, dimana saja dan siapa saja setiap ada kesempatan, di pinggir kali sambil menunggu perahu yang akan mengangkut barang ke seberang, di perjamuan, di padang rumput, di pasar, di warung kopi dan sebagainya. Disitulah agama Islam diajarkan dan didikkan kepada mereka dengan cara yang mudah dan dengan demikian orang akan dengan mudah pula menerima dan melakukannya.

Adapun faktor-faktor mengapa agama Islam dapat tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia pada waktu itu adalah sebagai berikut :

- a) Agama Islam tidak sempit dan tidak berat melakukan aturan-aturannya, bahkan mudah dituruti oleh segala golongan umat manusia, bahkan untuk masuk Islam cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja.
- b) Sedikit tugas dan kewajiban dalam Islam.
- c) Penyiaran Islam itu dilakukan dengan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit.
- d) Penyiaran Islam dilakukan dengan cara kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya.
- e) Penyiaran Islam itu dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami umum, dapat dimengerti oleh golongan bawah sampai ke golongan atas dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang maksudnya: berbicaralah kamu dengan manusia menurut kadar akal mereka.

Sistem pendidikan Islam informal ini, terutama yang berjalan dalam lingkungan keluargasudah di akui keampuhannya dalam menanam sendi-sendi agama dalam jiwa anak-anak. Anak-anak dididik dengan ajaran-ajaran agama sejak kecil dalam keluarganya. Mereka dibiasakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan didahului membaca basmallah. Mereka dilatih membaca Al-Qur'an, melakukan salat dengan berjama'ah, berpuasa di bula Ramadhan dan lain-lain.

Usaha-usaha pendidikan agama di masyarakat yang kelak dikenal dengan pendidikan non-fornal, ternyata mampu menyediakan kondisi yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan pendidikan Islam dan memberi motivasi yang kuat bagi umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang lebih baik dan lebih sempurna.

Di pusat-pusat pendidikan seperti ini, di surau, langgar, masjid atau bahkan di serambi rumah sang gur, berkumpul sejumlah murid, besar dan kecil, duduk di lantai, menghadapi sang guru, belajar mengaji. Waktu mengajar biasanya diberikan pada waktu petang atau malam hari, sebab pada waktu siangnya anak-anak membantu orang tuanya bekerja, sedangkan sang guru juga bekerja mencari nafkah keluarganya sendiri. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama pada anak-anak ini tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari, baik bagi orangtua anak-anak maupun bagi sang guru agama. Itulah sebabnya, pelajaran agama dan latihan beragama itu mendapat dukungan dari orang tua dan guru malahan dari seluruh masyaral kampung atau desa itu.

Tempat-tempat pendidikan Islam seperti inilah yang menjadi embrio terbentuknya sistem pendidikan pondok pesantren dan pendidikan Islam yang formal yang berbentuk madrasah atau sekolah yang bersandar keagamaan.

Pondok pesantren ini tumbuh sebagai perwujudan dari strategi umat Islam untuk mempertahankan eksistensinya terhadap pengaruh penjajahan Barat dan akibat surau atau langgar atau masjid tempat diselenggarakannya pendidikan agama ini tidak lagi dapat menampung jumlah anak-anak yang ingin mengaji. Di samping itu juga didorong oleh keinginan untuk lebih mengintensifkan pendidikan agama pada anak-anak. Maka sang guru dengan bantuan masyarakat memperluas bangunan disekitar surau, langgar atau masjid untuk tempat mengaji dan sekaligus sebagai asrama bagi anak-anak. Dengan begitu anak-anak tak perlu bolak-balik pulang ke rumah orangtua mereka. Anak-anak menetap tinggal bersama sang guru di tempat tersebut. Tempat mengaji seperti ini disebut Pondok Pesantren

Sesuai dengan namanya, maka pondok berarti tempat menginap (asrama), dan pesantren berarti tempat para santri mengaji agama Islam. Jadi Pondok Pesantren adalah tempat murid-murid (disebut santri) mengaji agama Islam dan sekaligus di asramakan di tempat itu. Murid-muridnya yang tinggal di pondok pesantren itu bermacam-macam sebagai satu keluarga di bawah pimpinan gurunya. Mereka belajar hidup sendiri, mencuci sendiri dan mengurus hal ikhwalnya sendiri. Bahan-bahan keperluan hidup seperti beras dan sebagainya mereka bawa dari kampung sendiri. Sistem pendidikan pada pondok pesantren ini masih sama seperti sistem pendidikan di surau, langgar atau masjid, hanya lebih intensif dan dalam waktu yang lebih lama.

Di pondok pesantren, murid-murid, besar dan kecil duduk melingkar (halakah) mengelilingi sang guru. Mereka menerima pelajaran yang sama. Tiada dirancangan sebuah kurikulum tertentu berdasarkan umur, lama belajar atau tingkat pengetahuan. Terserahlah kepada murid untuk memilih bidang pengetahuan apa yang akan mereka pelajari dan pada tingkat pelajaran mana mereka ingin memulai.

Seorang murid yang baru masuk di pondok pesantren, tidak secara langsung belajar pada sang gur di pondok pesantren itu, kecuali bila dia memang telah sanggup. Biasanya murid baru, belajar lebih dahulu pada asisten sang guru tersebut, yaitu seorang pelajar yang telah jauh kajiannya, yang disebut guru bantu atau badal. Bila murid telah dapat membaca dan dapat memahami ala kadarnya kitab, barulah dia menyertai kelompok yang langsung mengaji pada sang guru pesantren tersebut.

Usaha untuk menyelenggarakan pendidikan Islam menurut rencana yang teratur sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1476 dengan berdirinya Bayangkara Islah di Bintara Demak yang ternyata merupakan organisasi

pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Dalam rencana kerja dari Bayangkara Iслаh disebutkan antara lain:

- 1) Tanah Jawa-Madura dibagi atas beberapa bagian untuk lapangan pekerjaan bagi pendidikan dan pengajaran. Pimpinan pekerjaan di tiap-tiap bagian dikepalai oleh seorang wali dan seorang pembantu (badal)
- 2) Para wali dan para badal, selain harus pandai dalam ilmu agama, harus pula memelihara budi pekerti diri sendiri dan berakhlak mulia, supaya menjadi suri teladan bagi masyarakat sekelilingnya.
- 3) Supaya mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat maka didikan dan ajaran Islam harus diberikan dengan melalui jalan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat itu asal tidak menyalahi hukum syara'
- 4) Di Bintara harus segera didirikan sebuah masjid agung untuk menjadi sumber ilmu dan pusat kegiatan usaha pendidikan dan pengajaran Islam.

Sistem pendidikan agama Islam mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Sejalan dengan itu pemerintahan jajahan (Belanda) mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur yang mulai menarik kaum muslimin untuk memasukinya. Oleh karena itu sistem pendidikan Islam di surau, langgar atau masjid atau tempat lain yang semacamnya, di pandang sudah tidak memadai lagi dan perlu di perbaharui dan disempurnakan.

Realisasi dari keinginan-keinginan itu di perkuat adanya kenyataan bahwa penyelenggaraan pendidikan menurut sistem sekolah seperti sistem Barat akan memberi hasil yang lebih baik. Justru itulah mulai diadakan usaha-usaha untuk menyempurnakan sistem pendidikan Islam yang ada. Pendidikan Islam di surau, langgar, masjid atau tempat-tempat lainnya yang semacamnya disempurnakan menjadi madrasah pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang berdasarkan keagamaan.

Demikianlah sistem pendidikan formal, sekolah atau madrasah, mulai tersebar di mana-mana, bahkan di kalangan pondok pesantren sudah diterapkan pula sistem sekolah atau madrasah ini, di samping sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren yang sudah ada. Dalam perkembangannya sitem madrasah ini dibedakan menjadi dua macam yaitu madrasah yang khusus memberi pendidikan dan pengajaran agama disebut Madrasah Diniyah, dan madrasah di samping memberikan pendidikan dan pengajaran agama juga memberi pelajaran umum. Untuk tingkat dasar disebut Madrasah Ibtida'iyah, untuk tingkat menengah pertama disebut Madrasah Tsanawiyah dan untuk tingkat menengah atas disebut Madrasah Aliyah. Sejalan

dengan makin meningkatnya akan kebutuhan pendidikan dan pengajaran agama Islam, maka muncul pula lembaga-lembaga pendidikan formal yang berdasarkan keagamaan, di mana pendidikan agama merupakan program yang pokok, misalnya SMP Islam, SKP Islam, SPG Islam dan sebagainya.

Demikian pula setelah kita berhasil merebut kemerdekaan dan kita telah merdeka, pemerintah Indonesia pun sangat memperhatikan tumbuhnya pendidikan agama Islam. Dalam hal ini Pendidikan agama Islam dijadikan salah satu bidang studi yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Dan pada waktu ini semua lembaga-lembaga pendidikan agama, baik formal, informal dan non formal berjalan dan berkembang terus, dan khusus mengenai pendidikan agama di sekolah, MPR menetapkan dalam GBHN bahwa pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah sejak dari sekolah dasar sampai Universitas.

E. Gambaran Singkat Negara Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus 1957 dari tangan Inggris dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1963 negara federal diubah menjadi Malaysia, termasuk di dalamnya Sabah, Sarawak, dan Singapura. Dua tahun berikutnya, Singapura terpisah dari Malaysia, dan Malaysia memiliki 13 negara bagian yang disebut negeri dan tiga wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh pemerintah federal di bawah kekuasaan perdana menteri. Ke tiga belas negara tersebut adalah: Kelantan, Trengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak. Sementara tiga wilayah persekutuan adalah: Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya. Tujuan dibentuknya wilayah persekutuan adalah untuk menjadi pusat pemerintahan Malaysia. Dari ketiga wilayah persekutuan ini, Kuala Lumpur merupakan ibu kota persekutuan, Labuan merupakan pusat perniagaan dan kewangan antarabangsa (IBFC), dan Putrajaya merupakan pusat pemerintahan persekutuan. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja dengan gelar ‘*Yang dipertuan Agung*’. Pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang membentuk kabinet (Haidar Putra Daulay , 2014)

Malaysia merupakan kerajaan federal yang terdiri dari tiga belas negara bagian yang meliputi daerah semenanjung Malaka, yakni Johor, Malak, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Trengganu, Kelantan, Penang, Kedah, dan Perlis yang terletak di Malaysia Barat Dan Malaysia Timur yang terdiri Sabah

dan Serawak yang terletak di Kalimantan bagian utara. Federasi ini terbentuk pada tanggal 16 September 1963. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja dengan gelar “Yang Dipertuan Agung”. Pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang berhak membentuk Kabinet (Rahman Haji , 1997).

Jika dilihat dari sejarah, maka kedatangan Islam dan proses Islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan *muballig* dari Arab dan Gujarat. Proses Islamisasi ini berjalan baik dengan berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Semenanjung Malaka yaitu kerajaan Islam Kalantan (pertengahan abad ke-12). Pada abad ke-15 kerajaan Islam Malaka berdiri dengan rajanya yang pertama adalah Parameswara Iskandar Syah, yang memeluk islam pada tahun 1414 M dengan gelar Sultan Muhammad Syah. Kerajaan ini tercatat sebagai kerajaan pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang tertulis yang disebut dengan “Undang-Undang Malaka”.

Sejak tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual. Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Malaysia tampil di pentas dunia internasional dengan nuansa serta simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangan banyak diwarnai oleh jiwa keislaman

Malaysia menuguhkan suatu pengalaman Islami yang unik. Malaysia adalah sebuah masyarakat multietnik dan multiagama, namun mempunyai kekuatan politik dan budaya yang dominan. Sejak priode awal, Islam mempunyai ikatan erat dengan politik dan masyarakat. Islam merupakan sumber legitimasi bagi para Sultan yang memengang peran sebagai pemimpin agama, pembela iman, dan pelindung hukum Islam, sekaligus pendidikan dan nilai-nilai adat

Malaysia adalah sebuah negara dengan bendera nasional bergambar bulan sabit dan bintang, dengan konstitusi yang menyatakan Islam sebagai agama resmi, dengan Perdana Menteri yang memberi prioritas tertinggi untuk menyatukan kaum muslim, dengan pemerintahan yang semua menteri utamanya beragama Islam, dan dengan idologi nasional yang ditegaskan oleh pemerintah bahwa merupakan tugas suci setiap warga negara untuk membela dan mendukung” konsitusi yang menjamin kedudukan istimewa bangsa Melayu, peranan Sultan, dan penetapan Islam sebagai agama resmi (Rahman Astuti 1999)

F. Gambaran Pendidikan Islam di Malaysia

Seperti halnya di Indonesia, pendidikan Islam di Malaysia tidak dapat dipastikan secara tepat kapan dimulai, tetapi perkara ini dapat dilihat pada latar belakang sejarah kedatangan agama Islam di negara ini dan aktivitas serta kegiatan pendidikan yang berjalan pada waktu tersebut. Kedatangan Islam dan proses islamisasi berlangsung melalui jalur perdagangan atas peranan para pedagang muslim dan mubaligh dari Arab dan Gujarat, para dai setempat dan penguasa Islam.⁵ Malaysia pun menjadi basis utama penyebaran Islam ke Kepulauan Hindia Timur.⁶ Sejak merdeka tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia dan diberikan selama 120 menit per minggunya. Akan tetapi, pemerintah tidak melakukan penekanan atau lulus ujian ilmu pengetahuan agama Islam, sehingga pelajaran ini tidak mendapat perhatian serius dari siswa pada masa tersebut (Qasim A. Ibrahim ,2014)

Sejak tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual. Perkembangan masjid dan surau di Malaysia mencerminkan semaraknya aktivitas umat Islam, Pendidikan di Malaysia pada dasarnya mengadopsi sistem dari negara Inggris sebab Malaysia merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Hal ini yang menyebabkan Malaysia maju di bidang pendidikan, di mana negara Inggris sangat memerhatikan pendidikan untuk negeri jajahannya.

Tiga rahasia keberhasilan pendidikan di Malaysia yaitu: 1) mau belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu maju; 2) mau mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang cukup memadai; 3) membuat perencanaan jangka panjang yang sistematis dan dijalankan secara konsekuen. Pemimpin negara Malaysia meyakini hanya dengan pendidikan yang bermutu maka bangsa Malaysia bisa menjadi bangsa yang terhormat di mata bangsa-bangsa yang lainnya. Secara konsekuen, mereka menjalankan perencanaan jangka panjang yang telah disusun dan diputuskannya. Menghilangkan arogansi kinerja pendidikan di Malaysia yang sangat memadai tersebut terbukti telah membawa kemajuan yang sangat berarti bagi bangsa Malaysia dan dalam banyak hal telah meninggalkan negara-negara yang dulu pernah dianggap sebagai gurunya. Dari tatanan aplikasi, pemerintah Malaysia menyediakan sarana dan prasarana belajar yang sangat baik, baik dari segi sumber ilmu yang berasal dari buku-buku dengan cara menyediakan perpustakaan yang lengkap maupun beasiswa yang diberikan kepada orang yang masih belajar

G. Implementasi Kebijakan dan Tujuan Pendidikan Islam Di Malaysia

1. Kebijakan Pendidikan

Ketika Mahathir Muhammad menjabat sebagai Menteri Pendidikan, kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan terlihat lebih awal mendapat perhatian dibanding bidang lainnya. Beliau merupakan sosok yang dikenal banyak berperan dan memberikan kontribusi bagi upaya islamisasi di Malaysia diantaranya dengan Pembentukan dewan penasihat ini dimaksudkan untuk menggerakkan agar Islam menjadi relevan dengan kebutuhan modernisasi masyarakat muslim Malaysia dan agar gerakan ini dapat dilaksanakan secara koor-dinatif dan sistematis (Almas A, 2014)

Pada tahun 1975, Kementerian Pendidikan mengeluarkan dana yang cukup besar untuk memperbaiki pelaksanaan pelatihan guru-guru agama Islam. Pada tahun berikutnya, pemerintah mengumumkan pengambilalihan atas sepuluh sekolah Islam terbaik di negara itu guna memperbaiki manajemen sekolah tersebut serta meningkatkan kinerja para guru dan pegawainya untuk dijadikan sebagai sekolah model. Pada tahun 1979, pemerintah mendeklarasikan pendirian Pusat Penelitian Islam Asia Tenggara. Pada tahun yang sama, pengetahuan agama Islam ditetapkan sebagai materi ujian di tingkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Setahun berikutnya pemerintah mendirikan yang pertama kali Maktab Perguruan Islam (*Islamic Teacher's College*) yang dari sana murid-murid berpotensi akan dikirim ke Mesir, Pakistan, dan Indonesia untuk melanjutkan studi mereka (Adi Radili,2014)

Adapun kebijakan lainnya terhadap pendidikan Islam di Malaysia antara lain:

- ◆ Sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia.
- ◆ Pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan.
- ◆ Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di pemerintahan
- ◆ Pada Tahun 1983, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar nonmuslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada para pelajar muslim

2. Implementasi Tujuan Pendidikan Islam

Untuk setiap negara yang sudah mencapai kemerdekaan, salah satu aspek penting yang sangat prioritas untuk menuju ke arah negara yang maju dan berkembang dari aspek politik, ekonomi, dan sosial adalah penekanan terhadap pelaksanaan sistem pendidikan negara. Sistem pendidikan yang dilaksanakan di suatu negara sangat penting, bukan saja karena fungsi kebijakan dan sosialisasinya yaitu di mana anak-anak dididik untuk menjadi insan yang berhasil dan mengenali budaya serta alam sekeliling, melainkan bisa digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan ideologi nasional kepada masyarakat yaitu melalui penerapan tentang pemahaman dan nilai-nilai positif untuk persatuan kaum di kalangan para pelajar. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Islam di semua negara itu sama, yaitu harus selaras dengan tujuan penciptaan manusia di dunia. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam tujuan penciptaan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah *QS. Al-Zariyat/51: 56 Artinya dan tidak lah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdikan (beribadah) kepada-Ku.* Untuk itu, pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang siap menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Diantara beberapa hal usulan yang dirumuskan di dalam (Disadur dari hasil tulisan pakar sakit puan Malaysia wjim@pd.jaring.my) untuk model pendidikan prasekolah berdasarkan Islam di Malaysia ialah:

- 1) Pengajaran dari sudut kejiwaan anak-anak; pendidikan prasekolah perlu meletakkan penilaian khusus dan keutamaan terhadap perubahan sikap, tingkah laku dan adab anak-anak. Penilaian yang dibuat oleh pengajar tidak harus sekadar melihat sama kemampuan anak-anak didiknya, tetapi yang utama adalah tidak melakukan pembedaan-pembedaan antara satu dengan lainnya, pun pembedaan sebab jenis kelamin. Dengan demikian anak dapat menunjukkan 'perubahan' sikap dan adab seorang yang toleran, seorang yang berani, peramah, positif dan mampu menunjukkan semangat bekerjasama.
- 2) Mendidik orang tua menjadi pendidik yang berkesan; hal ini dipandang perlu karena justru orang tualah "motor" pertama dalam sebuah pendidikan di keluarga. Dari sini pula pencitraan dibentuk. Pencitraan tentang peran masing-masing individu yang biasanya akan mulai teridentifikasi pertama kali oleh jeniskelaminnya.
- 3) Meningkatkan mutu pendidik; yaitu dengan memartabatkan sistem latihan yang menyeluruh untuk menjadi guru 'profesional' . Dengan itu, guru

diharapkan dapat mempunyai pemikiran mantap mengenai pandangan dunia pendidikan Islam dan cara pengendalian pendidikan prasekolah yang terkini dan profesional.

Dalam masyarakat majemuk seperti di Malaysia ini, setiap etnik dan kelompok agama mempunyai sistem pendidikan yang unik bagi mempertahankan identitas dan nilai masing-masing. Islam sepatutnya dapat diketengahkan sebagai satu unsur penting yang menjamin kesejahteraan, kesetaraan dan perpaduan dalam masyarakat seperti ini. Tiga rahasia keberhasilan pendidikan di Malaysia dalam Supriyoko(2000) yaitu;

- 1) Mau belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu maju
- 2) Mau mengalokasi anggaran pendidikan dalam jumlah yang cukup memadai
- 3) Serta membuat perencanaan jangka panjang yang sistematis dan dijalankan secara konsekuen.

Pemimpin negara Malaysia meyakini hanya dengan pendidikan yang bermutu maka bangsa Malaysia bisa menjadi bangsa yang terhormat di mata bangsa-bangsa yang lainnya. Dan secara konsekuen mereka menjalankan perencanaan jangka panjang yang telah disusun dan diputuskannya. Menurut Al-Kattani (2009) ada beberapa hal yang menjadikan belajar di Malaysia menarik, diantaranya adalah:

- 1) Fasilitas perpustakaan yang cukup memadai. Buku-buku dan jurnal Islam yang diperlukan dalam kajian keislaman baik yang berbahasa Arab, Inggris, Melayu dan lain sangat representatif.
- 2) Bantuan keuangan dari unuversistas yang diberikan kepada para mahasiswa yang sedang menyelesaikan penelitian tesis dan disertasi.
- 3) Pemanfaatan ICT secara optimal dalam setiap proses administrasi dan kegiatan belajar mengajar. Fasilitas ini membuat urusan menjadi mudah, singka, dan efisien.
- 4) Biaya perkuliahan relatif murah dengan fasilitas yang sangat memadai.
- 5) Universitas-universitas malaysia sering mengadakan seminar baik skala nasional maupun internasional.

H. Perbandingan Pendidikan Islam Indonesia dan Malaysia

1. Persamaan Pendidikan Islam Di Indonesia dan Malaysia

Beberapa kesamaan yang didapat dalam pemahaman konsep dan dinamika perkembangan pendidikan Islam antara Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut;

- a) Kesamaan pengertian pendidikan Islam, baik Indonesia maupun Malaysia memiliki konsep yang sama bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan generasi muda dalam mentransfer pengetahuan dan nilai yang berdasarkan norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits untuk mengantarkan peserta didik agar semakin dekat dengan Sang Pencipta alam semesta mencapai kebahagiaan dunia dan akherat. Hal ini tidak dipungkiri karena para pemerhati pendidikan Islam di dua negara tidak berbeda dalam memperdalam literatur-literatur pendidikan Islam.
- b) Masuknya Islam ke dua negara serumpun terjadi pada waktu yang bersamaan yang dibawa oleh para pedagang dari India Selatan. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia yang cukup sibuk, pertemuan beberapa budaya dan agama terjadi dan singgah di semenanjung Malaya dan Sumatera karena kepentingan perniagaan. Begitu pula masuknya Islam di dua wilayah itu karena persinggahan para pedagang dari Gujarat.
- c) Awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam. Baik di Indonesia maupun Malaysia menandai awal pendidikan Islam dimulai ketika Islam masuk ke wilayah setempat. Para penyebar Agama Islam memiliki karakter yang sama ketika memasuki wilayah baru. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai, mengikuti corak kehidupan setempat, tetapi bersifat memperbaiki kebiasaan-kebiasaan lama masyarakat setempat
- d) Adanya upaya menghapus dualisme dalam sistem pendidikan yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Konsep pendidikan yang dianggap ideal bagi kedua negara adalah mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam satu sistem pendidikan yang terpadu, tidak ada pemisahan pendidikan umum yang sekuler dengan pendidikan agama Islam yang terisolasi dan terbelakang. Upaya-upaya itu dilakukan dengan menyusun peraturan-peraturan baru yang mengakomodasikan terintegrasinya dua sistem pendidikan tersebut.
- e) Pemerintah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional masing-masing negara. Kedua negara menilai pendidikan Islam sangat penting karena merupakan agama yang dianut mayoritas, bahkan di Malaysia sebagai agama resmi negara. Maka lulusan dari pendidikan Islam harus menjadi pilar utama penopang kemajuan bangsa, oleh sebab itu diperlukan sistem pendidikan Islam yang berkualitas.

2. Perbedaan Pendidikan Islam Di Indonesia dan Malaysia

Beberapa perbedaan yang dijumpai disebabkan karena latar belakang dan dinamika perkembangan pendidikan Islam sebagai berikut;

- a) Di Indonesia segala macam urusan agama ditangani oleh Kementerian Agama yang membawahi seluruh agama yang ada di Indonesia. Di Malaysia, urusan agama Islam langsung di bawah pengawasan Yang Dipertuan Agong, dalam hal ini ditunjuk seorang pejabat Urusan Hal Ehwal Agama Islam sebagai pelaksananya. Hal ini merupakan suatu keistimewaan bagi Agama Islam, sebab urusan keagamaan Islam merupakan urusan negara. Oleh sebab itu negara sangat ketat mengawal segala kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan nilai-nilai Islam. Tetapi sebaliknya, agama-agama selain Islam bukan urusan negara. Di Indonesia semua agama memiliki kedudukan yang sama. Hak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut warga diatur dan dilindungi oleh UUD. Kecuali karena sebab mayoritas, tidak ada agama yang memiliki kedudukan istimewa di Indonesia.
- b) Perhatian yang sangat serius dari pemerintah kebangsaan terhadap output lulusan sekolah dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya. Sehingga menyelenggarakan program j-QAF, suatu program untuk menjembatani kemampuan meng-khatam al-Qur'an bagi calon lulusan sekolah rendah. Program ini mulai diterapkan tahun 2005. Hal ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam di Malaysia.
- c) Dengan wilayah yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, pendidikan Islam menunjukkan corak yang beragam sesuai dengan karakter kedaerahan setempat. Corak pendidikan Islam Indonesia seperti pondok pesantren di Jawa, Dayah di Aceh, dan Surau di Minangkabau misalnya, menampilkan kekhasan yang unik yang ikut mewarnai dinamika perkembangannya. Sistem pendidikan Islam tradisional sangat diwarnai oleh corak-corak budaya kedaerahan.

SIMPULAN

Sejarah dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan, hal ini disebabkan oleh letak geografis yang berdekatan sehingga mengalami fase-fase sejarah yang sama yang disebabkan oleh tahapan periode peradaban internasional. Hal lain yang menyebabkan kesamaan adalah kesamaan etnis bangsa Melayu, kesamaan sebagai bangsa

Melayu mengakibatkan kesamaan emosi dalam merespon pengaruh dari budaya luar, termasuk budaya Islam dari para pedagang India Selatan.

Kesamaan semangat bahwa Islam adalah bagian dari identitas bangsa melayu dan mengambil posisi untuk menentang sistem pendidikan barat. Perbedaan-perbedaan dalam perkembangan pendidikan Islam antar kedua negara disebabkan oleh latar belakang sosio-politis yang berbeda. Malaysia yang bersifat monarkhi konstitusional dan Indonesia yang republik presidensial memiliki norma-norma yang berbeda dalam menempatkan alat kelengkapan negara. Namun perbedaan yang positif sebaiknya dijadikan ide-ide perbaikan sistem pendidikan Islam di tanah air. Pemerintah negeri jiran itu sangat serius dalam meningkatkan mutu dan peran pendidikan Islam bagi pengembangan sumber daya manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslindah, Andi. "Pendidikan Islam Di Malaysia: Jenis, Jenjang, Kebijakan, dan Tujuan Pendidikan." *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 18, No.1 (27 Juni 2015): 16–26.
- Abdullah, Abdul Rahman Haji. *Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ahmad, Amrullah et.al. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Chuvgunova, Olga, dan Svetlana Kostromina. "Perencanaan sebagai Keterampilan Belajar Siswa." *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku* 217 (5 Februari 2016): 132–38. Doi:10.1016/J.Sbspro.2016.02.045
- Daulay, Haidar Putra. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Forey, Gail, dan Lok Ming Eric Cheung. "Manfaat Pengajaran Eksplisit Bahasa untuk Pembelajaran Kurikulum di Kelas Pendidikan Jasmani." *Bahasa Inggris Untuk Tujuan Tertentu* 54 (1 April 2019): 91– 109. Doi:10.1016/J.Esp.2019.01.001.
- GR Terry, Leslie.W Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996

- Gunawan, Heri. Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hidayat, Ara, dan Imam Machali. Buku Pegangan Manajemen Pendidikan. Edisi ke-2. Jakarta: Grup Prenadamedia, 2018
- Jumaeda, St. "Implementasi Standar Penilaian dalam Pembelajaran PAI pada Kurikulum 2013." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, No.1 (22 Mei 2018): 65. Doi:10.33477/Alt.V3i1.418.
- Majid, Abdul. Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Malaysia, Kementrian Pelajaran. "Bahagian Perkembangan Kurikulum," 2010.
- Maya Elok Kharisma, D. (2021). Pembinaan Manajemen Peserta Didik Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Syntax Transformation*, 819-820.
- Moh, A. D. (2019). Pendidikan Islam Mengupas Aspek Aspek Dalam Dunia Pendidikan Islam. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Menteri Pendidikan, Peraturan, dan Kebudayaan. "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013." Diakses pada bulan Mei 21, 2019. [Http://Bsnp-Indonesia.Org/Id/WpIsi/Unggah/2009/06/03.-A.-Salinan-Permendikbud-No.-65- Th-2013-Ttg-Standar-Proses.Pdf](http://Bsnp-Indonesia.Org/Id/WpIsi/Unggah/2009/06/03.-A.-Salinan-Permendikbud-No.-65- Th-2013-Ttg-Standar-Proses.Pdf)
- Mujib, Abdul, dan Jusuf Mudzakkir. Ilmu Pendidikan Islam. edisi ke-3. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Nasbi, Ibrahim. "Manajemen Kurikulum: Sebuah Kajian Teoritis." *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 1, No.2 (18 Desember 2017). Doi:10.24252/Idarah.V1i2.4274
- Nazarudin. Manajemen Pembelajaran. Implementasi Konsep, Karakteristik, dan Metodologi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Nuryana, Zalik. "Kurikulum 2013 dan Masa Depan Pendidikan Islam di Indonesia." Diakses 3 Juni 2019. Doi:10.31219/Osf.Io/4j6ur
- Radili, Adi . "Dinamika Perkembangan Islam di Asia Tenggara " Blog Ar-Sembilan, <http://arsembilan.blogspot.com/2013/10/makalah-dinamika-perkembangan.html>, 23 Oktober 2014

- Romdloni. "Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Melalui Manajemen Kelas." *Jurnal Evaluasi*1, No.2 (9 April 2018): 151. Doi:10.32478/Evaluasi.V1i2.70.
- Sawaluddin, Sawaluddin. "Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*3, No.1 (13 Juli 2018): 39. Doi:10.25299/Althariqah.2018.Vol3(1).1775.
- Sisdiknas. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional." Diakses 11 Desember 2018. <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/101>. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Rahmat Tuhan Yang Maha EsaPre." Diakses pada 8 Januari 2019. http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Uu_No_20_Th_2003.pdf
- Suwadi. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*13, No.2 (24 April 2017): 223. Doi:10.14421/Jpai.2016.132-08.
- Supardi, Ahmad. *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, 1992
- Umami, Muzlikhatun. "Penilaian Autentik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Dalam Kurikulum 2013." *Jurnal Kependidikan*6, No.2 (30 November 2018): 222–32. Doi:10.24090/Jk.V6i2.2259.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. (2007). Jakarta: Visimedia
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. edisi ke-3. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Waghid, Y. "Pendidikan Islam." *Ensiklopedia Pendidikan Internasional*, 1 Januari 2010, 69–73. Doi:10.1016/B978-0-08-044894-7.00561-3.

TENTANG PENULIS



Fatrilia Rasyi Radita, lahir di Bandung pada hari sabtu, 13 mei 1989, putri ke-6 dari 6 bersaudara dari pasangan h. salim Hasbulloh dan Hj Emas Masriyah. Mengawali pendidikan di taman kanak-kanak Tk Aisyiyah 9 Cibeunying kidul tahun 1992 hingga 1994 kemudian melanjutkan jenjang sekolah dasar Di SDN cicadas 8 menamatkan jenjang Sekolah Dasar pada 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah (Madrasah Tsanawiyah) hingga atas (Madrasah Aliyah) di Pondok Pesantren Darussalam GONTOR Putri 1 Mantingan Ngawi Jawa Timur 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di UIN SGD Bandung jenjang S1 lulus th 2012 dan S2 di UIN SGD Bandung Hingga menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar M.Pd.I pada tahun 2015. Menikah th 2013 dengan Sohibul Bahri M.Pd.I putra Banten. Dan di karuniaai 2 orang putri an 1 orang Putra Kemudian mengawali pengabdian dengan mengajar Pendidikan Agama Islam di MA dan MTS Al-Mursyid Kota Bandung th 2010, menjadi dosen Pendidikan Agama Islam di LP3I Cimone Kota Tangerang th 2016 dan Menjadi Dosen Pendidikan Agama Islam di UNiversitas Insan Pembangunan Indonesia Curug-Bitung sampai sekarang.

GERAKAN PENDIDIKAN ISLAM PEREMPUAN: RE-DEMOKRATISASI PENGETAHUAN ISLAM DALAM PANDANGAN MASODA BANO

Bahyati

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

bahyati14@gmail.com

PENDAHULUAN

Perempuan diketahui terlibat aktif dalam transmisi pengetahuan Islam di Damaskus pada masa-masa awal Islam (Nadwi 2007). Tren ini berangsur-angsur menurun pada abad ke-9 hingga ke-11, dan kemudian bangkit kembali antara abad ke-12 dan ke-15, dan setelah itu sebagian besar menghilang. Sejak tahun 1970-an, tradisi ini telah bangkit kembali, dan semakin banyak anak perempuan dan perempuan yang mengikuti kelompok belajar di masjid atau di rumah untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama Islam. sejumlah sumber menegaskan bahwa kelompok pengajian perempuan ini, terutama yang berkumpul di rumah-rumah pribadi, seperti Qubaysiat, terus melakukan pertemuan. selama masa perlawanan, meskipun pemerintah telah membatasi pertemuan masjid bagi laki-laki dan perempuan.

Islam mulai berlaku di anak benua India pada abad ke-12, yaitu lima abad setelah kedatangannya di Suriah saat ini. Meskipun hanya sedikit masjid di anak benua India, khususnya di wilayah yang menjadi bagian dari Pakistan, yang memiliki area salat khusus untuk wanita yang dapat mengakomodasi masjid-masjid di kota-kota di Suriah, Damaskus. atau Aleppo, saat ini proporsinya lebih besar jumlah perempuan yang mengakses madrasah, yang biasanya berkembang sebagai perpanjangan dari masjid, untuk mempelajari teks-teks Islam dibandingkan sebelumnya. Secara tradisional, perempuan di wilayah ini memperoleh pengetahuan Islam dengan belajar mengaji di rumah di bawah pengawasan anggota keluarga yang lebih tua atau perempuan lanjut usia yang dihormati di lingkungan sekitar; beberapa keluarga bahkan melangkah lebih jauh dan bertunangan.

Di Afrika Barat, di negara bagian Kano, Nigeria utara yang paling padat penduduknya dan berpenduduk mayoritas Muslim, tempat kontak awal dengan Islam berkembang pada abad kedelapan⁹ dan dikonsolidasikan pada abad kesembilan belas setelah Jihad Usman dan Fodio, keilmuan Islam

perempuan berkembang pesat selama masa pemerintahan keluarga Fodio dan tidak lama setelah itu. Saat ini, Namun, peningkatan permintaan yang serupa terhadap pendidikan Islam formal bagi perempuan juga terjadi di Nigeria bagian utara seperti halnya di dua wilayah lainnya. Ekspresi yang paling nyata dari tuntutan ini adalah dalam bentuk sekolah Islam. Sekolah-sekolah ini menyajikan lanskap penyediaan pendidikan yang kompleks; ada yang beroperasi di pagi hari, ada yang beroperasi di malam hari atau di malam hari, dan ada yang beroperasi dalam beberapa shift (Bano 2008). melayani wanita dari segala usia. Model pendidikan Islam sekolah Islamiyya di Nigeria utara sudah muncul sejak tahun 1950-an.

Namun, dalam dua dekade pertama (1960-an dan 1970-an), hanya ada sedikit sekolah semacam itu, dan sekolah-sekolah tersebut terutama ditujukan untuk laki-laki. Sekolah-sekolah ini berbeda dari platform pembelajaran Islam tradisional di Kano, yang dikenal sebagai sekolah Tsangaya dan Ilmi, dan mereka menawarkan model pendidikan terpadu yang menggabungkan pendidikan modern dengan pembelajaran Al-Quran dan perolehan pengetahuan dasar Islam (Bano2008). Namun, sejak tahun 1970 dan seterusnya, sekolah-sekolah Islam ini juga mulai menarik siswa perempuan. Saat ini sekolah-sekolah tersebut memiliki rasio siswa perempuan yang lebih tinggi: rata-rata antara 55 dan 60 persen populasi siswa di sekolah campuran Islamiyya di Kano diperkirakan adalah perempuan (ESSPIN2011; Antoninis2014).

Dari uraian di atas bisa di ambil kesimpulan bahwa peran perempuan dalam dunia pendidikan sudah berjalan sejak dulu dengan proses-prosesnya yang sederhana hingga perempuan memiliki derajat yang sama seperti laki-laki, dan perempuan dapat mengampu pembelajaran-pembelajaran yang sama seperti laki-laki.

PEMBAHASAN

A. Kegigihan Islam: Bukan Prestasi Sepele

Para ulama dan upaya mereka dalam kebangkitan Islam melalui gerakan-gerakan pendukung seperti gerakan pendidikan Islam bagi perempuan ini sering kali Mereka dianggap bertanggung jawab atas stagnasi semangat intelektual dalam Islam dan ketidakmampuan masyarakat Muslim untuk mengalami kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik di zaman modern. Argumen-argumen seperti ini sering kali berasumsi bahwa kegigihan Islam merupakan produk dari pengaruh sejarah dan adat istiadat, dan bukan

produk dari nalar dan adaptasi yang efisien dari para ulama terhadap tuntutan perubahan zaman. Seringkali dikatakan bahwa pintu ijtihad (penalaran independen) telah tertutup di dunia Islam sejak abad ke-12 dan seterusnya, yang mengekang penalaran intelektual serta kreativitas dan sosial yang terkait dengannya. kemakmuran ekonomi dan politik yang menandai periode awal sejarah Islam. Sentralitas kemajuan ilmu pengetahuan dan penalaran rasional yang terkait dengan kebangkitan Barat dan bangkitnya kekuatan kolonial Barat membuat banyak elit politik Muslim mengaitkan penurunan otoritas politik Muslim dengan sifat keilmuan Islam. Keyakinan inilah yang membuat banyak pemimpin Muslim pascakolonial memulai proyek modernisasi Islam yang besar (Berkey 2007) yang melibatkan reformasi Islam pusat otoritas dan pembelajaran Islam tradisional.

Kajian-kajian terbaru mengenai ulama dan platform tradisional otoritas Islam berfokus pada menyoroti dinamisme yang ditunjukkan oleh para ulama dalam mempertahankan otoritas mereka, dan mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam, di masa-masa yang berubah dengan cepat (Zeghal 2007; Zaman 2010; Pierret 2013). Robinson (2008) juga menunjukkan betapa upaya terus-menerus melakukan reformasi internal telah menjadi inti tradisi keilmuan ulama dan bagaimana tren ini semakin menonjol pada abad kesembilan belas. Saliba (2011), sambil mendokumentasikan bukti kemajuan ilmiah pada periode antara tiga puluh abad ke-16 dan ke-16 dikaitkan dengan kemerosotan pemikiran intelektual dan semangat rasionalis dalam masyarakat Muslim, juga berpendapat bahwa klaim yang tersebar luas di kalangan cendekiawan Barat mengenai publikasi, dan dukungan populer berikutnya, terhadap Imam Inkohereni Para Filsuf karya Al-Ghazali (1058–1111) menunjukkan matinya penalaran intelektual dalam tradisi ilmiah Islam adalah kesalahan membaca perkembangan sejarah yang sangat besar.

B. Penjelasan Dominan atas Kegigihan Islam

Narasi yang dominan mengenai kegigihan Islam dan lebih khusus lagi penegasannya di ruang publik sejak tahun 1970an dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: tesis indoktrinasi dan dugaan daya tarik Islam. Islam yang terbaik adalah memulai dengan mengatasi keterbatasan ‘tesis indoktrinasi’ yang sangat berpengaruh. Penjelasan populer di kalangan pembuat kebijakan dan akademisi mengenai kegigihan Islam Sunni ortodoks, khususnya yang terkait dengan kelompok Islam yang lebih konservatif, adalah aliran uang Saudi (Jaffrelot 2002). secara aktif mendanai penyebaran gerakan

Islam puritan di luar negeri, mendorong pertumbuhan masjid, madrasah, dan kelompok Islam radikal (Rashid2010); mereka juga terlihat mendukung proksi Sunni-Syiah di negara-negara Muslim lainnya. Awalnya hanya terbatas di Arab Saudi, sejak terjadinya Arab Spring, pernyataan seperti itu juga dibuat mengenai Qatar. Ada argumen yang menjelaskan kegigihan Islam dengan menonjolkan daya tariknya. Posisi awal seperti itu memungkinkan umat Islam yang taat memiliki elemen pilihan sadar tertentu dan inisiatif, dengan kata lain tingkat keagenan tertentu. Namun, bagaimana banding ini didefinisikan masih sangat diperdebatkan. Beberapa orang mengartikannya semata-mata dalam hal rasionalitas ekonomi, atau apa yang sering dipandang sebagai pandangan fungsionalis mengenai studi ketaatan beragama. Kebaktian di sini dipandang sebagai produk manfaat yang diperoleh masyarakat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan dalam konteks kegagalan negara-negara Muslim modern untuk memenuhi janji-janji modernitas (Fischer 1982; Sivan 1990)

C. Gerakan Pendidikan Islam Perempuan

Status perempuan dalam masyarakat Muslim dan sifat diskriminatif dari banyak peraturan Islam yang mengatur norma-norma gender adalah dua bidang penelitian yang paling populer dalam kajian keserjanaan Barat mengenai Muslim masyarakat (Roded 2008; Kelly dan Breslin 2010). Alasan mengapa para akademisi dan kebijakan Barat tertarik dengan status perempuan Muslim tidaklah sulit untuk diapresiasi: keempat mazhab Sunni sebagian besar sepakat bahwa hukum Islam mengharuskan perempuan untuk tunduk pada otoritas suaminya, untuk mewarisi separuh bagian dari saudara kandungnya, dan untuk menjaga hubungan monogami sementara suaminya mempunyai hak untuk memiliki empat istri sekaligus. Tidak mengherankan, keputusan-keputusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar feminisme Barat (Mernissi 1991; Ahmed 1992; Badran 2009). Sebagaimana telah dicatat oleh banyak cendekiawan, perempuan Muslim dan demokrasi bahkan saat ini sering digunakan sebagai barometer utama untuk membedakan antara anggapan ortodoksi masyarakat Muslim dan liberalisme Barat (Roded 2008; Seedat 2013).

Hal ini menyebabkan beberapa penulis, yang kritis terhadap gambaran perempuan Muslim yang patuh yang disajikan oleh para sarjana Barat, berpendapat bahwa di kalangan liberal Barat dan di antara para ahli teori feminis terdapat penolakan untuk mengakui bahwa perempuan Muslim bisa secara sukarela bergabung dengan gerakan Islam (Mahmood 2012; Abu-

Lughod 2013). Bagi penganut teori Barat yang liberal, norma-norma Islam pada dasarnya bersifat diskriminatif terhadap perempuan sehingga sulit dipercaya bahwa perempuan mana pun bisa menerima mereka tanpa pilihan. Meskipun asumsi-asumsi seperti itu mengenai perempuan dalam masyarakat Muslim masih dominan di kalangan akademisi liberal, serta di media Barat dan di antara para pembuat kebijakan, namun, beasiswa mengenai kondisi kehidupan perempuan dalam masyarakat Muslim serta kompleksitas hukum Islam yang mengatur norma-norma gender, seiring berjalannya waktu, semakin menyadari adanya perbedaan tersebut. Studi antropologis Lila Abu-Lughod tentang perempuan di masyarakat Arab secara khusus berupaya untuk menantang citra perempuan Muslim yang tertindas dengan mengilustrasikan secara meyakinkan bagaimana perempuan dalam masyarakat Arab, Masyarakat Muslim dapat menjalani kehidupan yang bermakna (Abu-Lughod 2002: 783).

Dalam argumentasinya, Mahmood mendukung argumen yang juga dibuat oleh Abu-Lughod tentang perlunya mengenali sifat pengalaman dan keinginan perempuan yang terbentuk secara historis; Namun, dengan menggunakan bukti empirisnya mengenai gerakan-gerakan masjid ini untuk mengkritisi setiap konsepsi gerakan tersebut dalam wacana feminis Barat, ia akhirnya memicu diskusi aktif di kalangan teoritikus feminis dan liberal.³⁷ Karyanya juga berpengaruh dalam membentuk pemahaman populer mengenai pengaruh sosial dari gerakan-gerakan ini gerakan-gerakan yang muncul sejak tahun 2005 telah aktif terlibat dengan diskusi teoritis Mahmood di lembaga tersebut, banyak yang mendukung pernyataan dasarnya bahwa partisipasi perempuan Muslim dalam gerakan-gerakan ini harus dipandang sebagai tindakan pilihan, bukan sebagai suatu keharusan (Kalmbach 2008; Ahmad 2009; Jaschok 2012; Buergener 2013).

Secara umum, beasiswa terhadap gerakan-gerakan ini telah berkembang pesat dan terus berlanjut. Sebuah konferensi tentang para pengkhotbah perempuan yang memimpin gerakan-gerakan tersebut,³⁸ yang diadakan di Oxford pada tahun 2009, menghasilkan sebuah buku (Bano dan Kalmbach 2012) yang menampilkan 21 kasus serupa dari negara-negara mayoritas Muslim, serta komunitas diaspora Muslim di Barat. Bagi mayoritas sarjana yang berkontribusi pada buku ini, buku ini merupakan bidang studi baru. Seperti yang akan kita lihat dalam pembahasan buku ini, fokus ilmiah baru-baru ini pada gerakan-gerakan ini sebagian dijelaskan oleh fakta bahwa dalam sebagian besar konteks, gerakan-gerakan tersebut sengaja bekerja secara

diam-diam untuk membangun akar yang kuat sebelum menjadi cukup terlihat untuk diperhatikan. Pertumbuhan dramatis dalam bidang studi ini sejak penemuan mereka pada gilirannya dijelaskan oleh teka-teki menarik yang dihadirkan oleh gerakan-gerakan ini dengan menyimpan tradisi ortodoks dalam konteks perubahan masyarakat yang cepat. Beberapa sarjana juga tertarik untuk mempelajari gerakan-gerakan ini dengan harapan bahwa mereka berpotensi menantang otoritas laki-laki atas antar-pretasi teks-teks Islam.

D. Memahami Persistensi Institusional

Ketegangan yang diuraikan di atas, antara penekanan Mahmood pada pemahaman kegigihan norma-norma Islam AS karena beban sejarah dan penekanan pada buku ini yang mengakui peran musyawarah dan penalaran dalam memahami kegigihan tersebut, pada kenyataannya bersifat reflektif. dari dua pendekatan teoretis yang berbeda, sering kali dikaitkan dengan dua tradisi disiplin ilmu yang berbeda untuk memahami persistensi institusional. Pendekatan-pendekatan yang pertama dikaitkan terutama dengan teori sosiologi dan antropologis. memberi penekanan pada kekuatan struktur masyarakat yang diwariskan dalam membentuk tindakan individu; yang terakhir berasal dari teori ekonomi, yang pada gilirannya memberikan penekanan utama pada pengakuan sentralitas tindakan individu dan kemauan manusia dalam menciptakan lembaga-lembaga masyarakat tersebut.

Kemajuan teoritis terkini dalam kedua disiplin ilmu ini telah sangat mengubah posisi awal mengarah pada jalan tengah bersama; Namun, posisi disiplin asli terus mempengaruhi penekanan relatif yang ditempatkan pada kekuatan tradisi yang melekat versus kekuatan individu untuk membentuk dan membentuk kembali tradisi tersebut. Mengingat bahwa perdebatan mendasar ini pada gilirannya memberikan informasi bagaimana kita mendefinisikan lembaga dan menentukan faktor-faktor apa yang kita kaitkan dengan kegigihan kelembagaan, penting untuk meninjau posisi-posisi yang bersaing ini secara singkat, untuk menunjukkan bagaimana posisi-posisi tersebut menjelaskan pemahaman kita tentang gerakan pendidikan Islam perempuan dan dampak sosialnya. , sekaligus diuji lebih lanjut melalui bukti empiris yang disajikan dalam buku ini.

Penjelasan paling populer mengenai kegigihan institusional dalam teori yang menggunakan pendekatan berorientasi aktor, yang juga diadopsi dalam studi ini, adalah 'ketergantungan jalur'. Telah didefinisikan AS sebuah proses

bagaimana 'apa terjadi pada titik waktu yang lebih awal akan mempengaruhi hasil yang mungkin terjadi dari rangkaian peristiwa yang terjadi pada titik waktu berikutnya ' (Sewell 1996 : 262 – 63). Penerapan gagasan ketergantungan jalur dalam teori berbasis aktor individu menunjukkan pengakuan terhadap kekuatan struktural yang lebih luas, secara tradisional disorot oleh disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi AS, yang bertindak berdasarkan pilihan individu dan hasil masyarakat kolektif. Perdebatan, namun perdebatan, masih terus berlanjut untuk menentukan apakah ketergantungan jalur merupakan hasil dari 'terkunci oleh peristiwa sejarah', yang menyebabkan individu memilih pilihan-pilihan yang kurang optimal bahkan ketika mereka memiliki akses terhadap pilihan-pilihan yang lebih efisien. alternatif (Arthur 1989 ; Libecap 1989 ; Pierson 2000), atau apakah jalur yang dipilih, meskipun tampaknya kurang optimal, sebenarnya merupakan pilihan terbaik yang tersedia dalam keadaan tertentu, yaitu efisien berdasarkan konteksnya (Liebowitz dan Margolis 1995).

Douglass North (1990) adalah pendukung utama perlunya membedakan institusi dari organisasi yang mewakilinya; dalam pandangannya: Meskipun tujuan peraturan adalah untuk menentukan cara permainan dimainkan, tujuan tim dalam seperangkat peraturan tersebut adalah untuk memenangkan permainan – dengan kombinasi keterampilan, strategi, dan koordinasi; dengan cara yang adil dan terkadang dengan cara yang kotor. Memodelkan strategi dan keterampilan tim seiring perkembangannya merupakan proses terpisah dari pemodelan penciptaan, evolusi, dan konsekuensi aturan (North 1990: 5). Lebih lanjut ia berargumentasi: 'Baik keberadaan organisasi maupun bagaimana organisasi tersebut berkembang, pada dasarnya dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan. Pada gilirannya, hal-hal tersebut mempengaruhi bagaimana kerangka kelembagaan berkembang' (North 1990: 5). North berpendapat bahwa organisasi-organisasi diciptakan dengan tujuan yang bertujuan sebagai respons terhadap serangkaian peluang 'yang dihasilkan dari serangkaian kendala yang ada... dan dalam rangka upaya untuk mencapainya, tujuan-tujuan tersebut merupakan agen utama perubahan kelembagaan' (North 1990: 5). Oleh karena itu, dalam buku ini Islam diartikan sebagai sebuah institusi – sebuah kerangka moral dan hukum yang diambil dari kitab suci – sedangkan gerakan yang diteliti adalah organisasi;

E. Perubahan Kelembagaan dan Insentif Elit

Pemetaan berbagai bentuk organisasi yang mewakili gerakan pendidikan perempuan Islam menunjukkan bahwa organisasi formal dan informal beroperasi dengan cara yang berbeda. Dalam gerakan-gerakan ini, organisasi informal adalah organisasi yang strukturnya paling longgar, tidak terlalu formal dalam menuntut kehadiran rutin, dan memungkinkan terjadinya percampuran siswa dari berbagai profil yang berbeda. Sebaliknya, organisasi formal mungkin juga tidak terdaftar secara formal, namun mereka mengikuti kurikulum yang lebih terstruktur, memerlukan partisipasi penuh, dan didorong untuk mengeluarkan sertifikat partisipasi formal yang jelas.

Kontribusi FOMWAN terhadap pembangunan masyarakat di bagian utara Nigeria merupakan salah satu contoh yang baik dari energi kreatif dan jalan tengah yang muncul antara ortodoksi ekstrim dan ketundukan total terhadap modernitas gaya Barat ketika umat Islam yang berpendidikan terlibat dengan teks-teks Islam dengan tujuan untuk menemukan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang optimal untuk masa kini. FOMWAN berupaya untuk melibatkan lembaga-lembaga pembangunan tersebut untuk membentuk agenda program pemberdayaan gender mereka. Upaya ini sebagian besar telah berhasil. FOMWAN tetap menjadi mitra yang berpengaruh dalam program pemberdayaan gender di banyak lembaga pembangunan; tidak ada LSM feminis berskala besar seperti yang ada di negara-negara Muslim lainnya, termasuk Pakistan, yang beroperasi di Nigeria utara. Qubaysiat juga memberikan banyak contoh dalam menemukan jawaban baru terhadap isu-isu kontemporer, meskipun ada satu contoh yang paling banyak. Pada tahun 2014, Boko Haram menculik lebih dari 250 anak perempuan dari sebuah sekolah berasrama di Nigeria utara yang memicu protes internasional. Untuk tinjauan mengenai asal usul Boko Haram dan penolakannya terhadap pendidikan modern, lihat Mustapha (2014).

Ajaran Qubaysi, sejalan dengan semua gerakan lain yang saya amati, memahami norma-norma gender Islam yang didasarkan pada konsep saling melengkapi peran laki-laki dan perempuan, bukan kesetaraan yang serupa. Dalam pemahaman seperti ini perempuan setara dengan laki-laki dalam segala hal, namun ada pembagian kerja yang jelas antara kedua jenis kelamin, yang masing-masing mempunyai tanggung jawab utama sendiri. Pasangan suami-istri dapat bertukar peran dengan persetujuan bersama, namun meskipun mereka menggunakan logika yang mendasari keputusan tersebut dan bukannya mengikuti penafsiran harafiah, gerakan-gerakan ini jelas bahwa

perempuan diharuskan berjanji untuk tunduk kepada suami kecuali jika hal tersebut melanggar hakikat iman.

Dengan demikian, budaya pembelajaran Islam yang ditanamkan oleh gerakan pendidikan Islam perempuan ini di kalangan perempuan Muslim yang terpelajar, makmur, dan progresif secara sosial mengarah pada pemikiran kreatif dan evaluasi ulang terhadap kekakuan posisi Islam ultra-konservatif, serta seperti mengikuti secara membabi buta norma-norma liberal yang diilhami Barat. Seringkali para guru atau sesama pelajar dalam gerakan-gerakan ini sendiri cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat perempuan dalam profil ini; namun bahkan jika mereka gagal, mereka membantu menumbuhkan '*zauq*' (seperti yang telah ditunjukkan dengan tepat oleh responden saya yang berasal dari Pakistan) untuk berinteraksi dengan teks-teks Islam sedemikian rupa sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat berhubungan dengan selera budaya dan pengalaman kehidupan nyata mereka.

F. Perdebatan tentang Seksualitas Perempuan

Sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan, Mahmood gagal mengenali respons kreatif yang muncul dari gerakan pendidikan Islam perempuan, dan malah berfokus pada bagaimana perempuan dalam gerakan tersebut memilih untuk mengadopsi norma-norma Islam ortodoks bahkan ketika mereka mendapati norma-norma tersebut bertentangan dengan kepekaan batin mereka dan tidak konsisten dengan tuntutan dari kehidupan modern mereka. Kami sekarang akan mempertimbangkan bukti spesifik yang disajikan Mahmood, untuk memahami keterbatasannya. Penting untuk diketahui bahwa banyak cendekiawan Islam di negara-negara ini menganggap perbedaan yang dilakukan negara antara mata pelajaran modern dan Islam sebagai hal yang dibuat-buat; Islam, menurut mereka, tidak membedakan berbagai bentuk ilmu pengetahuan, dan umat Islam mempunyai sejarah dalam memberikan kontribusi aktif dalam semua bidang keilmuan.

Muslim Nigeria utara yang terpelajar dan progresif, menurut pengalaman saya, sangat sadar bahwa negara-negara bagian di utara tertinggal dibandingkan negara-negara bagian di selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, dan penting bagi umat Islam untuk mengejar ketertinggalannya. Namun mereka juga selalu menegaskan bahwa kegagalan negaralah yang bertanggung jawab atas hal ini, karena dalam pandangan mereka agama mendorong pencarian ilmu di segala bidang baik bagi laki-laki

maupun perempuan. Di Nigeria, pendidikan Barat hingga saat ini dipandang sebagai warisan pemerintahan kolonial. Sekolah modern disebut Boko; nama kelompok militan di Nigeria utara, Boko Haram, yang berarti 'sekolah Barat dilarang', dikatakan sebagai ungkapan kecaman mereka terhadap korupsi yang terjadi di kelas penguasa Nigeria dan sistem sekolah modern tempat mereka dilatih. Boko Haram, lihat Loimeier (2012). Banyaknya insentif dan motivasi yang mendorong perempuan mengambil keputusan tersebut; lebih jauh lagi, ada kemungkinan untuk melihat beberapa tren yang berarti berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi dan orientasi profesional dan budaya perempuan yang terlibat. Bagi perempuan yang bergabung dalam kelompok formal, kita dapat mengidentifikasi banyak manfaat fungsional dari pendidikan Islam formal, meskipun kita menghormati keinginan mereka agar keputusan ini dilihat sebagai ekspresi sejati dari komitmen keagamaan mereka. Bagi perempuan yang berasal dari latar belakang berpendapatan tinggi dan berpendidikan modern, yang sebagian besar bergabung dengan kelompok informal, daya tarik untuk terlibat dengan kelompok-kelompok tersebut adalah: Namun, dalam pemberontakan tahun 2011 melawan Bashar Assad, kepemimpinan Qubaysiat dianggap menentang perlawanan. Sulit untuk memverifikasi apakah pernyataan online tersebut benar. Jika memang demikian halnya, maka dalam bacaan saya mereka menggunakan alasan yang sama seperti yang digunakan oleh banyak cendekiawan Islam lainnya di Timur Tengah dalam konteks pasca Arab Spring: yaitu, stabilitas di bawah rezim otoriter lebih baik daripada kekacauan total. Teks-teks Islam pada dasarnya bersifat intelektual. Bagi mereka, kerangka hukum dan moral Islam menarik akal sehat, dan dapat menjamin berkembangnya masyarakat modern, baik Muslim maupun Barat, dengan mendorong semangat kreatif masa kini sambil mengekang kecenderungan materialisme yang berlebihan dan desakralisasi di dunia modern.

Dalam argumentasinya, bab ini mencatat perlunya mengakui pentingnya dimensi emosi dan kognitif dari pengalaman beragama dan menghargai bahwa di kalangan umat Islam yang berpendidikan modern, dimensi kognitif inilah yang paling menjelaskan kegigihan Islam. Dalam memperdebatkan hal ini, bab ini juga menyoroti perlunya menghargai bahwa konsep-konsep alternatif modernitas tidak hanya ada tetapi juga dapat didasarkan pada logika moral yang kuat (Robinson 2008) Dalam menelusuri pergeseran kelembagaan tertentu yang telah menciptakan insentif bagi perempuan untuk bergabung dengan gerakan pendidikan Islam, bab ini telah

mengidentifikasi bagaimana kurangnya ko-evolusi kelembagaan, serta pengetahuan tentang masyarakat pada tingkat evolusi kelembagaan yang lebih maju, berperan dalam hal ini. . Negara-negara Muslim modern yang gagal mewujudkan janji-janji modernitas mereka telah menciptakan ketidaksesuaian antara aspirasi dan pencapaian masyarakat awam, sehingga menghasilkan frustrasi yang berperan penting dalam membawa mereka kembali ke tradisi keagamaan. Pada saat yang sama, meningkatnya keterpaparan langsung dengan masyarakat Barat akibat globalisasi dan kemudahan bepergian telah membuat perempuan Muslim yang berpendidikan, profesional, dan progresif secara budaya menghargai bahwa pencapaian materi Barat, meskipun sungguh luar biasa, memiliki dampak yang tidak disengaja dalam bentuk kerugian. pengalaman spiritual dan melemahnya ikatan antarmanusia. Hal ini dipandang sebagai kerugian yang sangat besar, sehingga memaksa perempuan untuk melakukan upaya sadar untuk melestarikan nilai-nilai ini dalam tradisi mereka sendiri.

SIMPULAN

Memang benar bahwa gerakan-gerakan reformasi Islam secara tradisional melibatkan unsur-unsur yang kuat dalam memurnikan sistem kepercayaan lokal dari bid'ah, dan pada saat yang sama gerakan-gerakan ini berupaya untuk mereformasi masyarakat melalui perebutan kekuasaan negara. Sebaliknya, gerakan kebangkitan Islam terutama berkisar pada promosi pendidikan Islam dan sebagian besar dipimpin oleh para ulama yang terlatih dalam studi Islam klasik. teks. Lebih jauh lagi, sebagian besar ulama telah menjauhi partai-partisipasi dalam politik elektoral, meskipun mereka mungkin hanya mempengaruhi negara-negara lain keputusan sosio-ekonomi para pengikutnya tetapi juga hasil pemilu yang sebenarnya dengan mendorong para pengikutnya untuk memilih satu kandidat atau partai dibandingkan yang lain. Namun, di AS, seperti yang akan kita lihat dalam buku ini, melalui contoh gerakan-gerakan Islam perempuan, perbedaan-perbedaan ini jarang dapat dipertahankan dengan rapi ketika diterapkan pada kasus-kasus tertentu, karena hampir semua gerakan Islam mengandung unsur kebangkitan Islam serta reformasi di AS. Keduanya berkepentingan untuk membentuk masyarakat Muslim berdasarkan etika Islam, dan hanya cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut saja yang berbeda. Gerakan kebangkitan mengusulkan bahwa cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan fokus pada kesalehan individu; Gerakan reformasi percaya

bahwa merebut kekuasaan negara adalah cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd-Allah, Umar F. 1983. *The Islamic Struggle in Syria*. Berkeley, CA: Mizan Press.
- Abd-Allah, Umar F. 2006. 'Innovation and Creativity in Islam.' Nawawi Foundation Paper [www.nawawi.org/wp-content/uploads/2013/01/Article4.pdf; Accessed 22 August 2015].
- Abdel-Latif, Omayma. 2008. *In the Shadow of the Brothers: The Women of the Egyptian Muslim Brotherhood*. Carnegie Endowment: Carnegie Middle East Centre. [http://carnegieendowment.org/files/women_egypt_muslim_brotherhood.pdf; Accessed 20 August 2015].
- Abdullah, Hussaina. 1993. "Transition Politics" and the Challenge of Gender in Nigeria.' *Review of African Political Economy* 56: 27–37.
- Abou-Bakr, Omaira. 2013. 'Rings of Memory: "Writing Muslim Women" and the Question of Authorial Voice.' *The Muslim World* 103 (3): 320–33.
- Abou El Fadl, Khaled. 2005. *The Search for Beauty in Islam: A Conference of the Books*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Abou El Fadl, Khaled. 2007. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. New York: HarperOne.
- Abu-Absi, Samir. 2015. *The Arab Language. History of Islam: An Encyclopedia of Islamic History*. [http://historyofislam.com/contents/the-modern-age/the-arabic-language/; Accessed 15 August 2015].
- Abu-Lughod, Lila. 2002. 'Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others.' *American Anthropologist* 104 (3): 783–90.

- Abu-Lughod, Lila. 2013. *Do Muslim Women Need Saving?* Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2000. 'Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective.' *The Quarterly Journal of Economics* 115 (4): 1167–99.
- Acemoglu, Daron, and James A. Robinson. 2009. *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge–New York: Cambridge University Press.
- Ackelsberg, Martha A. 1991. *Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women*. Oakland, CA: AK Press.
- Adamu, Abdalla Uba. 2003. 'Sunset at Dawn: Colonial Policy and Muslim Hausa Education in Northern Nigeria, 1900–1910.' In M. O. Hambolu, ed. *Perspectives on Kano-British Relations*. Kano: Gidan Makama Museum.

TENTANG PENULIS



Bahyati, lahir di Cilegon 14 Desember 1969 putri pertama dari 7 bersaudara pasangan Bapak Bahnan dan Ibu Refiyah. Mengawali pendidikan dasarnya di SD Taman Baru Cilegon tamat pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke MTs Delingseng Al-Khairiyah lulus tahun 1984. Kemudian melanjutkan kejenjang selanjutnya di SGO lulus tahun 1987. Selanjutnya melanjutkan ke jenjang berikutnya di IAIB (Institut Agama Islam Banten) lulus tahun 1994. Selanjutnya study di STKIP Pasundan Bandung. Kemudian melanjutkan kejenjang S2 di UHAMKA lulus tahun 2014. Sempat masuk di UNJ (Universitas Negeri Jakarta) tahun 2014. Kemudian tahun 2023 melanjutkan kejenjang S3 di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Riwayat pekerjaan : 1) tahun 2005-2010 mengajar di SDN Ketileng Cilegon; 2) tahun 2010-2014 mengajar di SMP dan SMK Al-‘Araf Cilegon; 3) tahun 2017 s/d sekarang Guru PJOK mengajar di SMK IT Al-Khairiyah; 4) tahun 2023 s/d sekarang mengajar di SMKN 4 Cilegon; 5) tahun 2010 s/d sekarang mengajar di STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Al-Khairiyah Cilegon.

PANDANGAN ISLAM DALAM MENYIKAPI KESETARAAN GENDER DAN PERUBAHAN BUDAYA DI SELURUH DUNIA

Tatu Humaeroh

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

tatu@uinbanten.ac.id

PENDAHULUAN

Pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan perubahan budaya di seluruh dunia telah menjadi topik yang menarik dan relevan dalam konteks global saat ini. Dalam sejarahnya, Islam memiliki pandangan yang kaya dan beragam terkait peran, hak, dan tanggung jawab gender dalam masyarakat. Perubahan budaya yang pesat di berbagai belahan dunia juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana ajaran Islam merespons dan menyesuaikan diri dengan dinamika ini.

Dalam makalah ini, kami akan menjelajahi sudut pandang Islam terkait kesetaraan gender dalam konteks perubahan budaya global. Kami akan menyelidiki prinsip-prinsip yang mendasari pandangan Islam tentang peran gender, bagaimana nilai-nilai ini berinteraksi dengan perubahan budaya yang cepat, dan bagaimana Islam menawarkan pemahaman yang mempengaruhi pandangan terhadap kesetaraan gender.

Tinjauan ini juga akan melibatkan diskusi tentang bagaimana interpretasi dan implementasi ajaran Islam tentang gender mempengaruhi praktik budaya dan kehidupan sehari-hari di berbagai masyarakat. Dengan demikian, tujuan makalah ini adalah untuk menyajikan wawasan yang holistik dan mendalam tentang bagaimana Islam memandang kesetaraan gender dalam konteks dinamika budaya global saat ini.

Melalui penelusuran ini, kami berharap dapat menggambarkan pandangan Islam yang kompleks dan beragam terhadap kesetaraan gender serta menjelaskan bagaimana ajaran ini berinteraksi dengan perubahan budaya di seluruh dunia.

PEMBAHASAN

Kesetaraan gender

Kesetaraan gender sangat penting bagi hak asasi manusia dan menumbuhkan masyarakat yang damai, serta telah dibuktikan oleh berbagai penelitian sebagai hal penting bagi semua komunitas untuk berkembang. Studi menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu satu abad untuk menutup kesenjangan gaji global perempuan dibandingkan laki-laki. Terlepas dari kemajuan selama beberapa dekade, kesetaraan gender masih jauh untuk dicapai. Dalam bentuknya yang paling berbahaya, ketidaksetaraan gender berubah menjadi kekerasan. Sekitar 1 dari 20 anak perempuan antara usia 15 dan 19, sekitar 13 juta anak perempuan pernah mengalami hubungan seks paksa.

Di masa damai maupun konflik, gadis remaja menghadapi risiko tertinggi kekerasan berbasis gender. Ratusan juta anak perempuan di seluruh dunia masih mengalami perkawinan anak dan mutilasi alat kelamin perempuan, meskipun keduanya telah diakui secara internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dikutip dari laman resmi United Nations Children's Fund (UNICEF).

Pengertian kesetaraan gender adalah keadaan dimana akses terhadap hak atau kesempatan tidak dipengaruhi oleh gender. Bukan hanya wanita yang terpengaruh oleh ketidaksetaraan gender, semua gender terkena dampaknya, termasuk pria, trans, dan orang-orang dengan keragaman gender. Hal ini pada gilirannya berdampak pada anak-anak dan keluarga, dan orang-orang dari segala usia dan latar belakang.

Kesetaraan dalam gender tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan memiliki atau membutuhkan sumber daya yang sama persis, tetapi bahwa hak, tanggung jawab, dan peluang perempuan, laki-laki, orang trans dan orang yang berbeda jenis kelamin tidak akan bergantung pada jenis kelamin yang ditetapkan pada mereka saat lahir.

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) mendefinisikan kesetaraan gender sebagai berikut: Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender) mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan perempuan dan laki-laki dan anak perempuan dan laki-laki. Kesetaraan tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menjadi sama tetapi bahwa hak, tanggung jawab perempuan dan laki-laki, serta peluang tidak akan bergantung pada apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan.

Kesetaraan gender berarti bahwa kepentingan, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki dipertimbangkan, mengakui keragaman kelompok perempuan dan laki-laki yang berbeda. Kesetaraan gender bukan hanya memiliki dan masalah perempuan tetapi harus memperhatikan dan sepenuhnya melibatkan laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dipandang sebagai masalah hak asasi manusia dan sebagai prasyarat untuk, dan indikator, pembangunan bKesetaraan Ekonomi. Ketika semua gender menerima kesempatan kerja yang sama, masyarakat memperoleh manfaatnya. Studi menunjukkan tempat kerja yang beragam adalah tempat kerja yang lebih produktif, dan keragaman ini termasuk keragaman gender. Keberhasilan di tempat kerja ini juga diterjemahkan ke dalam ekonomi. Ketika kesempatan kerja yang setara diberikan kepada semua jenis kelamin, tingkat kemiskinan berkurang, masyarakat terangkat dan PDB suatu negara meningkat secara signifikan.

Peningkatan Pendidikan

Kesetaraan gender dalam pendidikan menguntungkan setiap anak dalam sistem sekolah. Anak perempuan yang mengenyam pendidikan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi lebih sehat dan lebih produktif, memperoleh penghasilan lebih tinggi, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarga mereka. Hal tersebut pada gilirannya berkontribusi pada ekonomi yang lebih kuat yang menguntungkan semua jenis kelamin dan mengarah pada kesehatan yang lebih baik dalam komunitas.

Menurut UNICEF, ketika seorang anak perempuan menerima pendidikan menengah, pendapatan seumur hidupnya meningkat secara dramatis, tingkat pertumbuhan nasional meningkat, tingkat perkawinan anak menurun, tingkat kematian anak menurun, tingkat kematian ibu turun dan penurunan stunting anak.

Kesehatan yang Lebih Baik

Studi menunjukkan ketidaksetaraan gender berdampak negatif pada banyak hasil kesehatan, termasuk dalam hal keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, gizi, penyakit pandemi, dan banyak lagi. Ketika sistem kesehatan diubah untuk memberikan akses yang sama ke perawatan kesehatan untuk semua jenis kelamin, penelitian menunjukkan bahwa ada hasil kesehatan yang lebih baik, termasuk berkurangnya depresi dan PTSD, berkurangnya tingkat kematian, kesehatan yang dinilai sendiri lebih baik, dan berkurangnya konsumsi alkohol.

Contoh Kesetaraan Gender

Seperti apa kesetaraan gender di dunia nyata? Di bawah ini, contoh kesetaraan gender dalam *berbagai skenario dan bagaimana seharusnya terlibat di masyarakat*.

Contoh 1: Kesetaraan di Rumah

Rata-rata, perempuan di seluruh dunia melakukan pekerjaan tanpa bayaran di rumah tiga kali lebih banyak daripada pria, termasuk pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak serta anggota keluarga, dan banyak dari wanita ini juga bekerja penuh waktu atau karier paruh waktu.

Kesetaraan gender dalam contoh ini akan terlihat seperti membagi pekerjaan di rumah secara merata antara semua jenis kelamin dalam sebuah rumah tangga, sehingga beban mengurus rumah dan keluarga tidak hanya dibebankan pada perempuan.

Contoh 2: Gaji yang Setara untuk Pekerjaan yang Setara

Kesenjangan gaji antara pria dan wanita tetap kuat di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia, terutama bagi wanita yang menjadi ibu atau pengasuh. Kesetaraan gender dalam angkatan kerja berarti dibayar dengan gaji yang sama untuk pekerjaan yang setara, tanpa memandang gender.

Ini juga berarti bahwa jika seorang perempuan mengambil cuti dari pekerjaannya untuk mengambil cuti melahirkan, misalnya, dia tidak akan dihukum ketika dia kembali bekerja. Dia masih akan dipertimbangkan untuk promosi yang sama, kenaikan gaji dan peluang karier yang akan diberikan jika dia tidak mengambil cuti yang diperlukan untuk merawat keluarganya.

Contoh 3: Toleransi Nol untuk Pelecehan Seksual dan Bias Berbasis Gender

Baik di tempat kerja, dalam kelompok agama, di pusat komunitas, atau pengaturan kelompok lainnya, orang dari semua jenis kelamin berhak merasa aman dan bebas dari perundungan dan agresi mikro, pelecehan seksual, dan prasangka berdasarkan jenis kelamin. Masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi kesetaraan gender tidak mengizinkan komentar ofensif, pelecehan ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki control sehingga memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya dengan keadilan

gender berarti tidak ada lagi pembekuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki- laki. RUU KKG, Bab I Pasal I menyebutkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki- laki sebagai mitra sejajar agar Herien Puspitawati, Konsep, Teori dan Analisis Gender, (Bogor: PT IPB Press, 2013), hlm. 5 31 Agung Setiyawan, Mudzakkar dan Muannats: Sumber Pendidikan Islam Bias Gender, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, No. 2 Desember 2014), hlm. 254 43 mendapatkan perlakuan adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan.

Kesetaraan gender termuat dalam Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000, menyatakan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektik. Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat. Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam hal pemberian kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian, dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta samasama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.

Perubahan Budaya di dunia

Pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli dibidangnya :

1. Hirschman

Menurut Hirschman, perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat. Termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh konflik, perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru dan masih banyak lagi.

Terjadinya perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal menurut Hirschman bisa disebabkan oleh faktor bencana alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan perubahan iklim sekalipun bisa berpengaruh.

2. Max Iver

Max Iver salah satu ahli sosiologi yang juga angkat bicara tentang perubahan sosial budaya. Dimana sosial budaya diartikan sebagai perubahan sosial yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial.

3. Max Weber

Beda dengan pendapat Max Weber, yang mana perubahan sosial budaya adalah situasi yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidaksamaan dengan unsur-unsur yang sudah ada.

4. Gillin

Gillin merupakan cara hidup yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi kebudayaan material, perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi dan dank arena dipengaruhi oleh hasil penemuan baru.

5. W. Kornblum

Terjadinya perubahan sosial budaya menurut W. Kornblum karena disebabkan oleh perubahan susunan budaya. Baik itu perubahan yang bersifat bertahap ataupun dalam jangka waktu yang lama.

6. Kingsley Davis

Dalam buku Human Society, Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

7. Selo Sumardjan

Lebih sederhana, Selo Sumardjan mengatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan di lembaga kemasyarakatan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena terjadi perubahan struktur dan terjadinya perubahan fungsi sosial. Ketika perubahan sosial mengalami perubahan, secara otomatis akan mempengaruhi budaya di masyarakat itu sendiri.

Faktor Penyebab Perubahan Sosial Budaya

Jika kita sudah memahami apa itu arti perubahan sosial budaya, mungkin ada yang penasaran, faktor apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya? Sebenarnya di pengertian para ahli sudah disebutkan faktor perubahan sosial, diantaranya sebagai berikut.

1. Adanya Penemuan Baru

Entah disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat, akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan karena terjadi penemuan baru yang ada di masyarakat.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk

Seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Pasalnya, pengaruh perubahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan struktur di masyarakat.

3. Munculnya Konflik

Dalam hidup bersosial, sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan. Umumnya, konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat. Sehingga timbulah sebuah pertentangan satu dengan yang lain.

Lahirnya konflik atau pertentangan inilah yang mendorong sebagian orang mencari problem solving atas masalah yang terjadi. Dengan kata lain, kehadiran konflik satu sisi mendorong untuk melakukan kreativitas dan mendorong seseorang untuk menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan.

4. Terjadi Revolusi

Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang lain adalah karena terjadi pemberontakan atau revolusi. Nah, untuk kasus ini, umumnya terjadi dari luar masyarakat. Revolusi terbentuk di luar lingkungan alam fisik sekitar masyarakat. Misalnya, karena terjadi bencana alam atau terjadi perang.

5. Keterbukaan Pada Lapisan Masyarakat

Faktor penyebab kenapa terjadi perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Memang tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu keterbukaan dan openmind terhadap hal-hal baru sehingga lebih update.

Satu sisi, jika lapisan masyarakat tidak memiliki dasar nasionalisme yang tinggi, budaya lama warisan leluhur kita yang filosofis akan ditinggalkan dan budaya lama akan hilang.

6. Motivasi Berprestasi

Terjadinya perubahan sosial budaya bisa juga disebabkan karena lapisan masyarakat memiliki motivasi berprestasi (motivasi untuk maju)

lebih besar. Tentu saja ini hal yang positif yang patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Karena kunci kesuksesan sebuah Negara adalah kesadaran kolektif untuk berpikiran maju.

7. Sistem Pendidikan Maju

Masih membicarakan tentang kemajuan, ternyata ranah pendidikan juga berperan penting dalam perubahan sosial budaya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki pemikiran maju, rasional dan analitis.

8. Akulturasi

Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang sering kamu rasakan adalah akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga tidak terasa terjadi perubahan budaya.

9. Asimilasi

Selain proses akulturasi ada juga proses asimilasi yaitu paduan dua budaya yang berbeda. Dimana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga memunculkan budaya baru.

Pandangan islam tentang kesetaraan gender

Pandangan Islam tentang kesetaraan gender dapat dilihat dari berbagai perspektif. Agama Islam mengajarkan bahwa pria dan wanita memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan, tetapi kadang-kadang interpretasi terkait peran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat berbeda.

- a. Kesetaraan dalam Kebajikan dan Kepatuhan Terhadap Tuhan: Dalam ajaran Islam, baik pria maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, mempraktikkan ibadah, memperoleh pendidikan agama, dan melakukan amal kebajikan.
- b. Kesetaraan di Mata Tuhan: Dalam pandangan Islam, pria dan wanita memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah tidak membedakan antara pria dan wanita dalam hal pahala dan penghargaan spiritual.
- c. Perbedaan Peran dan Tanggung Jawab: Walaupun ada perbedaan dalam peran dan tanggung jawab antara pria dan wanita dalam Islam, hal ini tidak berarti ketidaksetaraan. Misalnya, dalam keluarga, pria dianggap sebagai pemimpin keluarga dengan tanggung jawab

memberikan nafkah, sementara wanita memiliki peran penting sebagai ibu dan pendidik di rumah.

- d. Perlindungan dan Keadilan: Islam menekankan perlunya perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak wanita, seperti hak waris, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi.

Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan terhadap kesetaraan gender dalam Islam bisa ditafsirkan berbeda oleh masyarakat dan ulama Islam yang berbeda. Beberapa komunitas mungkin menerapkan interpretasi yang lebih egaliter, sementara yang lain mungkin lebih menekankan pada perbedaan peran dan tanggung jawab sesuai dengan tradisi dan konteks budaya mereka.

Manifestasi Ketidakadilan Gender

Untuk memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan gender. Paling tidak terdapat 5 bentuk manifestasi ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan politik), stereotipe (pelabelan negatif), violence (kekerasan), dan double burden (beban kerja lebih banyak dan panjang).

1. Marginalisasi

Marginalisasi yang menyebabkan pemiskinan terhadap laki-laki dan perempuan banyak terjadi di suatu masyarakat maupun Negara. Marginalisasi ini disebabkan oleh banyak hal seperti penggusuran, bencana alam dan eksploitasi. Di samping itu ada pula marginalisasi yang menyebabkan pemiskinan terhadap perempuan saja yang disebabkan oleh perbedaan gender. Telah banyak kajian dilakukan untuk membahas program pembangunan yang menyebabkan pemiskinan atas kaum perempuan.

Salah satunya adalah program revolusi hijau (green revolution). Program ini secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga membuat mereka miskin. Karena program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah dan cara memanen dengan sistem tebang menggunakan sabit, maka tidak ada lagi perempuan yang punya kesempatan untuk ikut memanen dengan menggunakan ani-ani -sebuah alat yang dulunya digunakan perempuan dengan cara memotong tangkai padi satu persatu. Adanya diskriminasi pembagian kerja menurut gender juga diakui menyebabkan marginalisasi. Ada pekerjaan tertentu yang dianggap lebih cocok untuk perempuan.

Dalam keyakinan gender, perempuan dianggap tekun, sabar, dan ramah. Karena itu, pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah sekretaris, perawat, pramugari, kasir, guru TK, dan sebagainya. Sebenarnya anggapan seperti itu tidak menjadi soal. Tetapi yang kemudian menyebabkan ketidakadilan adalah karena “pekerjaan perempuan” tersebut selalu dinilai lebih rendah dibandingkan “pekerjaan laki-laki”.

2. Subordinasi

Pandangan yang menyatakan bahwa perempuan adalah makhluk irrasional atau emosional mengakibatkan munculnya pemahaman bahwa perempuan selayaknya memiliki posisi yang tidak penting. Hal ini menyebabkan subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi ini terjadi dalam berbagai bentuk yang berbeda pada waktu dan tempat yang berbeda pula. Pada masa lalu masyarakat Jawa punya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya dia akan melakukan pekerjaan di dapur. Sudah menjadi garis bagi perempuan bekerja di dapur untuk melayani suami dan keluarganya yang lain.

Di beberapa tempat masih sering terdengar bahwa perempuan menjadi pilihan pertama untuk tidak disekolahkan bila suatu keluarga mengalami hambatan biaya. Bahkan pemerintah pernah memiliki peraturan, jika suami akan pergi belajar -dan meninggalkan keluarga- dia bisa mengambil keputusan sendiri. Tetapi bila istri yang hendak pergi belajar -dan jauh dari keluarganya- harus mendapat izin dari suami.

3. *Stereotype*

Stereotype adalah pelabelan dan penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang bisa merugikan. Salah satu jenis stereotype adalah yang bersumber dari pandangan yang bias gender. Contoh, perempuan yang bersolek adalah untuk memancing perhatian lawan jenisnya. Akibatnya, setiap terjadi pelecehan seksual atau bahkan pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan yang menjadi korbannya.¹⁹ Contoh lain, masyarakat punya anggapan bahwa tugas pokok perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Akibatnya perempuan tidak boleh aktif dalam kegiatan yang dianggap “wilayah” laki-laki, karena menyalahi kodratnya. Stereotype terhadap perempuan banyak terjadi di mana-mana. Mulai dari peraturan pemerintah, aturan keagamaan hingga kultur dan kebiasaan masyarakat banyak dikembangkan dari stereotype tersebut.

4. *Violence*

Kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh pandangan gender dapat berbentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Dapat terjadi pada tingkat rumah tangga, negara, bahkan tafsir keagamaan. Salah satu bentuk kekerasan fisik adalah pemerkosaan dalam perkawinan. Budaya dan penafsiran atas ajaran keagamaan mengajarkan bahwa istri harus selalu menyenangkan suami, melayani suami, dan mematuhi suami.

Ajaran ini dapat menyebabkan pemerkosaan dalam rumah tangga tetap berlangsung, karena bisa saja sebenarnya suatu ketika istri tidak ingin melakukan hubungan seks, tetapi karena harus patuh terhadap “ajaran agama” maka dengan terpaksa ia melayani suaminya. Sedangkan bentuk kekerasan non fisik seperti ancaman oleh suami terhadap istrinya, pelacuran, dan sejenisnya. Masyarakat dan pemerintah sering menggunakan standar ganda terhadap pekerja seks ini. Di satu pihak, mereka melarang dan menangkapinya, namun di lain pihak tetap menarik retribusi dari para pelacur. Di samping itu mereka dipandang rendah, namun tempat mereka selalu saja ramai dikunjungi.²⁰

5. *Double Burden*

Menurut teori hukum alam (teori nature), perempuan secara alami memiliki sifat keibuan, penyabar, penyayang, lemah-lembut, pemelihara, dan rajin. Sifat seperti ini sangat cocok untuk menjadi ibu rumah tangga dan semua pekerjaan domestik yang lain. Karena semua pekerjaan domestik dilakukan oleh perempuan, akibatnya beban pekerjaannya sangat berat. Meski beban kerjanya lebih berat -paling tidak waktu yang digunakannya lebih lama- namun hasil kerja tersebut tidak dihargai secara ekonomi, bahkan status sosialnya dihargai lebih rendah dibanding pekerjaan publik. Hal ini sebagai bukti adanya ketidakadilan terhadap perempuan.

Tafsir Keagamaan dan Ketidakadilan Gender

Kebanyakan agama besar di dunia mempunyai dalil-dalil tertentu tentang kehidupan seksual antara manusia, tentang pendefinisian identitas laki-laki dan perempuan serta seksualitas mereka, dan tentang kehidupan keluarga. Biasanya juga dirumuskan persoalan warisan, perkawinan, perceraian, atau hubungan-

hubungan ekonomi antara sesama manusia-khususnya antara laki-laki dan perempuan.

Dalil-dalil tersebut kemudian diberikan penafsiran oleh pemeluknya agar dapat dipahami lebih jelas. Dalam kenyataannya, tafsir keagamaan kadang dilakukan secara bias - termasuk adanya bias laki-laki dalam hubungan gender. Sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi umat Islam, al Quran -secara normative menganugerahkan status yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Di sisi lain, dalam konteks sosial tertentu, al Quran juga mengakui superioritas laki-laki. Namun para ulama yang menafsirkan ajaran al Quran tersebut banyak mengabaikan konteks sosial yang dimaksud sehingga menjadikan laki-laki sebagai makhluk superior secara absolut. Pemahaman seperti itu mewarnai berbagai penafsiran terhadap ajaran yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi penafsiran bias laki-laki. Salah satunya adalah kultur Timur Tengah abad pertengahan. Kultur semacam itu di sebagian masyarakat Islam masih dipertahankan, meskipun di ebagian yang lain sudah tidak berlaku. Dalam kasus ini kultur patriarkhi benar-benar ikut andil dalam melanggengkan ketidakadilan gender.

Sebelum ajaran Islam turun di Jazirah Arab, budaya masyarakatnya kental dengan patriarkhi. Bahkan perempuan dipandang sebagai pembawa sial. Karena itu jika lahir anak perempuan dihalalkan untuk dibunuh. Menurut Sanderson²⁵, gender bersifat universal. Karena itu, wilayah-wilayah lain di luar Jazirah Arab -termasuk juga Indonesia- budaya masyarakatnya diwarnai oleh aturan-aturan patriarkhi, meski dalam kasus tertentu perempuan disejajarkan dengan laki-laki. Ketika ajaran Islam turun dan masuk ke wilayah-wilayah tersebut maka penafsiran terhadap ajaran agama tidak bisa lepas dari budaya setempat - betapapun obyektifnya penafsiran yang dilakukan.

Penafsiran keagamaan dengan nuansa patriarkhi tersebut sudah menjadi sistem nilai -termasuk juga bagi masyarakat Indonesia. Sistem nilai merupakan unsur kebudayaan yang paling sulit berubah dan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap sistem sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁶ Karena itu, penafsiran keagamaan dengan bias gender tersebut tetap bertahan, meskipun gerakan kesetaraan gender terus berjuang untuk melaksanakan misinya. Penafsiran keagamaan menjadi benteng yang sangat kuat dalam melanggengkan bias gender di tengah-tengah masyarakat -khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pandangan islam tentang perubahan budaya di dunia

Pandangan Islam tentang perubahan budaya di dunia bisa bervariasi tergantung pada interpretasi dan pemahaman individu terhadap ajaran agama tersebut. Secara umum, Islam mengakui bahwa budaya akan mengalami perubahan seiring waktu dan konteksnya. Namun, pendekatan terhadap perubahan budaya ini sering kali berkaitan dengan nilai-nilai Islam yang mendasar.

Beberapa prinsip yang sering dipegang dalam pandangan Islam terhadap perubahan budaya meliputi:

1. **Konsistensi dengan Prinsip-Prinsip Islam:** Islam mengajarkan untuk mempertahankan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi perubahan budaya. Jika suatu perubahan bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, umat Islam mungkin akan mengkritik atau menolaknya.
2. **Adaptasi dan Fleksibilitas:** Meskipun Islam memiliki nilai-nilai yang tetap, agama ini juga menekankan adaptasi terhadap perubahan zaman. Konsep *ijtihad* (usaha pemikiran untuk menemukan solusi dalam konteks baru) merupakan salah satu cara di mana Islam beradaptasi dengan perkembangan budaya dan zaman.
3. **Pemeliharaan Identitas Kultural:** Meskipun Islam memungkinkan adaptasi, tetapi nilai-nilai kultural yang sesuai dengan ajaran Islam sering kali dijaga dan dipromosikan. Islam mendorong umatnya untuk mempertahankan identitas budaya mereka selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama.
4. **Keadilan dan Kemanusiaan:** Salah satu tujuan utama Islam adalah menciptakan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan. Dalam konteks perubahan budaya, nilai-nilai ini bisa menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah perubahan tersebut memajukan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan atau tidak.

Dalam praktiknya, pandangan umat Islam terhadap perubahan budaya sangat bervariasi di seluruh dunia, tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di mana mereka hidup. Banyak ulama dan cendekiawan Islam terlibat dalam diskusi yang terus berlanjut tentang bagaimana cara terbaik untuk menjaga konsistensi dengan ajaran Islam sambil menghadapi perubahan budaya yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Dalam konteks pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan perubahan budaya di seluruh dunia, terdapat sejumlah pandangan yang bervariasi dan sering kali kompleks. Kesetaraan gender dalam Islam dipengaruhi oleh interpretasi atas ajaran agama, budaya lokal, dan konteks sejarah. Meskipun terdapat variasi interpretasi, ada aspek penting yang bisa diambil sebagai kesimpulan dari pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan perubahan budaya di seluruh dunia:

1. Prinsip Kesetaraan: Islam mengajarkan prinsip kesetaraan di antara manusia, baik pria maupun wanita, dalam pandangan hak asasi manusia. Kedua jenis kelamin memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan.
2. Konteks Budaya: Pandangan terhadap kesetaraan gender dalam Islam juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Terkadang, tradisi dan interpretasi lokal yang konservatif dapat menjadi penghalang terhadap pencapaian kesetaraan dalam masyarakat.
3. Perubahan Budaya: Islam mampu menyesuaikan diri dengan perubahan budaya, namun pada saat yang sama, mempertahankan nilai-nilai inti ajarannya. Interpretasi yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial menjadi penting dalam menyikapi dinamika perubahan budaya di seluruh dunia.
4. Pendidikan dan Empowerment: Dalam menyikapi kesetaraan gender, Islam menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan bagi wanita dan pria. Pendidikan yang merata dan kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin diyakini sebagai kunci untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar.
5. Keterbukaan terhadap Interpretasi: Islam memberikan ruang bagi berbagai interpretasi terkait kesetaraan gender. Pendekatan yang inklusif dan terbuka terhadap penafsiran yang berbeda memungkinkan evolusi pandangan terhadap isu-isu gender.

Kesimpulannya, pandangan Islam terhadap kesetaraan gender dan perubahan budaya di seluruh dunia sangat kompleks dan tergantung pada banyak faktor. Terdapat upaya dalam menghadapi tantangan perubahan budaya sambil mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam yang mendasar, sembari terus mengembangkan interpretasi yang lebih inklusif dan adaptif dalam konteks zaman yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila. (1992). "Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate". Yale University Press.
- Barlas, Asma. (2002). "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran. University of Texas Press.
- Keddie, Nikki R., and Baron, Beth. (Eds.). (1991). "Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender". Yale University Press.
- Moghadam, Valentine M. (2003). "Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East". Lynne Rienner Publishers.
- Esposito, John L., and Mogahed, Dalia. (2007). "Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think". Gallup Press.
- Afshar, Haleh. (2008). "Religious and Cultural Legitimations for Patriarchy: The Case of Women and the Family in Iran". *Women's Studies International Forum*, 31(4), 297-304.
- Mernissi, Fatima. (1991). "The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam". Addison-Wesley Publishing Company.
- Mir-Hosseini, Ziba. (2000). "Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran". Princeton University Press.
- Badran, Margot. (2009). "Islamic Feminism: What's in a Name?" *Al-Raida Journal*, 123-129.
- Nashat, Guity, and Tucker, Judith E. (Eds.). (1999). "Women in the Middle East and North Africa: Restoring Women to History". Indiana University Press.
- Fayuni, Badriyah dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, (Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang agama Depag RI, 2001), Cet. I
- Islamic Relief USA. (2022). "Women in Islam". <https://www.irusa.org/women-in-islam/>
- United Nations. (2022). "Women, Gender Equality, and Islam". <https://www.un.org/en/sections/issues-depth/women-gender-equality-and-islam/index.html>

TENTANG PENULIS



Tatu Humaeroh, lahir di Lebak 10 November 1973. Putri ke-4 dari 7 bersaudara, pasangan bapak H.Atang Rafiudin dan Ibu Hj.Muti'ah. Mengawali Pendidikan dasarnya di SDN Girilaya V dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Cilisung, Kec. Cipanas, Lebak dan lulus pada tahun 1986, kemudian melanjutkan ke MTS Al-Hidayah Nanggela Kec. Cipanas, Lebak dan lulus pada tahun 1989, selanjutnya melanjutkan ke jenjang berikutnya di PGAN Pandeglang lulus tahun 1992. Melanjutkan ke Piksi Input Serang lulus pada tahun 1997, melanjutkan study di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Program Diploma II, lulus tahun 2001. Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di STIE (Sekolah tinggi ilmu ekonomi) Dwipa wacana Jakarta lulus tahun 2006 dilanjut ke STIT (Sekolah tinggi ilmu tarbiyah) Sirojul Falah Bogor lulus tahun 2008 kemudian melanjutkan ke jenjang S-2 di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, lulus tahun 2020. Kemudian tahun 2023 melanjutkan ke jenjang S-3 di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Riwayat pekerjaan: tahun 2002-2022 mengajar di MTS Bustarul Khair Lebak Mutasi tahun 2022-sekarang mengajar di MTS Darul Ilmi Cicalong Kec. Cibitung Kab. Pandeglang.

PERAN PESANTREN DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN DAN EKONOMI DI INDONESIA MENURUT SCOOT ALLEN BARESH

Muhasor

Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten

muhasor777@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan kompleksitas sosialnya, telah menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Di tengah-tengah laju kemajuan zaman, peran pesantren, sebagai lembaga tradisional pendidikan Islam, menjadi sangat penting dalam peta pendidikan dan ekonomi Indonesia. Pesantren, dengan warisan sejarahnya yang kaya, tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama tetapi juga membentuk landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.

Makalah ini bertujuan untuk menyelidiki peran yang dimainkan oleh pesantren dalam membentuk pendidikan yang inklusif dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Pesantren bukanlah sekadar tempat di mana pelajar belajar Al-Quran dan hadits; mereka telah menjadi pionir dalam menggabungkan ajaran agama dengan pengetahuan modern, sambil membentuk karakter yang kuat dan memberdayakan masyarakat secara ekonomis.

Pesantren tidak hanya sekadar tempat belajar agama; mereka telah menjadi laboratorium bagi inovasi pendidikan yang menciptakan ruang bagi pembelajaran yang holistik, menggabungkan pengetahuan agama dengan keterampilan praktis yang relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, pesantren juga telah menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal, melalui pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Dengan pemahaman mendalam tentang peran pesantren dalam membangun pendidikan dan ekonomi di Indonesia, kita dapat memahami bagaimana pesantren telah menjadi pendorong utama dalam menghadirkan perubahan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Melalui penelusuran lebih lanjut terhadap kontribusi pesantren, kita dapat menggali potensi lebih dalam

bagi kemajuan pendidikan yang inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia

Tulisan ini akan mengeksplorasi peran pesantren dalam membentuk pendidikan yang berakar pada nilai-nilai tradisional dan sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman, serta bagaimana peran tersebut berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun nasional. Dengan demikian, makalah ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya pesantren dalam menciptakan pondasi yang kokoh bagi masa depan pendidikan dan ekonomi Indonesia

PEMBAHASAN

1. Pengertian pesantren

Pondok pesantren merupakan rangkaian dua kata yang terdiri dari kata “pondok” dan “pesantren”. Pondok berarti kamar, gubuk, rumah kecil, yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Ada juga yang berpendapat bahwa pondok berasal dari kata "funduq" yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Karena pondok secara umumnya memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. (Nining Khairotul Aini)

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan dibawah bimbingan seorang kyai. Asrama untuk para santri berada dalam kompleks pesantren dimana tempat tinggalnya kyai.(Herman dalam “Sejarah Pesantren di Indonesia)

Secara terminologi istilah pondok sebenarnya berasal dari bahasa Arab “funduq” yang berarti rumah penginapan, ruang tidur dan asrama atau wisma sederhana.. Menurut Sugarda Poerbawaktja pondok adalah salah satu tempat pemondokan bagi para pemuda-pemudi yang mengikuti pelajaran-pelajaran agama Islam.

Adapun istilah pesantren berasal dari kata santri. kata “santri” juga merupakan penggabungan antara dua suku kata sant (manusia baik) dan tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia yang baik.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pesantren menurut para ahli:

- a) Masthutu, menyatakan bahwa pesantren itu merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.
- b) Djamaluddin, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama yang santrinya menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian dan madrasah yang sepenuhnya beradab dibawah kedaulatan dan kepemimpinan seseorang kyai.
- c) A. Mukti Ali, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang didalamnya terdapat seorang kyai (pendidik) yang mengajar para santri (anak didik) dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut.
- d) Piegeud dan De Graaf, menyatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam nomor dua setelah masjid sebagai tempat penyiaran agama Islam di Indonesia

Dari pengertian beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren merupakan suatu tempat perkumpulan para santri yang ingin menimba ilmu-ilmu agama kepada seorang kyai, guna mempersiapkan diri untuk menciptakan prilaku yang baik dan menjadi seorang yang alim dan bertakwa kepada Allah Swt pesantren juga merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting sebagai tempat peyebaran ajaran-ajaran Islam.

Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang cukup unik karena memiliki elemen dan karakteristik yang berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya. Adapun elemen-elemen Islam yang pokok yaitu: pondok atau tempat tinggal para santri, masjid, kitab-kitab klasik, kyai dan santri. Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah pesantren. Setiap pondok pesantren memiliki kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, namun dibalik perbedaan itu masing-masing pondok pesantren memiliki kesamaan, kesamaan itulah yang disebut dengan ciri khas pesantren.

Jadi suatu pondok pesantren dapat dikatakan sebuah pesantren yang hakiki jika di dalamnya terdapat kelima elemen diatas. Dan suatu pendidikan tidak dapat dikatakan pendidikan Islam jika didalam pendidikan tersebut tidak mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang mana dengan tujuan untuk menciptakan manusia yang memiliki prilaku yang baik sesuai dengan ukuran yang telah dijelaskan didalam Alqur'an dan sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah

Saw dan dapat membawahkan seorang kelompok untuk selalu beriman dan bertakwah kepada Allah swt.

Pesantren yang merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, dimana bila dirunut kembali, sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran dan kewajiban dakwah islamiah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da’i.

Kelangsungan hidup suatu pesantren amat tergantung kepada daya tarik tokoh sentral (kyai atau guru) yang memimpin, meneruskan atau mewarisinya. Jika pewaris menguasai sepenuhnya baik ilmu pengetahuan keagamaan, wibawa, keterampilan mengajar dan keperluan lainnya, maka unsur pesantren akan bertahan lama. Dan sebaliknya pesantren akan menjadi mundur dan mungkin hilang jika pewaris atau keturunannya tidak memenuhi persyaratan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang tertua, yang mana di dalamnya bertujuan untuk mendidik anak didiknya menjadi seorang yang paham agama dan sebagai kader da’i di masa yang akan datang

2. Sejarah Berkembangnya Pondok Pesantren

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim. Mastuhu menyatakan pesantren dalam tempat untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari – hari.

Pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren tidak terlepas hubungannya dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia bermula ketika orang-orang yang masuk islam ingin mengetahui lebih banyak isi ajaran agama yang baru dipeluknya, baik mengenai tata cara beribadah, baca Al-Qur’an, dan mengetahui Islam lebih luas dan mendalam.

Berdirinya pondok pesantren pada periode wali-wali di Jawa tidak terlepas dari kewibawaan dan kedalaman ilmu seorang Kyai, yang kemudian berhasil membina dan mengemblem masyarakat melalui pesantren, sehingga tersebarlah pesantren keberbagai daerah di Jawa dan Madura. Perkembangan pesantren di dua pulau itu, diikuti oleh daerah-daerah lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau yang ada di Nusantara. Setiap lembaga pendidikan tradisional di atas dipimpin oleh seorang yang mempunyai

kewibawaan dan karismatik. Di Jawa dikenal dengan Kyai, Ajeng, Elang, di Sumatera disebut dengan tuan guru, tuan syekh, di Aceh dikenal dengan ulama (orang alim yang memiliki ilmu pengetahuan agama) sepadan dengan fiqih (ahli fiqih atau paham ilmu agama).

Pondok pesantren yang melembaga di masyarakat terutama diperdesaan merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Awal kehadiran pondok pesantren bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam sebagai pedoman hidup (tafaqquh fii ad-din) dengan menekankan pentingnya moral dan masyarakat.

Kiprah pesantren dalam berbagai hal sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi tokoh utama adalah santri. Selain pembentukan kader-kader ulama dan pengembangan keilmuan Islam, juga merupakan gerakan-gerakan protes terhadap pemerintahan colonial Hindia Belanda. Protes tersebut dimonotori oleh kaum santri.

Setelah perkembangan Negara Indonesia, terutama sejak orde baru dan ketika pertumbuhan ekonomi betul-betul naik tajam, pendidikan pesantren menjadi semakin terstruktur dan kurikulum pesantren menjadi lebih tetap. Misalnya, selain kurikulum agama, pesantren juga menawarkan mata pelajaran umum dengan menggunakan kurikulum ganda, yaitu kurikulum Kemendiknas dan kurikulum Kemenag.

Pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan dan penyiaran agama Islam, lahir dan berkembang semenjak masa-masa permulaan kedatangan Islam di negeri kita. Pondok pesantren tidak lahir begitu saja, melainkan tubuh sedikit demi sedikit. Pada umumnya pondok pesantren adalah milik seorang kyai yang memiliki pemahaman ilmu agama yang sangat luas. Berdirinya pondok pesantren biasanya atas adanya persetujuan dari seorang kyai, yang mana seorang kyai ini akan menjadi seorang guru ataupun pemimpin pendirinya pondok pesantren. Dengan beiring waktu pondok pesantren yang awalnya kecil menjadi besar dikrenakan banyaknya para santri yang ingin menimba ilmu agama. Dan kebanyakan kedatangan para santri ke pesantren atas kehendak orang tuanya, dengan harapan agar anaknya menjadi orang yang sholeh, memperoleh berkah dan ridho sang kyai.

3. Peran pesantren dalam pembangunan pendidikan di Indonesia

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lembaga ini layak diperhitungkan dalam pembangunan bangsa di bidang pendidikan, keagamaan, dan moral.

Dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman luar biasa dalam membina, mencerdaskan, dan mengembangkan masyarakat. Bahkan, pesantren mampu meningkatkan perannya secara mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya.

Pesantren telah lama menyadari bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua komponen masyarakat, termasuk dunia pesantren. Karena itu, sudah semestinya pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan SDM ini terus didorong dan dikembangkan kualitasnya.

Pengembangan dunia pesantren ini harus didukung secara serius oleh pemerintah yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Mengembangkan peran pesantren dalam pembangunan merupakan langkah strategis dalam membangun pendidikan.

Dalam kondisi bangsa saat ini krisis moral, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang membentuk dan mengembangkan nilai-nilai moral harus menjadi pelopor sekaligus inspirator pembangkit reformasi gerakan moral bangsa. Dengan begitu pembangunan tidak menjadi hampa dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam eksistensinya, pesantren pada umumnya bersifat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Dengan sifat kemandiriannya inilah pesantren bisa memegang teguh kemurniannya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pesantren pun tidak mudah disusupi oleh aliran atau paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Sedikitnya ada tiga unsur utama penopang eksis dan tidaknya pesantren dalam pendidikan, yaitu kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri, kurikulum pondok pesantren, dan sarana peribadatan serta pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, pondok, madrasah, dan bengkel-bengkel keterampilan. Unsur-unsur tersebut mewujudkan dalam bentuk kegiatannya yang terangkum dalam Tridharma Pondok Pesantren, yaitu pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, pengembangan keilmuan dan keahlian yang bermanfaat, serta pengabdian pada agama, masyarakat, dan negara.

Merujuk pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren memiliki tempat istimewa. Namun, ini belum disadari oleh mayoritas Muslim. Ini karena kelahiran UU tersebut amat belia.

Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal berikut.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.

Eksistensi pesantren sebagai motor penggerak pendidikan keagamaan mendapat legitimasi yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 30 menjelaskan, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.

Pesantren yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat juga diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan: Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ketentuan tersebut mestinya semakin membuka peluang pesantren terus bertahan dan berkontribusi mengembangkan pendidikan keagamaan formal maupun nonformal. Dengan demikian, pesantren mampu melahirkan anak-

anak bangsa yang cerdas, kreatif, memiliki skill dan kecakapan hidup profesional, agamis, serta menjunjung tinggi moralitas.

Pesantren tidak perlu merasa minder, kolot, atau terbelakang. Posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kenyataannya, amanat UU Sisdiknas serta UU Guru dan Dosen serta beberapa peraturan pemerintah lainnya masih belum berpihak pada dunia pesantren. Pesantren nyaris tidak pernah disentuh dan dilibatkan dalam kebijakan sistem pendidikan nasional. Revitalisasi pendidikan pesantren yang diamanatkan UU Sisdiknas pun terabaikan.

Untuk semakin memajukan pendidikan pesantren sesuai amanat UU No 20/2003, eksistensi dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan harus makin ditingkatkan. Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan harus berniat sungguh-sungguh memberikan ruang dan peran yang lebih luas untuk merevitalisasi dan membangun modernisasi dunia pesantren.

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama harus lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan intensif dalam pelaksanaan dan pengelolaan pesantren. Upaya merevitalisasi dan memodernisasi pesantren tentu saja harus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Paling tidak, hal ini bisa dilakukan melalui beberapa terobosan. Pertama, menghapus dikotomi dan diskriminasi terhadap pendidikan pesantren yang selama ini dipandang sebagai bukan bagian dari sistem pendidikan nasional. Kedua, diperlukan adanya pola pendidikan dengan terobosan kurikulum terpadu yang memadukan antara pendekatan sains, agama, dan nilai kebangsaan. Dengan begitu, upaya penanaman nilai agama, moral, dan nilai kebangsaan pada anak didik dapat mencapai sasaran pembelajaran.

Ketiga dan yang tak kalah penting lagi adalah upaya peningkatan kualifikasi, profesionalitas dan kesejahteraan guru pesantren sebagaimana amanat UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Sehingga, guru-guru di pesantren bisa mengajar dengan nyaman dan merasakan hidup yang sejahtera.

4. Peran pesantren dalam membangun ekonomi di Indonesia

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional memberi peluang yang cukup besar bagi pengembangan pesantren. Pasalnya UU tersebut telah menghapus diskriminasi terhadap pendidikan keagamaan yang berlangsung selama ini. Jelasnya,

pendidikan diniyah dan pesantren telah diakui sebagai bentuk pendidikan keagamaan (Pasal 30 ayat 4 UU Sisdiknas Departemen Pendidikan RI). Dengan hal itu beberapa kalangan meyakini bahwa sistem pesantren akan menjadi lebih baik.

Sebab hal itu pula ekonomi memiliki peranan penting dalam kemajuan sebuah instansi, karena meningkatnya ekonomi juga menjadi tolak ukur kemajuan pondok pesantren. Oleh sebab itu pondok pesantren terus berupaya untuk meningkat dalam segala sektor, salah satunya dalam bidang perekonomian.

Oleh karenanya pondok pesantren tidak hanya mendidik santri dalam bidang keagamaan akan tetapi pesantren juga mendidik para santri untuk terus berkembang dalam pengetahuan umum lain, salah satunya dalam bidang ekonomi. Sekarang santri tidak hanya ditekan memahami pendidikan keagamaan tetapi santri juga diajari ilmu ekonomi serta kewirausahaan agar menjadi santri preneur. Pesantren sangat berpotensi dan memiliki peran yang sangat penting dan nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih bagi keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat, dalam konteks pengembangan ekonomi umat. Pesantren sekarang tidak hanya sebagai *agent of social change*, tapi juga harus menjadi pelopor kebangkitan ekonomi umat.

Hal ini, terlihat dengan berdirinya pasar modern yang dipelopori oleh pondok pesantren seperti adanya mini market yang didirikan oleh pesantren. Adanya mini market yang dikelola oleh pesantren sudah tentu hal ini untuk kemandirian ekonomi pesantren. Selain untuk meningkatkan ekonomi pesantren, hal ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat, karena para pelaku UMKM memiliki ruang untuk memasarkan produknya ke mini market yang dikelola pesantren dan para pengelola mini market menyambut baik niatan mereka untuk menjual dan memasarkan produk tersebut.

Banyak kita temui bahwa di dalam mini market tidak hanya menjual kebutuhan pokok saja, akan tetapi juga dalam dunia fashion sekarang sudah ada di mini market. Dengan hal itu, berdirinya mini market sudah tentu disambut baik oleh masyarakat. Di sisi lain transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, juga sebagai transaksi yang bernilai sedekah. Begitulah kira-kira adanya mini market berbasis pesantren.

Pondok pesantren memang dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ko-kurikuler dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat sekitarnya. Tentu saja hal

tersebut tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh sumbangsih dari pihak terkait, mulai dari wali santri, pemerintah, dan masyarakat secara umum. Untuk menanggulangi hal yang demikian inilah pentingnya keberadaan unit usaha dan pengembangan keterampilan di pondok pesantren yang diupayakan dalam menghasilkan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pondok pesantren.

SIMPULAN

Peran pesantren dalam membangun pendidikan dan ekonomi di Indonesia menyajikan gambaran pentingnya peran lembaga pendidikan agama Islam ini dalam kemajuan negara. Dengan menggabungkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan, pesantren berperan sebagai pusat pendidikan yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga membekali siswanya dengan keterampilan praktis dan kecakapan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Pesantren berkontribusi dalam membangun pondasi pendidikan yang kuat, memperkuat moral dan nilai-nilai etika, serta membentuk karakter yang baik pada generasi muda. Selain itu, dengan memasukkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan ekonomi lokal, pesantren membantu meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ekonomi.

Peran pesantren juga terlihat dalam upaya pengembangan ekonomi lokal. Melalui program-program ekonomi seperti wirausaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro, pesantren berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, pesantren bukan hanya sekadar pusat pendidikan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat

Peran pesantren dalam membangun pendidikan dan ekonomi di Indonesia sangatlah signifikan. Dengan menggabungkan pendidikan agama dan pengetahuan praktis, pesantren menjadi lembaga yang mampu membentuk individu yang berakhlak mulia sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan nasional, peran pesantren ini terbukti menjadi salah satu elemen kunci dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, Ridho. (2017). "Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 159-174.
- Azra, Azyumardi. (2006). "Pesantren dan Transformasi Sosial Keagamaan." Mizan Pustaka.
- Djamil, Fathurrahman. (2014). "Pesantren, Ekonomi, dan Keberagaman." *Jurnal Ushuluddin*, 27(1), 69-90.
- Machmudi, Yon. (2012). "Pendidikan Islam di Pesantren: Sebuah Studi Historis." *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 1-20.
- Mustofa, Miftachul Huda. (2019). "Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Lembaga Keuangan Mikro di Pesantren." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 225-240.
- Nata, Abuddin. (2010). "Pemikiran Ekonomi Pesantren: Menggali Kearifan Lokal dalam Menghadapi Globalisasi." *Jurnal Pemikiran Sosial Keagamaan*, 30(1), 71-86.
- Suparlan, Parsudi. (2008). "Pesantren dan Pembangunan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 25-38.
- Syamsul, Arifin. (2015). "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren dalam Mewujudkan Kemandirian Umat." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(1), 45-60.

TENTANG PENULIS



MUHASOR lahir di Jakarta 18 Oktober 1981 putra ketiga dari 4 bersaudara pasangan Bapak (Alm) Chafid Mas Ruri dan (Almh) Siti Ngaisah. Riwayat pendidikan dasarnya di SDN 010 duren sawit Jakarta timur. Kemudian melanjutkan ke SLTPN 167 Jakarta Timur. Kemudian melanjutkan kejenjang selanjutnya di SMUN 5 Tangerang lulus tahun 2000. Selanjutnya Tahun 2024 melanjutkan ke jenjang berikutnya di UIN Syarif Hidayatullah Jurusan Peradilan Agama. Selanjutnya tahun 2011 study di STKIP Pasundan Bandung Jurusan Pendidikan Jasmani dan olah raga, Kemudian melanjutkan kejenjang S2 di UMT (Universitas Muhamadiyah Tangerang) lulus tahun 2021. Kemudian tahun 2023 melanjutkan kejenjang S3 di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Riwayat pekerjaan :

1. tahun 2006-2011 mengajar di SDN Kampung Bambu 2
2. tahun 2007-s/d sekarang mengajar di SD Islam Permata Hati

Kajian Islam Transdisipliner

Pengetahuan Tentang Islam Dalam Lintas Disiplin Ilmu

Kajian Islam Transdisipliner adalah bentuk kajian yang mengintegrasikan pemikiran Islam dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari. Dengan landasan ajaran agama Islam yang kokoh, buku ini menjelajahi hubungan antara agama, ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya bukan hanya untuk merangkai pemahaman yang lebih dalam terhadap Islam, tetapi juga untuk memberikan pandangan yang inklusif terhadap permasalahan global yang dihadapi oleh umat manusia.



Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A.

Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Dalam bab-bab buku ini, pembaca akan diajak melibatkan diri dalam perjalanan pengetahuan yang melintasi batas-batas tradisional, merambah dari sejarah tentang perkembangan lembaga pendidikan Islam hingga eksplorasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kontributor buku ini adalah para mahasiswa doctoral Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan ke-5.

Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan berharga bagi para peneliti, akademisi, mahasiswa, dan pembaca yang ingin mendalami Kajian Islam Transdisipliner. Dalam era globalisasi ini, pemahaman yang holistik terhadap agama dan kehidupan menjadi semakin penting, dan buku ini hadir sebagai kontribusi kecil kami untuk mengisi kekosongan tersebut



Penerbit
CV Afasa Pustaka

